

Mahasiswa Magister PGMI
Pascasarjana IAIN Pekalongan

Perkembangan Madrasah *dari Masa ke Masa*

Sinopsis

Buku Yang Berjudul "Perkembangan Madrasah Dari Masa Ke Masa" merupakan sebuah buku yang membahas tentang sejarah pertumbuhan madrasah mulai masa Islam klasik hingga masa perkembangan MAN Insan Cendikia di Indonesia. Dalam buku ini tidak hanya mengupas sejarah singkatnya saja, tetapi juga menguraikan berbagai hal yang berkenaan dengan berbagai perubahan-perubahan yang menjadi suatu karakteristik tersendiri pada pertumbuhan madrasah dari masa ke masa.

TAHUN
2021

Scientist
PUBLISHING



MPPGMI IAIN Pekalongan

Perkembangan Madrasah dari Masa ke Masa

Scientist
PUBLISHING

Mahasiswa Magister PGMI
Pascasarjana IAIN Pekalongan

Perkembangan Madrasah *dari Masa ke Masa*



Scientist
PUBLISHING

TAHUN
2021

Awaludin Baharshah,Alfiyana Izzatir Rofi'ah,
Assayyidatu Zil Kamala Rofi'ah, Nur Ismiati, Anik
Maghfiroh, Roshida Khaula Aeny, Muhammad Faqih
Firdaus, Miftahul Jannah, Lilis Mulyawati,
Nur Hakimah, Diyah Nurul Fitriyati

Perkembangan Madrasah dari Masa ke Masa



TAHUN 2021

Perkembangan Madrasah dari Masa ke Masa

Penulis:

Awaludin Baharshah, Alfiyana Izzatir Rofi'ah,
Assayyidatu Zil Kamala Rofi'ah, Nur Ismiati, Anik
Maghfiroh, Roshida Khaula Aeny, Muhammad Faqih
Firdaus, Miftahul Jannah, Lilis Mulyawati,
Nur Hakimah, Diyah Nurul Fitriyati

Editor:

Umi Mahmudah & Abdul Khobir

Setting Lay-out:

Awaludin Baharshah
Nur Zakiyah

Cover:

Diyah Nurul Fitriyati

Diterbitkan oleh:

Scientist Publishing

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan 51114
Telp. [0285] 412575, Fax. [0285] 423418

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan ke-1, Agustus 2021

ISBN: 978-623-94894-9-6

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dan khususnya bagi penulis atas terselesaikannya penulisan buku ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta para pengikutnya.

IAIN Pekalongan terkhusus jurusan Pascasarjana PGMI yang secara resmi kelembagaan mencetak calon-calon guru MI yang profesional dan berintegritas tentunya sedini mungkin telah mempersiapkan bagaimana kiat-kiatnya agar para lulusannya bisa melaksanakan tugasnya sebagai guru MI yang handal dan bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Buku yang berjudul "Perkembangan Madrasah dari Masa ke Masa" ini merupakan buku sederhana yang bisa dijadikan sebagai referensi, pegangan atau pedoman bagi guru pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah karena oleh penulis dijelaskan tentang sejarah perkembangan madrasah yang bisa dijadikan sebuah pengetahuan dan wawasan agar siswa menjadi termotivasi dalam pembelajaran.

Kehadiran buku ini diharapkan bisa bermanfaat dan berguna bagi para pendidik serta bagi para mahasiswa keguruan yang sedang mempelajari sejarah perkembangan madrasah. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya buku ini. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas buku

ini di masa mendatang. Terakhir, atas bantuan berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih, “jazakumullah khairul jaza”.

Pekalongan, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
BAB 2: SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA ISLAM KLASIK.....	3
<i>Awaludin Baharshah</i>	
BAB 3: SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA KERAJAAN ISLAM (CIKAL BAKAL MADRASAH).....	44
<i>Alfiyana Izzatir Rofi'ah</i>	
BAB 4: SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA KOLONIAL BELANDA.....	73
<i>Assayyidatu Zil Kamala Rofi'ah</i>	
BAB 5: PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA KOLONIAL JEPANG.....	119
<i>Nur Ismiati</i>	
BAB 6: SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA KEMERDEKAAN.....	132
<i>Anik Maghfiroh</i>	
BAB 7: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MADRASAH ORDE LAMA.....	148
<i>Roshida Khaula Aeny</i>	
BAB 8: SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA ORDE BARU (TAHUN 1968 - 1998)... 	165
<i>Muhammad Faqih Firdaus</i>	

BAB 9: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MADRASAH PADA MASA REFORMASI	202
---	------------

Miftahul Jannah

BAB 10: SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA MODERN.....	225
---	------------

Lilis Mulyawati

BAB 11: SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH MODEL DI INDONESIA.....	286
---	------------

Nur Hakimah

BAB 12: SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MAN INSAN CENDEKIA DI INDONESIA	303
---	------------

Diyah Nurul Fitriyati

BAB 1 PENDAHULUAN

Kata madrasah berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat belajar. Akar katanya *darasa* yang artinya belajar. Madrasah merupakan nama atau sebutan bagi sekolah agama Islam, tempat proses belajar-mengajar ajaran Islam secara formal yang mempunyai kelas dan kurikulum dalam bentuk klasikal.

Dalam bahasa Indonesia, padanan kata madrasah adalah sekolah. Pengertian madrasah dalam bahasa Arab menggambarkan bahwa tempat belajar tak harus dilaksanakan di suatu tempat tertentu. Belajar juga bisa dilaksanakan di mana saja, seperti di masjid atau di surau.

Dalam perkembangannya, kata madrasah secara teknis memiliki arti yaitu suatu gedung atau bangunan tertentu yang lengkap dengan segala sarana dan fasilitas yang menunjang proses belajar agama. Istilah madrasah juga berarti aliran atau madzhab, yakni sebutan bagi sekelompok ahli yang mempunyai pandangan atau paham yang sama dalam ilmu-ilmu keislaman.

Pada awal perkembangan Islam, umat Muslim belum memiliki madrasah atau tempat belajar seperti saat ini. Saat itu, kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan di masjid-masjid. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat menimba ilmu agama di Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu terdapat suatu ruangan tempat belajar yang disebut *suffah*, sekaligus menjadi tempat menyantuni fakir miskin.

Keadaan itu berlangsung hingga pada zaman Khulafa ar-Rasyidin (empat sahabat Nabi SAW) dan Dinasti Umayyah. Madrasah mulai berubah pada era

kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Di masa itu ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kegiatan belajar mengajar sudah dilaksanakan di perpustakaan, istana khalifah serta rumah-rumah para ulama dan tentunya masjid.

Kebanyakan masjid di masa keemasan Islam itu sudah dilengkapi dengan ruang belajar, ruang baca dan ruang perpustakaan. Para ulama dan sarjana mengajar dengan sistem halaqah (murid duduk bersila di sekeliling guru), seperti yang berlangsung Masjidil Haram, Masjid Madinah dan masjid-masjid di Baghdad, Kufah, Basrah, Damaskus dan Kairo.

Buku ini akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafa al-Rasyidin, pada masa Dinasti Umayyah, pada masa Dinasti Abbasiyah, dan pada masa Dinasti Fatimiyah sampai perkembangan madrasah pada masa sekarang.

BAB 2

SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA ISLAM KLASIK

Awaludin Baharshah

NIM. 5320006

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah Pada Masa Rasulullah SAW (611M-632M)

Pendidikan Islam atau madrasah sebagai suatu tempat proses belajar pada masa Rasulullah SAW, dapat dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah.

1. Fase Makkah

Pada fase mekkah, pola pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah sejalan dengan tahapan-tahapan dakwah yang disampaikan terhadap kaum Quraisy, dan dibagi menjadi tiga tahap:

a. Tahap pendidikan Islam secara rahasia dan perorangan

Pada awal turunnya wahyu pertama al-Quran surat al-Alaq ayat 1-5, pola pendidikan yang dilakukan Rasulullah adalah secara sembunyi-sembunyi mengingat kondisi politik yang belum stabil, dimulai dari keluarga dekatnya, mula-mula Rasulullah mendidik istrinya Khadijah untuk beriman kepada Allah,

kemudian diikuti oleh anak angkatnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah, kemudian sahabat karibnya Abu Bakar As Siddiq. Secara berangsur-angsur ajakan tersebut disampaikan secara meluas, tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku quraisy saja, seperti Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidilah, Abu Ubaidilah bin Jahrah, Arqam bin Abi Arqam, Fatimah binti Khattab, Said bin Zaid dan beberapa orang lainnya. Mereka semua tahap awal ini disebut *assabiqunal awwalun* artinya orang yang mula-mula masuk islam. Sebagai lembaga Islam dan pusat kegiatan pendidikan Islam pertama pada era awal ini adalah rumah Arqam bin Abi Arqam. Bahkan di rumah ini pula Nabi SAW menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama islam, termasuk pada sahabat beribadah atau sholat berjamaah¹.

Turunnya wahyu kedua untuk memerintahkan Nabi SAW, supaya menyiarkan agama Islam ke seluruh penduduk jazirah Arab secara terang-terangan. Nabi SAW melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Memang tidak sedikit tantangan dan penderitaan yang dialami Nabi Saw dan sahabat-sahabatnya, tetapi Nabi Saw tetap melakukan penyiaran Islam dan mendidik sahabat-sahabatnya dengan pendidikan Islam. Dalam masa pembinaan pendidikan agama

¹Armai Arief, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 57.

Islam di Mekkah, Nabi Saw mengajarkan Al-Qur'an karena Al-Quran itu intisari dari sumber pokok ajaran Islam. Di samping itu Nabi Saw mengajarkan tauhid kepada para sahabat-sahabatnya².

Intinya pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi Saw selama di Mekkah ialah pendidikan keagamaan (tauhid) dan akhlak serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan ilmiah.

Mahmud Yunus, dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam, menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Mekkah meliputi³:

- 1) Pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata jangan dipersekutukan dengan nama berhala.
- 2) Pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta.
- 3) Pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Saw mengajarkan kepada para sahabatnya untuk berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid.

² Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Husna, 1988), hlm. 107.

³Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), hlm. 211.

- 4) Pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman.

Berkaitan dengan muatan pendidikan di masa Nabi Saw di Mekkah, secara umum dapat dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, pendidikan tauhid, materi ini difokuskan untuk memurnikan ajaran agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim AS, yang telah diselewengkan oleh masyarakat jahiliyah. Secara teori intisari ajaran ini termuat dalam kandungan surat Al-Fatihah ayat 1-7 dan Al-Ikhlash ayat 1-5. Selain itu, pelaksanaan atau pendidikan tauhid juga yang diberikan oleh Nabi Saw kepada para umatnya dengan cara bijaksana, yaitu dengan menuntun akal pikiran untuk mendapatkan dan meniru pengertian tauhid yang diajarkan, dan sekaligus beliau memberikan teladan dan contoh bagaimana pelaksanaan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara konkret. Selanjutnya, beliau memerintahkan agar umatnya mencontoh praktik pelaksanaan tersebut sesuai dengan yang dicontohkan. Berarti disini Nabi Saw telah mampu menyesuaikan diri dengan pola kehidupan masyarakat jahiliyah dengan mengajarkan ilmu tauhid secara baik dengan tanpa kekerasan.

Kedua, materi pengajaran Al-Quran. Philip K Hitti pun menambahkan, bahwasanya materi pelajaran atau kurikulum sangat berorientasi

kepada Al-Quran sebagai textbook⁴. Dalam materi ini diperinci kepada :

- 1) Materi baca tulis (dalam dunia sekarang dikenal dengan imla, dan iqra).
- 2) Materi menghafal ayat-ayat Al-Quran.
- 3) Materi pemahaman Al-Quran (saat ini dikenal dengan tafsir Al-Quran)⁵.

Ketiga, pendidikan amal dan ibadah, dimana perintah shalat yang awal mulanya Nabi Saw dan para sahabat-sahabatnya melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi, namun setelah Umar bin Khattab masuk Islam beliau melakukan secara terang-terangan. Pada mulanya sholat ini belum dilakukan lima kali dalam sehari semalam, namun setelah Nabi Saw Isra' dan Mi'raj barulah diwajibkan untuk sholat lima waktu. Selain itu mengajarkan seputar zakat, yakni semasa di Mekkah konsep zakat diberikan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim serta membelanjakan harta untuk jalan kebaikan.

Keempat, pendidikan akhlak, dimana Nabi Saw semasa di Makkah sangat menekankan kepribadian yang baik (akhlak Al-Mahmudah), diantaranya:

- 1) Adil yang mutlak, meskipun terhadap keluarga atau sendiri.
- 2) Pemaaf.

⁴ Susari, Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Sebelum Madrasah," Dalam Abuddin Nata (ed), *Sejarah Pendidikan Islam Periode Klasik Hingga Modern*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2004), hlm. 33.

⁵Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 11-12.

- 3) Menepati janji, tepat pada waktunya.
- 4) Takut kepada Allah semata dan tiada takut terhadap berhala.
- 5) Berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, dan sebagainya⁶.

Pada masa Islam di Mekkah materi pengajaran Al-Quran yang diberikan hanya berkisar pada ayat-ayat Al-Quran pada surah-surah yang diturunkan ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah. Surah yang turun di Mekkah inilah yang kemudian dikenal dengan surah Makkiyah⁷.

Di masa Nabi Saw, mengutip pernyataan Samsul Nizar, metode pendidikan Islam diterapkan untuk mendidik sahabat-sahabatnya antara lain:

- 1) Metode ceramah, metode ceramah digunakan untuk menyampaikan wahyu yang baru diterimanya dan memberikan penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangannya.
- 2) Dialog, metode ini biasanya dialog antara Rasul dengan Mu'az bin Jabal ketika Mu.az akan diutus sebagai kadi (hakim), ke negeri Yaman, dialog antara Rasul dan sahabat-sahabat untuk membicarakan strategi perang.
- 3) Diskusi atau Tanya jawab sering digunakan Rasul, mengenai suatu hukum kemudian Rasul menjawabnya.

⁶Mahmud Yunu, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 11-12.

⁷ Suwendai, *Sejarah dan Pemikiran Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

- 4) Metode perumpamaan, misalnya orang mukmin itu laksana satu tubuh, bila sakit salah satu anggota tubuh maka anggota tubuh lainnya akan turut merasakannya.
- 5) Metode kisah, misalnya kisah nabi ketika perjalanan isra dan mi'raj dan tentang kisah pertemuan nabi Musa dan nabi Khidir.
- 6) Metode hafalan, misalnya para sahabat dianjurkan untuk menjaga dan menghafal Al-Quran⁸.

Adapun yang menjadi salah satu faktor penting metode pendidikan Islam yang dijalankan Rasul adalah karena beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Rasul adalah Al-Quran yang hidup. Dengan kata lain, pada diri Rasul tercermin semua ajaran Al-Quran yang berbentuk nyata. Rasul adalah pelaksana pertama perintah Allah SWT dan meninggalkan semua larangannya. Oleh karena itu para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu dengan meniru perilaku Rasul Saw.

Dengan demikian, dapat ditegaskan secara sederhana, pendidikan Islam yang dilakukan Rasul di Mekkah bertujuan untuk membina pribadi muslim agar menjadi kader yang berjiwa kuat dan dipersiapkan menjadi masyarakat Islam, mubalig, dan pendidik yang baik.

Pendidikan Islam secara sembunyi-sembunyi atau rahasia ini berlangsung selama tiga tahun.⁹

⁸ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 35

b. Tahap pendidikan Islam secara terang-terangan

Pendidikan secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama tiga tahun, sampai turun wahyu berikutnya, yang memerintahkan dakwah atau pendidikan secara terang-terangan¹⁰. Ketika wahyu itu turun beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul di bukit shafa, menyerukan agar berhati-hati terhadap azab yang keras di kemudian hari (hari kiamat) bagi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai utusannya. Seruan tersebut dijawab Abu Lahab, celakalah kamu Muhammad untuk inikah engkau mengumpulkan kami?, saat itu turun wahyu yang menjelaskan perihal Abu Lahab dan istrinya.

Perintah dakwah terang-terangan dilakukan Rasulullah, seiring dengan jumlah sahabat yang semakin banyak dan untuk meningkatkan jangkauan seruan, karena diyakini dengan dakwah tersebut banyak kaum quraisy yang akan masuk agama islam. Di samping itu keberadaan rumah Arqam bin Abi Arqam sebagai pusat dan lembaga pendidikan islam sudah diketahui oleh kafir quraisy.

Mereka bangkit menentang dakwah Rasulullah dan dengan berbagai macam cara berusaha menghalang-halangnya. Menurut

⁹ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 32.

¹⁰ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Penj. Ali Audah (Jakarta: Balai Pustaka, 1972), hlm. 30-32.

Syalabi ada lima faktor yang menyebabkan orang quraisy menentang dakwah Rasulullah yaitu persaingan pengaruh dan kekuasaan, persamaan derajat dan hal ini berlawanan dengan tradisi arab jahiliyah yang membeda-bedakan derajat manusia berdasarkan kedudukan dan status sosial, takut dibangkitkan setelah mati, taklid kepada nenek moyang dan perniagaan patung¹¹.

c. Tahap pendidikan Islam untuk umum

Tahap ini berlangsung dari akhir tahun kesepuluh kenabian sampai Nabi hijrah ke Madinah. Hasil seruan yang terang-terangan yang terfokus kepada keluarga dekat, kelihatannya belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan, maka Rasulullah mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang terfokus kepada keluarga dekat beralih kepada seruan umum bagi umat manusia secara keseluruhan. Dari sinilah sinar islam memancar ke luar Mekkah. Penerimaan masyarakat Yatsrib terhadap ajaran Islam secara antusias tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu adanya kabar dari kaum yahudi akan lahirnya seorang Rasul, suku aus dan hajrah mendapat tekanan dan ancaman dari kelompok yahudi, konflik antara aus dan hajrah yang berkelanjutan dalam rentang waktu yang sudah lama, oleh karena itu mereka

¹¹Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Terj Muhtar Yahya, (Jakarta: Jayamurni, 1970,),hlm. 61-64.

mengharapkan seorang pemimpin yang mampu melindungi dan mendamaikan mereka¹².

Strategi dakwah secara umum yang dilakukan Rasul ini menyebabkan Islam mulai meluas, bukan hanya dikalangan penduduk Mekkah saja, tetapi sampai keluar Mekkah, sehingga telah melahirkan generasi muslim baru yang memiliki karakter yang kuat. Dalam konteks inilah Abdurrahman Mas'ud mengatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan manusia paripurna, insan kamil, dan guru terbaik. Beliau tidak hanya mengajar dan mendidik tetapi juga menunjukkan jalan, *show the way*. Kehidupannya demikian mengikat dan memberikan inspirasi hingga tidak hanya manusia mendapatkan ilmu dan kesadaran darinya, tetapi jauh lebih dari itu manusia juga mentransfer nilai-nilai dari nya hingga menjadi manusia-manusia baru¹³.

Nabi Saw secara nyata telah mendidik sahabat dari belunggu jahiliyah, kegelapan spiritual, intelektual yang mencakup *culture of silence* dan *structural poverty*. Bila dilihat dari perspektif politik, Nabi Saw mengajarkan kemerdekaan bagi umat yang tertindas. Nabi mengingatkan hak-hak serta tanggung jawab mereka menjadi umat yang melek politik, hingga mereka menjadi umat yang senantiasa

¹²Kamaruzzaman, *Pola Pendidikan Islam Pada Periode Rasululloh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 33-34.

¹³Abdurrahman Mas,ud, *Menuju Paradigma Humanis*, (Yogyakarta: Gamma Media, 2003), hlm. 188.

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bermasyarakat dan bernegara, agar mereka menjadi umat yang kuat dan tidak dirampas hak-haknya¹⁴.

Untuk tidak dirancukan dengan kuttab yang mengajarkan Al-Quran, perlu dibedakan antara kuttab jenis ini dan kuttab yang mengajarkan baca tulis, kuttab jenis baca tulis sudah ada sejak masa permulaan dan sebelum Islam datang. Adapun kuttab yang mengajarkan Al-Quran baru ditemukan setelah Islam datang. Namun begitu, kuttab jenis ini tidak didapati ketika permulaan Islam muncul. Dalam hal ini Ahmad Syalabi berpendapat bahwa meskipun pada permulaan Islam rencana pelajaran difokuskan pada menghayati Al-Quran, namun pada saat itu orang yang hafal Al-Quran jumlahnya masih sedikit, hal ini mengingat pada permulaan Islam menghafal Al-Quran merupakan suatu hal yang langka dilakukan orang¹⁵. Namun setelah Islam semakin meluas, pengajaran Islam tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, melainkan materinya ditambah dengan kemampuan membaca Al-Quran secara baik dan benar.

Pada fase Mekkah terdapat 2 macam tempat pendidikan, yaitu rumah Arqam bin Abi Al Arqam merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin beserta Rasulullah untuk belajar

¹⁴Abdurahman Mas,ud, *Menuju Paradigma Humanis...*, hlm. 188.

¹⁵Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam...* hlm. 4.

hukum-hukum dan dasar-dasar ajaran islam. Kemudian Kuttab, pendidikan kuttab tidak sama dengan pendidikan yang diadakan di rumah Arqam bin Abi Al Arqam, pendidikan di rumah Arqam bin Abi Al Arqam kandungan materi tentang hukum Islam dan dasar-dasar agama Islam sedangkan pendidikan di Kuttab lebih terfokus pada baca tulis sastra dan syair arab, dan pembelajaran berhitung namun setelah datang islam materinya ditambah dengan materi baca tulis hukum Islam¹⁶.

Masyarakat hijaz telah belajar membaca dan menulis kepada masyarakat hirah, dan masyarakat hirah belajar terhadap masyarakat himyariyin. Adapun orang yang pertama kali belajar membaca dan menulis di antara penduduk Mekkah adalah Sufyan bin Umayah dan Abu Qais bin Abdul Al Manaf, yang keduanya belajar kepada Biyr bin Abdul Malik, kepada kedua nyalah penduduk Mekkah belajar membaca dan menulis. Oleh karena itu, agaknya dapat dipahami ketika nabi menyiarkan agama islam, di masyarakat quraish baru ada 17 laki-laki dan 5 wanita yang pandai baca tulis¹⁷.

2. Fase Madinah

Pada 622 M ketika mereka hijrah ke Madinah, Rasul berkolaborasi dengan beberapa orang dari

¹⁶ Zainul Afandi Hasibuan, *Profil Rasulullah Sebagai Pendidik Ideal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26-27.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), hlm. 19-20.

suku aus dan khazraj (dua suku utama Madinah) yang dapat mengajarkan membaca dan menulis. Selain itu ketika Nabi Saw hijrah dari Mekah ke Madinah maka langkah pertama yang dilakukan Nabi Saw adalah mendirikan Masjid.

Perkembangan Masjid bila ditinjau dari segi agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT, sementara dari segi sosial berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam dan sebagai tempat hubungan serta ikatan jamaah Islam¹⁸. Setelah lembaga keagamaan dan sosial itu terbentuk, langkah pertama yaitu menata kehidupan sosial masyarakat Madinah yang majemuk, sebab berhijrahnya kaum muslim dari Mekkah berarti kota Madinah telah didiami oleh tiga golongan besar, yaitu golongan muslim Mekah yang disebut dengan kaum muhajirin, golongan kaum muslimin Madinah yang disebut kaum anshar, dan komunitas non-muslim, yaitu golongan yahudi, golongan Kristen minoritas, dan komunitas Arab paganis.

Untuk mempersatukan kaum muslim yang berasal dari berbagai suku bangsa (kabilah), Rasul melakukan terobosan yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum anshar. Persaudaraan itu bukan diikat dari hubungan kabilah, melainkan ikatan agama. Inilah awal terbentuknya umat Islam (*the community of Islam*) untuk pertama kali. Umat Islam Madinah itu, kata Hitti, merupakan suatu

¹⁸Ahmad Ibrahim Syarif, *Daulat Al-Rasul fi Al-Madinat*, (Kuwait: Dar Al-Bayan, 1972), hlm. 87.

miniature dunia Islam¹⁹. Demikian juga kaum yahudi oleh Rasul dipersaudarakan dengan kaum muslim dalam kehidupan sosial politik. Dengan demikian, terbentuknya masyarakat Madinah yang terorganisasi, dan Rasul sebagai pimpinannya.

Persaudaraan itu didasarkan pada perjanjian dalam bentuk tertulis. Intinya kaum muhajirin dan kaum anshar adalah bersaudara, dan antara kaum muslim dan kaum yahudi dan sekutunya bersaudara. Karenanya semua penduduk Madinah punya tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mempertahankan keamanan kota Madinah dari ancaman musuh dari dalam dan luar. Perjanjian juga menyatakan bahwa semua penduduk Madinah memiliki kebebasan melaksanakan ajaran agama masing-masing. Ini berarti bahwa Rasul telah menerapkan kerukunan antar umat beragama. Demikian juga di bidang sosial politik baik orang Islam maupun orang yahudi mempunyai hak dan kewajiban sama. Perjanjian yang disodorkan Nabi Saw disetujui oleh semua pihak termasuk kaum yahudi.

Isi lengkap perjanjian sebagai dikemukakan oleh Ibnu Hisyam, sebagai berikut:

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Perjanjian ini dari Nabi Muhammad SAW: antara orang-orang beriman kaum muslimin dari Quraisy dan Yatsrib serta yang mengikuti mereka dan menyusul mereka berjuang bersama-

¹⁹ Philip K Hitti, *Capital Cities of Arab Islam*, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1973), hlm. 35.

sama, mereka adalah umat yang satu di luar golongan itu.

Kaum muhajirin, mereka bebas melaksanakan kebiasaan mereka; akan menerima atau membayar tebusan darah antara sesama mereka dan menebus tawanan mereka sendiri dengan orang yang baik dan adil antara sesama orang-orang beriman.

Bani auf juga tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Setiap golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang beriman.

Demikian juga bani harits, bani saidah, bani jusyam, bani nadjar, banu aum bin auf dan abu nabit. Orang-orang beriman tidak boleh membiarkan seseorang yang menanggung beban hidup dan hutang yang berat diantara sesama mereka, mereka harus dibantu dengan cara yang baik dalam membayar tebusan tawanan, atau membayar diat.

Orang-orang beriman dan bertaqwa tidak boleh mengikat janji dalam menghadapi mukmin lainnya, harus melawan orang yang melawan kejahatan di antara mereka sendiri atau suka melakukan aniaya, kejahatan, permusuhan, dan berbuat kerusakan diantar orang-orang beriman sendiri, mereka semua sama-sama melawannya walaupun terhadap anak sendiri.

Bahwa orang-orang beriman tidak boleh saling membunuh lantaran orang kafir untuk melawan orang beriman. Jaminan Allah SWT itu satu: dia melindungi yang lemah diantara mereka.

Orang beriman harus tolong-menolong satu sama lain. Barang siapa dari kalangan yahudi yang menjadi pengikut kami, ia berhak mendapat pertolongan dan persamaan, tidak menganiaya atau lawan mereka.

Persetujuan damai orang-orang beriman itu satu: tidak dibenarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian sendiri dengan meninggalkan mukmin lainnya dalam keadaan perang di jalan Allah SWT, tetapi harus mengambil bagian bersama secara adil. Setiap orang yang berperang bersama kami, satu sama lain harus saling bergiliran. Mereka harus saling membela terhadap sesamanya yang telah tewas di jalan Allah SWT dan mereka yang beriman dan bertaqwa hendaklah berada di dalam pimpinan yang baik dan lurus.

Sesungguhnya seseorang tidak dibolehkan melindungi harta benda atau jiwa orang quraisy dan tidak boleh menentang orang beriman. Barang siapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka ia harus mendapat balasan setimpal, kecuali keluarga si terbunuh sukarela, menerima tebusan dan orang-orang beriman harus menentangnya semua dan tidak dibenarkan mereka hanya tinggal diam.

Bahwa seseorang yang beriman yang menyetujui perjanjian ini dan percaya kepada Allah dan hari kemudian, tidak dibenarkan menolong pelaku kejahatan atau membelanya, jika ada yang menolong atau membelanya, maka ia akan mendapat murka Allah, dan tidak ada sesuatu tebusan yang dapat diterima.

Bila diantara kaum timbul perselisihan tentang suatu masalah yang bagaimanapun, maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa antara orang yahudi dan muslim harus bekerja sama mengeluarkan belanja selama mereka dalam keadaan perang.

Bahwa orang-orang yahudi adalah suatu umat dengan orang beriman. Orang-orang yahudi hendaklah berpegang pada agama mereka, demikian juga terhadap semua kelompok yahudi berlaku hal yang sama, tidak dibenarkan seseorang dari mereka keluar kecuali atas izin Rasul.

Bahwa seseorang yang menuntut haknya karena dilukai tidak boleh dirintangi, dan barang siapa yang mendapat serangan atau keluarganya maka mereka harus membela diri, kecuali jika menganiaya, maka Allah yang menentukan.

Bahwa orang yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri demikian juga kaum muslimin. Tetapi antara mereka harus ada tolong menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang pihak yang mengadakan perjanjian ini. Mereka juga sama-sama berkewajiban saling menasehati, saling berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan dosa.

Seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan dosa, terhadap sekutunya, yang teraniaya harus ditolong.

Orang-orang yahudi dan beriman mempunyai kewajiban yang sama mengeluarkan belanja selama dalam keadaan perang. Sebab kota Yatsrib harus

dihormati oleh orang-orang yang mengakui perjanjian ini.

Sesungguhnya tetangga itu seperti jiwa sendiri, tidak boleh diganggu dan diperlakukan secara jahat. Sesungguhnya tempat yang dihormati tidak boleh didiami orang tanpa seizin pemiliknya.

Bila diantara orang-orang yang menyetujui perjanjian terjadi suatu perselisihan yang dapat menimbulkan malapetaka, maka tempat penyelesaiannya dikembalikan Allah dan kepada Rasul, karena Allah sebenarnya selalu bersama dengan orang yang setia memegang perjanjian ini.

Tidak dibenarkan menolong atau melindungi orang-orang quraisy.

Bahwa antara mereka harus saling membantu melawan orang yang mau menyerang Yatsrib. Tetapi apabila telah diajak damai terimalah ajakan perdamaian ini. Dan apabila mereka diajak berdamai maka orang-orang beriman wajib menyambungnya, kecuali kepada orang-orang yang memerangi agama. Bagi setiap orang dari pihaknya sendiri mempunyai bagiannya masing-masing.

Sesungguhnya orang-orang yahudi aus dan pengikutnya mempunyai kewajiban seperti mereka yang sudah menyetujui naskah perjanjian ini dengan segala kewajiban sepenuhnya dari mereka yang menyetujui naskah perjanjian ini.

Sesungguhnya kebaikan itu bukanlah kejahatan dan orang yang melakukannya hanya akan memikul sendiri akibatnya. Dan Allah bersama pihak yang benar dan patuh dengan yang menjalankan isi

perjanjian ini. Hanya orang aniaya dan jahat yang berani melanggar perjanjian ini.

Barang siapa yang keluar dan tinggal di dalam kota Madinah ini, keselamatannya tetap terjamin kecuali orang yang berbuat aniaya dan melakukan kejahatan.

Sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertaqwa²⁰.

Terwujudnya naskah perjanjian ini menurut Hitti merupakan bukti kemampuan Rasul, melakukan komunikasi politik dan bernegosiasi dengan berbagai kelompok masyarakat Madinah, sehingga beliau diakui sebagai pemimpin mereka²¹. Karena beliau mampu mempersatukan seluruh kaum muslimin yang berasal dari berbagai kabilah dan membantu mereka menjadi satu umat. Sebagai suatu jamaah mereka harus saling menolong dan melindungi atas dasar iman dan taqwa dengan menyampingkan hubungan kerabat dan kabilah. Beliau juga berhasil membuat persamaan antara kaum muslim dengan yahudi dalam masalah-masalah umum, sosial, dan politik²². Dengan demikian rasul telah berhasil menghapuskan ikatan darah (primordial etnis) dan kabilah yang menjadi dasar masyarakat arab sebelum Islam, diganti dengan ikatan agama dan menyembah hanya kepada Allah SWT.

²⁰Ibnu Hisyam, *Sirat Nabawwiyat*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi), hlm. 147-148.

²¹Phillip K Hitti, *Capital Arab Of Islam*, hlm. 35

²²Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Al-Islam*, (Al-Mishriyah: Al-Qahijrah, Al-Maqtabah Al-Islamiyah., 1979), hlm. Hlm 103.

B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin (632-661M)

Pendidikan Islam di masa Khulafa Ar-Rasyidin dilakukan secara mandiri, tidak dikelola oleh pemerintah, kecuali pada masa khalifah Umar bin Khattab yang turut campur menambahkan kurikulum di lembaga kuttab. Para sahabat yang memiliki pengetahuan keagamaan membuka majelis pendidikan masing-masing, sehingga pada masa Abu Bakar misalnya lembaga kuttab ini terjadi ketika masyarakat muslim telah menaklukan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Lembaga pendidikan ini menjadi sangat penting sehingga para ulama berpendapat bahwa mengajarkan al-Quran merupakan fardhu kifayah²³.

Pada lembaga pendidikan kuttab dan masjid tingkat menengah, metode pengajaran dilakukan secara seorang demi seorang mungkin dalam tradisi pesantren, metode itu bisa disebut sorogan, sedangkan pendidikan di masjid tingkat tinggi dilakukan dalam salah satu halaqoh (diskusi) yang dihadiri oleh para pelajar secara bersama-sama²⁴.

Pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafa Ar-Rasyidin tidak hanya di Madinah tetapi juga menyebar di berbagai kota diantaranya di Mekkah, di Basrah dan Kuffah (Irak) di Fostat (Mesir), di kota Damshik

²³Asma Hasan Fahmi, *Al Tarbiyah Al -Islamiyah, terj Ibrahim Husein, Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm 30.

²⁴Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2007), hlm 39-40.

(Palestina), di pusat-pusat inilah pendidikan islam berkembang secara cepat²⁵.

Lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan masih sama dengan lembaga pendidikan yang digunakan pada masa Rasulullah yaitu, masjid, suffah, kuttab, dan rumah. Namun dari segi kuantitas dan kualitas sudah banyak mengalami perubahan. Misal kuttab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Lembaga ini mencapai tingkat kemajuan yang berarti ketika masyarakat muslim telah menaklukan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju²⁶.

Selain untuk tempat beribadah masjid juga dijadikan sebagai lembaga pendidikan lanjutan setelah anak-anak tamat belajar dari kuttab. Di masjid ini ada dua tingkat pendidikan yaitu tinggi dan menengah. Materi pendidikan yang diajarkan pada kuttab adalah membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok agama Islam. Adapun materi pada tingkat menengah dan tinggi adalah Al-Quran dan tafsirnya, hadits dan syarahnya, kesehatan, dan fiqih (tasyri)²⁷. Untuk tenaga pendidik adalah beliau sendiri serta para sahabat terdekat Rasul²⁸.

²⁵Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2007), hlm 33.

²⁶Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia 2011), hlm. 60.

²⁷Syamsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*,... hlm. 48-49.

²⁸Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*,... hlm. 61

C. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah pada masa Dinasti Umayyah (661-750M)

Kebijaksanaan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah bani umayyah hampir-hampir tidak ditemukan. Jadi sistem pendidikan islam ketika itu masih berjalan secara alamiah. Karena kondisi pada saat itu diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik dan golongan di dunia pendidikan, terutama di dunia sastra, sangat rentan dengan identitasnya masing-masing. Sastra arab, baik dalam bidang syair, pidato, seni, prosa mulai menunjukkan kebangkitannya. Para raja mempersiapkan tempat balai-balai pertemuan penuh hiasan yang indah dan hanya dapat dimasuki oleh kalangan sastrawan dan ulama-ulama terkemuka. Balai-balai pertemuan tersebut memiliki tradisi khusus yang mesti diindahkan. Seorang yang masuk ketika khalifah hadir mestilah berpakaian necis, bersih dan rapi, duduk di tempat yang sepantasnya, tidak tertawa terbahak-bahak dan tidak meludah, tidak mengingius dan tidak menjawab kecuali ditanya. Dan tidak boleh bersuara keras dan harus belajar menjadi pendengar yang baik, sebagaimana ia belajar bertukar kata dengan sopan dan memberi kesempatan kepada si pembicara membicarakan pembicaraannya, serta menghindari penggunaan kata-kata yang kasar dan gelak tawa terbahak-bahak. Dalam balai-balai pertemuan seperti ini, disediakan pokok-pokok persoalan untuk dibicarakan, didiskusikan, dan diperdebatkan²⁹.

²⁹Muhammad Athiyah Al Abrashi, "Al Tarbiyah Al Ialamiyah, terj Bustami A Ghanidan Djohar Bahry, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 72-73.

Pada masa ini juga disaksikan adanya gerakan penerjemahan ilmu-ilmu dari Bahasa lain ke dalam Bahasa Arab. Tetapi penerjemahan itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis, seperti ilmu kimia, kedokteran, falak, ilmu tata laksana dan seni bangunan. Pada umumnya gerakan penerjemahan ini terbatas kepada orang-orang tertentu dan atas usaha sendiri, bukan atas dorongan negara dan tidak dilembagakan. Orang-orang yang pertama kali melakukan penerjemahan ini adalah Khalid Ibn Yazid, cucu dari Muawiyah³⁰.

1. Tempat dan lembaga-lembaga pendidikan

Bersamaan dengan itu pendidikan Islam pada masa Umayyah ini telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafa Ar-Rasyidin yang ditandai dengan maraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya Khuttab serta Majelis Sastra. Diantara tempat-tempat pendidikan pada masa Dinasti Umayyah adalah:

a. Khuttab

Tingkat pertama untuk belajar menulis, membaca atau menghafal al-Qur'an dan mempelajari pokok-pokok dari agama Islam. Disamping itu murid-murid juga mempelajari tata bahasa Arab, cerita-cerita nabi, hadis dan pokok agama. Peserta yang dididik terdiri dari anak-anak dari lapisan sosial manapun. Bahkan, sebagian anak-anak yang kurang mampu diberi makan dan pakaian dengan cuma-cuma. Anak-anak perempuan pun

³⁰ Franz Rosenthal, *The Classical Heritage in Islam*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1975), hlm. 3.

diberi hak belajar yang sama dengan laki-laki. Setelah lulus, maka murid-murid melanjutkan pendidikan ke Masjid.

b. Masjid

Pada Dinasti Umayyah, Masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah khuttab. Pelajaran yang diajarkan meliputi Al Quran, Tafsir, Hadits dan Fiqh. Juga diajarkan kesusasteraan, sajak, gramatika bahasa, ilmu hitung dan ilmu perbintangan. Diantara jasa besar pada periode Dinasti Umayyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah menjadikan Masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah.³¹ Pada periode ini juga didirikan Masjid di seluruh pelosok daerah Islam. Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah selalu¹ menjadi tumpuan penuntut ilmu diseluruh dunia Islam dan tampak juga pada pemerintahan Walid ibn Abdul Malik 707-714 M didirikan Masjid Zaitunnah di Tunisia yang dianggap Universitas tertua sampai sekarang³².

c. Pendidikan badiah, yaitu tempat belajar Bahasa arab yang fasih dan murni. Hal ini terjadi ketika khalifah Abdul Malik bin Marwan memprogramkan Arabisasi maka muncul istilah Badiah, yaitu dusun Badui di padang sahara mereka masih fasih dan murni sesuai dengan

³¹ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad-21*, (Jakarta, Pustaka Al Husna, 1980), hlm. 19

³² Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad-21,...* hlm. 19.

kaidah Bahasa arab tersebut. Sehingga banyak khalifah yang mengirimkan anaknya ke Badiah untuk belajar Bahasa arab bahkan ulama juga pergi kesana diantaranya adalah Al-Khalil bin Ahmad³³.

- d. d. Pendidikan perpustakaan, pemerintah Dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa khalifah Al-Hakim bin Nasir³⁴.
- e. Majelis Sastra, suatu majlis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Majelis ini sudah ada sejak era khulafaur rasyidin yang diadakan di masjid. Namun pada masa dinasti umayyah pelaksanaannya dipindahkan ke istana dan hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja³⁵.
- f. Bamaristan, yaitu tempat rumah sakit tempat berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran.
- g. Madrasah Mekkah, guru pertama yang mengajar di Mekkah, sesudah penduduk Mekkah takluk, ialah Mu'az bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan mana yang halal dan haram dalam Islam.
- h. Madrasah Madinah, madrasah Madinah lebih termasyhur dan lebih dalam ilmunya, karena di sanalah tempat tinggal sahabat-sahabat Nabi.

³³Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Rasul Samapi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 62.

³⁴Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Rasul Samapi di Indonesia*,...hlm. 62.

³⁵Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. Hlm. 96.

- i. Madrasah Basrah, ulama sahabat yang termasyhur di Basrah ialah Abu Musa Al-Asyari dan Anas bin Malik. Abu Musa Al-Asyari adalah ahli fikih dan hadits serta Al-Quran. Sedangkan Anas bin Malik termasyhur dalam ilmu hadits.
- j. Madrasah Kufah, melahirkan enam ulama besar yaitu Alqamah, Al-Aswad, Masroq, Ubaidah, Al-Haris bin Qais dan Amr bin Syurahbil. Mereka itulah yang menggantikan Abdullah bin Mas'ud sebagai guru di Kufah.
- k. Madrasah Damsyik (syam), setelah negeri Syam (syiria) menjadi sebagian negara Islam dan penduduknya banyak yang memeluk agama Islam, maka negeri Syam menjadi perhatian para khilafah, madrasah itu melahirkan imam penduduk Syam, yaitu Abdurahman Al-Auzaiy yang sederajat ilmunya dengan imam Malik dan Abu Hanifah .
- l. Madrasah Fostat, setelah Mesir menjadi negara Islam ia menjadi pusat ilmu-ilmu agama, ulama yang mula-mula di madrasah-madrasah Mesir ialah Abdullah bin Amr bin Al-as, yaitu di Fostat (Mesir lama) ia ahli hadits dan arti kata yang sebenarnya.

2. Materi Ajar

Ilmu-ilmu yang diajarkan pada kuttab pada mula-mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu: (a) belajar membaca dan menulis, (b) membaca Al-Quran dan menghafalnya, (c) belajar pokok-pokok agama Islam, seperti cara wudhu, shalat, puasa dan sebagainya. Adapun ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri

dari: (a) Al-Quran dan tafsirannya, (b) hadis dan mengumpulkannya, (c) fiqh (tasyri).

Pemerintah Dinasti Umayyah menaruh perhatian dalam bidang pendidikan. Memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau mengembangkan bidang ilmu yang dikuasainya serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Diantara ilmu yang berkembang masa ini adalah:

- a. Ilmu agama, seperti Al-Quran, hadits, dan fiqh. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz sejak saat itulah hadist mengalami perkembangan pesat. Perkembangan ilmu fiqh ini berkembang pesat pada masa pemerintahan bani Umayyah II di Andalusia, sehingga diantaranya lahir 4 mazhab besar yaitu mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'I, Imam Hanafi, dan Imam Hambali.
- b. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid bin Syariah Al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah.
- c. Ilmu pengetahuan bidang Bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari Bahasa, nahwu, shorof, dll.
- d. Bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantiq, kimia, astronomi, ilmu hitung dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta kedokteran.

- e. Ilmu kimia kedokteran, dan astrologi, dalam ilmu pengobatan awalnya masih bersumber pada pengobatan tradisional yang diterapkan Nabi, yang diantaranya adalah mengeluarkan darah dengan gelas (bekam), kemudian pengobatan ilmiah arab banyak yang bersumber dari Yunani, sebagian dari Persia, adapun daftar dokter pertama pada masa Dinasti Umayyah ditempati oleh Al-Haris bin Kaladah yang berasal dari Thaif, yang kemudian menuntut ilmu ke Persia. Harits bin Kaladah itu merupakan orang Islam pertama yang menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani dan koptik tentang kimia, kedokteran, dan astrologi.
- f. Perkembangan seni rupa, prestasi lukis yang gemilang dalam bidang ini ditunjukkan dengan munculnya 'Arabesque' (dekorasi orang Arab), hamper semua motif Islam menggunakan motif tanaman atau garis-garis geometris. Sehingga apa yang kita rebut seni rupa Islam adalah unsur gabungan dari berbagai sumber motif, dan gaya, sedangkan seni rupa, seperti patung merupakan hasil kejeniusan arsitek masyarakat taklukan yang berkembang di bawah kekuasaan Islam dan disesuaikan dengan tuntunan Islam.
- g. Perkembangan musik, terjadi pada masa khalifah yang kedua yaitu Yazid, dimana menurut Philip K Hitti Yazid dikenal sebagai seorang penulis lagu yang memperkenalkan nyanyian dan alat music ke istana Damaskus. Ia memulai praktek penyelenggaraan festival-festival besar di istana dalam rangka memeriahkan pesta kerajaan.

h. Dalam persoalan musik ini menimbulkan polemic dikalangan masyarakat sehingga sebagian ada yang mencela dan ada juga yang mendukung dengan cara mengutip sebagai perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi³⁶.

3. Metode Pendidikan

Metode yang digunakan yaitu metode Rihlah, hal ini dibuktikan ketika zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) dan beliau pernah mengirim surat kepada ulama-ulama lainnya untuk menuliskan dan mengumpulkan hadits. Perintah Umar tersebut telah melahirkan metode pendidikan alternatif, yaitu para ulama mencari hadits kepada orang-orang yang mengetahuinya di berbagai tempat³⁷. Kemudian dalam hukum fiqh pada masa ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu (1) Aliran Ahl Al-Ra'y yang mengembangkan hukum Islam dengan analogi dan (2) Aliran Ahl-al hadits dimana aliran ini tidak akan memberikan fatwa kalau tidak dalam Al-Quran dan hadits³⁸. Dan metode dialektik, pada masa Dinasti Umayyah menimbulkan berkembangnya aliran teologi.

³⁶Al-Ghajah, *Dalam Ihya Ulumudin* (Kairo, 1334), jilid II, mh, 238, yang dikutip oleh Phillip K Hitti, hlm. 35.

³⁷Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), hlm. 259.

³⁸Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*,...hlm. 259.

D. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah Pada Masa Dinasti Abbasiyah (750-1258M)

Sebagaimana banyak dicatat dalam berbagai sumber sejarah, bahwa masa dinasti abbasiyah adalah masa keemasan islam yang ditandai dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Berbagai kemajuan yang dicapai dunia islam tersebut tidak mungkin terjadi tanpa didukung oleh kemajuan dalam bidang pendidikan, karena pendidikanlah yang menyiapkan sumber daya insani yang menggunakan kemajuan tersebut. Keadaan lembaga pendidikan pada masa itu selain masjid, kuttab, istana, perpustakaan, dan al-bimaristan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada masa dinasti abbasiyah ini telah berkembang pula lembaga pendidikan berupa toko buku, rumah para ulama, majelis al-ilmu, sanggar kesastraan, observatorium, dan madrasah³⁹. Kemudian pada masa ini madrasah secara harfiah berarti tempat belajar. Adapun pengertian yang lazim digunakan, madrasah adalah lembaga pendidikan di tingkat dasar dan menengah dan mengajarkan ilmu agama dan ilmu lainnya dengan menggunakan sistem klasikal. Dalam sejarah, madrasah ini mulai muncul di masa khalifah bani abbas, sebagai kelanjutan dari pendidikan yang dilaksanakan di masjid dan tempat lainnya. Dalam kaitan ini, bahwa ketika minat masyarakat untuk mempelajari ilmu di halaqah yang ada di masjid makin meningkat dari tahun ke tahun, dan menimbulkan

³⁹Hasan Abd Al, *al-Tarbiyah Al-Islamiah fi al-Quran*, (Beirut: Dar Al-Fikr ,t, th), hlm 181-219.

kegaduhan akibat dari suara para pengajar dan siswa yang saling berdiskusi dan lainnya dan mengganggu kekhusukan sholat, maka mulai dipikirkan tempat mempelajari ilmu yang dirancang secara khusus serta dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana dan lainnya yang diperlukan. Selain itu berdirinya madrasah ini juga karena ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan yang berkembang dan untuk mengajarkannya diperlukan guru yang lebih banyak, peralatan belajar mengajar yang lebih lengkap, serta pengaturan administrasi yang lebih tertib. Untuk menangani semua keperluan ini dibutuhkan madrasah. Selain itu, madrasah juga didirikan dengan tujuan untuk memasyarakatkan ajaran atau paham keagamaan dan ideologi tertentu, sebagaimana yang terjadi pada madrasah nizamiyah⁴⁰.

Di asia kecil, madrasah diintrodusir oleh dinasti bani sajuk. Madrasah tertua disini didirikan pada abad ke-7 H /13 M. Selanjutnya madrasah tersebar luas pada masa kerajaan usmaniyah (sekitar abad ke-18) madrasah merupakan lembaga pendidikan islam formal di samping kuttab dan masjid di wilayah kerajaan usmani. Ketika turki mengadakan pembaharuan pendidikan islam, posisi madrasah mulai terancam dengan kehadiran sekolah-sekolah umum, dan setelah kerajaan usmani digantikan sistem sekuler di bawah kekuasaan Kemal Attaturk, madrasah

⁴⁰Ahmad Syalabi, *Tarikh Al-Tarbiyah Al-Islamiah*,(Mesir: Kasyaf Lin Nasyr wa al-Thiba'ah wa al-Tauzim, 1954,),hlm. 101.

dihapuskan kedudukannya sebagai lembaga pendidikan islam formal di Turki⁴¹.

Di negara Tunisia, madrasah disebarkan oleh Dinasti Hafiz (1228-1534 M). Madrasah yang pertama dibangun adalah madrasah al-Ma'rad pada tahun 1252 M. Dalam kronikel Tunis disebutkan adanya 11 madrasah di Tunisia, sedangkan di Maghrib, madrasah pertama yang didirikan adalah madrasah al-Syaffarin oleh Abu Yusuf Yaqub bin Abdul Al Haq (1258-1286 M) di Fas pada tahun 1285 M. Berikutnya banyak dibangun oleh penguasa-penguasa Dinasti Maramid dan penggantinya di Fas, Tilimsan, dan kota-kota lainnya⁴².

Di Granada Spanyol, pada tahun 1349 M, sebuah bangunan yang besar didirikan oleh penguasa Nasrid, Yusuf Abu Al Hajjaj, pembangunan madrasah tersebut akhirnya menjadi contoh bagi pendirian madrasah-madrasah di tempat-tempat lain di Andalusia. Akan tetapi kekalahan-kekalahan kaum muslim dengan kaum kristiani Spanyol mempengaruhi nasib madrasah. Orang-orang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu masuk Kristen atau keluar dari Spanyol. Di tahun 1609 M boleh dikatakan tidak ada orang islam lagi di Spanyol. Umumnya mereka pindah ke kota-kota di pantai utara Afrika⁴³.

⁴¹Hillenbrand, "Madrasa" dalam *The Encyklopedia of Islam*, Vol V, (Liden: E.j brill, 1986), hlm. 1127.

⁴²Hillenbrand, "Madrasa" dalam *The Encyklopedia of Islam*, Vol V, (Liden: E.j brill, 1986), hlm. 1128.

⁴³Harun Nasution, *Islam Di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm 62.

Di India madrasah dapat dilacak pada perkembangan kesultanan Delhi pada tahun 1206 M, dan kedudukan Delhi sebagai pusat keilmuan Islam yang penting. Hal ini dapat dibuktikan keberadaan dua madrasah besar pada masa kekuasaan Islam di Delhi. Salah satunya adalah madrasah mu'izyiah, yang didirikan oleh Iltutmish (1211-1236 M). Madrasah tersebut diberi nama oleh Muhammad Ghuri setelah menerima gelar mu'iz al-Din. Masa pendidikan Islam awal menemukan sebuah kemenangan besar pada masa Firuz Shah Tughluk (1351-1388 M), yang menurut Firishta telah membangun tidak kurang dari 30 madrasah di berbagai tempat di wilayah kekuasaannya. Sultan juga tercatat telah merenovasi madrasah dalam jumlah besar diantaranya adalah madrasah firuz shah, yang dibangun di Delhi pada tahun 1352-3 M. Madrasah tersebut dilengkapi dengan asrama untuk guru dan murid⁴⁴.

Pendidikan mencapai kemajuan pesat di berbagai daerah mulai dari abad ke-14 M sampai 15 M di bawah Sultan Ibrahim Sharki, Jaunpur mencapai posisi penting sebagai pusat keilmuan. Kerajaan Bahmani di Deccan terkenal patronasinya terhadap kegiatan pendidikan dan orang-orang terpelajar.

Pendidikan terus berkembang ketika di bawah kekuasaan Mughal, bahkan sampai menduduki posisi penting pada setiap kebijakan pemerintah. Babur (1526-1530 M), mendirikan sebuah madrasah di Delhi, uniknya madrasah ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, seperti madrasah lainnya, tetapi

⁴⁴Hillenbrand, "madrasa" dalam *The Encyclopedia* 1134.

juga mengajarkan matematika, astronomi, dan geografi. Dia juga membentuk departemen umum yang tugasnya mengembangkan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah. Pada masa kekuasaan Akbar (1556-1605 M), sejumlah madrasah didirikan baik oleh pemerintah maupun individu. Akbar sendiri membangun sebuah madrasah megah di Fathpur Sikri, sedangkan di Delhi, Ibu pengasuhnya, Maham Anga, membangun sebuah madrasah pada tahun (1561-1562 M), yang terkenal dengan arsitekturnya. Akbar menyadari bahwa kurikulum madrasah harus meliputi matematika, agriculture, geometri, astronomi, fisika, logika, filsafat alam, teologi dan sejarah di samping pengetahuan agama⁴⁵.

Pada kesimpulannya di masa Dinasti Abbasiyah berdiri bangunan-bangunan atau sarana pendidikan diantaranya yaitu:

1. Madrasah yang terkenal ketika itu adalah madrasah *Nidzamiyah*, yang didirikan oleh seorang perdana menteri bernama Nidzam al mulk (456-486 M). Bangunan madrasah tersebut tersebar luas di kota Baghdad, Balkan, Muro, Tabaristan, Naisabur dan lain-lain.
2. Kuttab, yakni tempat belajar bagi para siswa sekolah dasar dan menengah. Dalam ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa Kuttab adalah sejenis tempat belajar yang mula-mula lahir di dunia Islam, pada awalnya kuttab berfungsi sebagai tempat memberikan pelajaran menulis dan membaca bagi anak-anak dan dinyatakan bahwa kuttab ini sudah

⁴⁵Hillenbrand, "madrasa" dalam *The Encyklopedia* 1135.

ada di negeri Arab sebelum datangnya agama Islam, namun belum dikenal. Di antara penduduk Mekah yang pernah belajar adalah Sofwan bin Umayyah bin Abdul Syam.⁴⁶

3. Majelis *Munadharah*, tempat pertemuan para pujangga, ilmuwan, para ulama, cendekiawan dan para filosof dalam menyeminarkan dan mengkaji ilmu yang mereka geluti.⁴⁷
4. Bait al-Hikmah, yaitu perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi yang serupa di masa imperium Sasania Persia yang bernama Jundishapur Academy. Perbedaannya, pada masa Persia institusi ini hanya menyimpan puisi-puisi dan cerita-cerita untuk Raja, sedangkan pada masa Abbasiyah (Harun Al-Rasyid) institusi ini diberi nama Khizanah al-Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Pada masa al-Makmun diubah namanya menjadi Bait al-Hikmah dipergunakan untuk menyimpan buku-buku kuno yang didapat dari Persia, Bizantium dan bahkan Etiopia dan India.⁴⁸

⁴⁶Rahmawati Rahim, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 12.

⁴⁷ Mahrus As`ad, *Sejarah Kebudayaan Islam*(Bandung: Amirco, 1994), hal. 25-26.

⁴⁸Dudung Abdurrahman dkk. *Sejarah Peradaban Islam: Masa Klasik Hingga Modern*(Yogyakarta: LESFI, 2003), hal. 126.

E. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah Pada Masa Dinasti Fatimiyah

Berdirinya Dinasti Fatimiyah bermula dari masa menjelang akhir abad ke-10 pada saat kekuasaan Dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah. Kondisi Abbasiyah yang melemah ini juga telah menyulut timbulnya pemberontakan dari kelompok yang selama ini merasa tertindas serta membuka kesempatan bagi kelompok syiah, khawarij, dan mawali untuk melakukan kegiatan politik.

Pada periode Dinasti fatimiyah ini mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan al-Muiz, al-Aziz, dan al-Hakim. Puncaknya adalah pada masa al-Aziz, istananya dapat menampung 3000 tamu, masjidnya sangat megah, dan perhubungan sangat lancer.

Kemajuan Dinasti Fatimiyah ini antara lain karena didukung oleh militernya yang kuat, administrasi pemerintahan yang baik, ilmu pengetahuan yang berkembang, dan ekonominya yang stabil. Kemudian untuk sistem pendidikan yang terjadi pada Dinasti fatimiyah di Mesir ditandai antara lain berkembangnya Bahasa dan sastra, ilmu agama, ilmu umum, filsafat, lembaga pendidikan, dan lahirnya para ulama yang memiliki keahlian dalam ilmu agama dan umum⁴⁹.

Perhatian dalam bidang pendidikan di masa Dinasti Fatimiyah juga ditandai pembangunan masjid dan istana, madrasah, perpustakaan, dan gedung Dar al-Ulum (rumah ilmu). Fungsi masjid pada masa ini bukan saja sebagai tempat sholat melainkan juga

⁴⁹Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 196-198.

sebagai tempat berkumpulnya ulama fikih. Kemudian lembaga pendidikan yang berupa madrasah banyak meniru model madrasah nizamiyah yang berada di Baghdad. Namun isi kurikulum dan berbagai ketentuan lainnya disesuaikan dengan mazhab syiah. Selanjutnya perpustakaan, untuk kepentingan ini para khalifah menggunakan perpustakaan untuk memperbanyak penggunaan bahan bacaan berupa buku ilmu pengetahuan. Dengan kegiatan ini, maka perpustakaan istana menjadi perpustakaan terbesar pada masa itu. Perpustakaan terbesar yang dimiliki Dinasti Fatimiyah adalah Dar al-Ulum, yang masih memiliki keterkaitan dengan perpustakaan Dar al-Hikmah. Dengan demikian, jika di Baghdad di masa al-Makmun terdapat Bait al-Hikmah, maka di Mesir masa Dinasti fatimiyah terdapat Dar al-Hikmah.

Di antara warisan lembaga pendidikan yang paling masyhur dan hingga kini masih bertahan adalah Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Universitas ini pada mulanya sebuah masjid yang oleh khalifah Fatimiyah dijadikan sebagai pusat untuk menyebarkan dakwah mereka. Pada masa ini intervensi pemerintah terhadap Al-Azhar sangat besar. Seorang guru misalnya tidak boleh mengajar sebelum mendapat izin dari khalifah. Kemudian beberapa pakar yang pernah menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar, antara lain Abu Hasan Ali bin Numan al-Maghribi di Jami al-Azhar, ia mengajarkan kitab al-Iqtisar. Sistem pengajaran yang digunakan di Universitas Al-Azhar ini adalah sistem Halaqah, yaitu sebuah sistem yang tergolong tua dan sederhana. Dengan sistem ini seorang guru duduk di bantalan yang sedikit agak

tinggi dibandingkan tempat duduk para murid, adapun para murid melingkari sang guru. Ada halaqah bidang fiqih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Caranya seorang guru membacakan teks kitab tersebut, kemudian memberikan makna dan penjelasan sebagaimana yang diberikan oleh sang guru. Kegiatan ini berlangsung sesuai dengan hari dan jam yang disepakati, dan berakhir ketika kitab tersebut sudah tamat dibaca. Karena demikian besar pengawasan yang diberikan oleh khalifah, maka setiap guru dalam halaqah harus terdaftar dan mendapatkan izin mengajar dari khalifah. Murid-murid yang belajar di halaqah tersebut tidak dipungut biaya, atau gratis, karena biaya hidup dan berbagai kebutuhan guru halaqah tersebut ditanggung oleh khalifah⁵⁰.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung dkk. 2003. *Sejarah Peradaban Islam: Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI.

Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah, "Al-Tarbiyah Al-Islamiah. 1993. " Terjemah, Bustami A, Ghanidan Djohar Bakry, Dasar-Dasar pokok Pendidikan Islam", Jakarta: Bulan Bintang.

Arief, Armai. 2005. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, Bandung: Angkasa

⁵⁰Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 202.

- As`ad, Mahruz. 1994. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Bandung: Amirco.
- Asma Hasan Fahmi. 1997. *Al-Tarbiyah Al-Islamiah, terj. Ibrahim Husein. Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fahmi, Asma Hasan. 1997. "Mabadi Al-Tarbiyah Al-Islamiah" diterjemahkan oleh Ibrahim Husein. *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haekal. 1972. *Sejarah Hidup Muhammad*, Penj. Ali Audah, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasibuan, Zainul Afandi. 2007. *Profil Rasulullah Sebagai Pendidik Ideal: Telaah Pola Pendidikan Islam Era Rasulullah Fase Mekkah dan Madinah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hitti Philip K. 1973. *Capital Cities of Arab Islam*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hisyam Ibnu. *Sirat Nabawwiyat*. Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi
- Kamaruzzaman. 2007. *Pola Pendidikan Islam Pada Periode Rasulullah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Langgulong, Hasan. 1990. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad-21*. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Maksum. 1999. *Madrasah. Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.

- Mas,ud Abdurahman. 2003. *Menuju Paradigma Humanis*. Yogyakarta: Gamma Media.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau Dari berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Nata, Abudin. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nizar, Samsul. 2007. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahim, Rahmawati. 2008. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ramayulis. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rosental, Franz. 1975. *The Clasikal Heritage In Islam*. London: Roudledge and kegal Paul.
- Suriadi. 2017. *Pendidikan Islam Masa Rasulullah*. Bengkulu: Belejea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, no 02.
- Suwendai. 2004. *Sejarah dan Pemikiran Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syalabi, Ahmad. 1954. *Tarikh Al-Tarbiyah Al-Islamiah*. Mesir: Kasyaf Lin Nasyr wa al-Thiba'ah wa al-Tauzim.

Syarif Ahmad Ibrahim. 1972. *Daulat Al-Rasul fi Al-Madinat*. Kuwait: Dar Al-Bayan.

Tafsir Ahmad. 2004. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka.

Yunus, Mahmud. 1992. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung

Zuhairini. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 3
SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA
MASA
KERAJAAN ISLAM (CIKAL BAKAL MADRASAH)

Alfiyana Izzatir Rofi'ah
NIM. 5320007

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. MASUKNYA ISLAM KE INDONESIA

1. Proses masuknya Islam ke Indonesia

Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para Tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia, ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat (eropa) yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Tokoh-tokoh itu diantaranya, Marcopolo,

Muhammad Ghor, Ibnu Bathuthah, Dego Lopezde Sequeira, Sir Richard Wainsted.⁵¹

Sedangkan sumber-sumber pendukung Masuknya Islam di Indonesia diantaranya adalah:

a. Berita dari Arab

Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 M) yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabai atau Sribusa. Pendapat ini dikemukakan oleh Crawfurd, Keyzer, Nieman, de Hollander, Syeh Muhammad Naquib Al-Attas dalam bukunya yang berjudul *Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu* dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Hamkadan Abdullah bin Nuh. Bahkan Hamka menuduh bahwa teori yang mengatakan Islam datang dari India adalah sebagai sebuah bentuk propaganda, bahwa Islam yang datang ke Asia Tenggara itu tidak murni.⁵²

⁵¹ Uka Tjandrasasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 122.

⁵² Busman Edyar, dkk (Ed.), *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009), hlm. 207

b. Berita Eropa

Berita ini datangnya dari Marcopolo tahun 1292 M. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia, ketika ia kembali dari cina menuju eropa melalui jalan laut. Ia dapat tugas dari kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada kaisar Romawi, dari perjalanannya itu ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudera dengan ibukotanya Pasai. Di antara sejarawan yang menganut teori ini adalah C. Snouck Hurgronje, W.F. Stutterheim, dan Bernard H.M. Vlekke

c. Berita India

Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena disamping berdagang mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Teori ini lahir selepas tahun 1883 M. Dibawa oleh C. Snouck Hurgronje. Pendukung teori ini, diantaranya adalah Dr. Gonda, Van Ronkel, Marrison, R.A. Kern, dan C.A.O. Van Nieuwinhuize.⁵³

⁵³Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 191.

d. Berita Cina

Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng-Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. T.W. Arnol pun mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, ketika mereka mendominasi perdagangan Barat-Timur sejak abad-abad awal Hijrah atau abad ke-7 dan ke-8 M. Dalam sumber-sumber Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 M seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera (disebut Ta'shih).⁵⁴

e. Sumber dalam Negeri

Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia. Yakni Penemuan sebuah batu di Leran (Gresik). Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab, yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah Binti Maimun (1082 M). Kedua, Makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadhan tahun 676 H atau tahun 1297 M. Ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat

⁵⁴ Busman Edyar, dkk (Ed.), *op.cit.*, hlm. 187.

tahun 1419 M. Jirat makam didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab.⁵⁵

Mengenai masuknya Islam ke Indonesia, ada satu kajian yakni seminar ilmiah yang diselenggarakan pada tahun 1963 di kota Medan, yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 H/7 M, langsung dari negeri Arab.
 - 2) Daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Setelah itu masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam Pertama yaitu Aceh.
 - 3) Para dai yang pertama, mayoritas adalah para pedagang. Pada saat itu dakwah disebarkan secara damai.⁵⁶
2. Saluran dan Cara-cara Islamisasi di Indonesia

Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya, dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada enam, yaitu:

a. Saluran Perdagangan

Di antara saluran Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad-7 sampai abad ke-16, perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat,

⁵⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2007), hlm. 191-192

⁵⁶ Ahmad Al-Ussairi, *Sejarah Islam, Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 336.

Tenggara dan Timur benua Asia dan dimana pedagang-pedagang Muslim (Arab, Persia, India) turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang.⁵⁷

Dijelaskan disini bahwa proses islamisasi melalui saluran perdagangan itu dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Secara umum Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan itu mungkin dapat digambarkan sebagai berikut: mula-mula mereka berdatangan di tempat-tempat pusat perdagangan dan kemudian diantaranya ada yang bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan-perkampungan. Perkampungan golongan pedagang Muslim dari negeri-negeri asing itu disebut Pekojan.⁵⁸

b. Saluran Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan. Karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari

⁵⁷ Uka Tjandrasasmita (Ed.), *op.cit.*, hlm. 200.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 201.

kedamaian di antara dua individu. Kedua individu yaitu suami isteri membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim.

Saluran Islamisasi melalui perkawinan yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalanan dengan Islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim.⁵⁹ Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim.⁶⁰

c. Saluran Tasawuf

Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. hal itu berkaitan langsung dengan penyebaran Islam di

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 202.

⁶⁰ Badri Yatim, *op.cit.*, hlm. 202.

Indonesia. Dalam hal ini para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jalur tasawuf, yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima.⁶¹ Diantara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syeh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih berkembang di abad ke-19 bahkan di abad ke-20 ini.⁶²

d. Saluran Pendidikan

Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi, mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kyai-kyai, atau ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab,

⁶¹ Busman Edyar, dkk (Ed), op.cit, hlm. 208

⁶² Uka Tjandrasasmita (Ed.), op.cit., hlm. 204.

setelah keluar dari suatu pesantren itu maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan, menjadi kyai yang menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin terkenal kyai yang mengajarkan semakin terkenal pesantrennya, dan pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih jauh lagi.⁶³

e. Saluran Kesenian

Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada masjid kuno Demak, Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Cirebon, masjid Agung Banten, Baiturrahman di Aceh, Ternate dan sebagainya.⁶⁴ Contoh lain dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang, yang digemari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang itu disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. Selanjutnya diadakan dakwah keagamaan Islam.⁶⁵

f. Saluran Politik

Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya.

⁶³ Badri Yatim, *op.cit.*, hlm. 203.

⁶⁴ Uka Tjandrasasmita (Ed.), *op.cit.*, hlm. 205.

⁶⁵ Badri Yatim, *op.cit.*, hlm. 203.

Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini.⁶⁶

B. PENDIDIKAN PADA MASA KERAJAAN ISLAM

Sejak awal berkembangnya Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia. Islamisasi menjadi alasan utama melaksanakan pengajaran Islam walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Kebutuhan masyarakat Islam dengan pendidikan mendorong masyarakat Islam Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa, umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu Budha menjadi pesantren. Umat Islam Minangkabau mengambil alih surau yang merupakan peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan Islam dan di Aceh meunasah ditransfer menjadi lembaga pendidikan Islam.⁶⁷

Adanya Islamisasi dan pendidikan Islam yang sangat pesat di Nusantara pada saat itu berhasil membentuk masyarakat Islam yang mendorong lahirnya kerajaan Islam di Nusantara. Beberapa

⁶⁶ Uka Tjandrasasmita (Ed.), *op.cit.*, hlm. 206-207.

⁶⁷ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi dari Era Nabisaw. sampai Ulama Nusantara*, cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2012, hlm. 219.

kerajaan Islam pada masa sebelum zaman penjajahan adalah sebagai berikut.

1. Kerajaan Islam di Sumatera

a. Kerajaan Perlak

Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Islam Perlak yang berdiri pada tahun ke-3 H/abad ke-9 M.⁶⁸ Kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Belum didapatkan data bagaimana pendidikan Islam dilangsungkan, tetapi diduga besar pendidikan dilangsungkan di masjid istana bagi keluarga pembesar, di masjid-masjid, di rumah-rumah, serta surau-surau bagi masyarakat umum. Materi pembelajaran pendidikan Islam dibagi menjadi dua tingkatan: pertama yaitu tingkat dasar yang terdiri atas pelajaran membaca, menulis, bahasa Arab, pengajian alquran, dan ibadah praktis. Kedua yaitu tingkat yang lebih tinggi dengan materi-materi ilmu fiqih, tasawuf, ilmu kalam, dan lain sebagainya.⁶⁹

Tidak terlalu banyak sumber yang menjelaskan geliat perkembangan sistem pendidikan Islam pada kerajaan ini. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena kerajaan ini berdiri pada awal datangnya Islam. Menurut beberapa sumber, data yang didapatkan hanya

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 219.

⁶⁹ Menunggu Asingnya Islam, "Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia," Blog SALAAM http://jimmygeneh.blogspot.com/2012/03/pendidikan-islam-pada-masakerajaan_13.html. 8 April 2021.

menceritakan geliat dakwah dan penyiaran Islam di kerajaan tersebut.

Rajanya yang keenam bernama Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin, terkenal sebagai Sultan yang arif bijaksana lagi alim. Beliau adalah seorang ulama yang mendirikan perguruan tinggi Islam. Lembaga majelis taklim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim. Lembaga tersebut juga mengajarkan dan membacakan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi, misalnya kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i.⁷⁰

Ketika berdiri Kerajaan Perlak sekitar abad pertama Hijriyah, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti *meunasah*, *rangkang*, *dayah*⁷¹ dan bentuk pengajian di surau dan masjid pasti sudah berkembang luas di wilayah Kerajaan Perlak. Adalah suatu hal yang tidak mungkin di suatu wilayah berdiri sebuah kerajaan Islam, kalau masyarakat sekitarnya belum memeluk agama Islam. Dan adalah suatu hal yang tidak bisa masuk akal pula proses penyebaran agama Islam dapat berjalan di suatu wilayah, kalau tidak ada

⁷⁰ Ramayulis, op. cit., hlm. 223.

⁷¹*Meunasah* adalah tempat belajar juga berfungsi sebagai tempat ibadah (shalat), tempat pertemuan, musyawarah, pusat informasi, tempat tidur, dan tempat menginap bagi musafir. *Rangkang* adalah tempat tinggal murid, yang dibangun di sekitar masjid. Sedangkan *Dayah* adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran agama yang bersumber dari bahasa Arab. *Rangkang* dan *Dayah* dalam praktiknya sama dengan pesantren di Jawa. Lihat: Haidar Putra Daulay, op. cit., hlm. 23-26.

kegiatan pendidikan dan dakwah sebagai faktor utama.⁷²

b. Kerajaan Pasai

Kerajaan Pasai diperkirakan berdiri pada awal atau pertengahan abad ke-13 M sebagai hasil islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang muslim sejak abad ke-7 M. Para ahli sejarah umumnya berpendapat bahwa pendiri kerajaan ini adalah Sultan Malik al-Saleh.⁷³ Menurut keterangan Ibnu Batutah, seorang pengembara terkenal dari Maroko yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya dari Delhi ke Cina pada tahun 1345 M. Beliau menyatakan bahwa Islam sudah hampir satu abad lamanya disiarkan di sana. Ia meriwayatkan kesalehan, kerendahan hati dan semangat keagamaan rajanya. Berdasarkan beritanya juga diketahui bahwa kerajaan Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan juga tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan keduniawian sekaligus.⁷⁴ Selain itu juga diketahui bahwa sistem pendidikan yang berlaku di Kerajaan Pasai adalah: materi pendidikan dan pengajaran agamanya bermazhab

⁷² Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam Dari Masa ke Masa, Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani, 2010), hlm.30.

⁷³ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 236.

⁷⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4* (Cet. 11, Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 2003), hlm. 249.

Syafi'i; sistem pendidikannya informal berupa majlis taklim dan halaqah; tokoh pemerintahan merangkap ulama; biaya pendidikan bersumber dari negara.⁷⁵

c. Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh Darussalam yang diproklamasikan pada 12 Zulkaedah 1916 H (1511 M) menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu. Para sultan Aceh sangat mencintai ilmu dan ulama.⁷⁶ Hal ini sejalan dengan wahyu pertama yang memerintahkan kepada manusia untuk membaca dan menuntut ilmu pengetahuan. Mungkin hal inilah yang menjadi dasar dari pemberantasan buta huruf dan buta ilmu pada masa itu. Agama dan pengetahuan mendalam tentang agama yang dianutnya menjadi tolok ukur pada masa itu, tanpa memandang asal negara dan bangsanya.

Adapun peranan kerajaan Islam di Aceh Darussalam dalam bidang pendidikan dapat dilihat dalam tulisan Hasjmy "Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah". Dia mengemukakan di antara lembaga-lembaga negara yang tersebar dalam *Qānūn Meukuta Ālam*, ada tiga lembaga yang bidang tugasnya meliputi masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu:

1) Balai Setia Hukama

Balai ini dapat disamakan dengan lembaga ilmu pengetahuan tempat berkumpulnya para

⁷⁵ Zuhairini et al., op. cit., hlm. 136.

⁷⁶ Ramayulis, op. cit., hlm. 223.

sarjana, hukama (ahli pikir) untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2) Balai Setia Ulama

Balai ini dapat disamakan dengan jawatan pendidikan yang membahas masalah pendidikan.

3) Balai Jamaah Himpunan Ulama

Balai ini disamakan dengan sebuah studi klub tempat para ulama/sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran membahas masalah-masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan.⁷⁷

Jenjang dan struktur pendidikannya pun sudah tersusun sebagaimana lembaga pendidikan formal saat ini. Jenjang pendidikannya yaitu:

1) *Meunasah* (madrasah), terdapat di kampung dan berfungsi seperti sekolah dasar. Materi yang diajarkan meliputi menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa melayu, akhlak, dan sejarah Islam.

2) *Rangkang*, setingkat madrasah tsanawiyah. Jenjang pendidikan ini diselenggarakan di tiap mukim. Materi yang diajarkan adalah bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, ilmu hisab, akhlak, dan lain-lain.

3) *Dayah*, terdapat di daerah Ulubalang setingkat madrasah aliyah. Terkadang dilaksanakan di masjid, materi yang diajarkan bahasa Arab, fiqih, tauhid, tasawuf, ilmu bumi, sejarah dan tata negara, ilmu pasti, dan faraid

⁷⁷ A. Hasymi, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 190-191.

- 4) *Dayah Teuku Cik*, disamakan dengan perguruan tinggi. Pada jenjang ini diajarkan fiqih, tafsir, hadits, tauhid, ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantiq, ilmu falak, dan filsafat.⁷⁸

d. Kerajaan Siak

Islam pertama kali masuk ke Siak (Riau) diperkirakan tahun 12 M. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan kuburan bercorak Islam, Nizamuddin al-Kamil, seorang laksamana dari Dinasti Fatimiyah yang bertahun 1128 M.⁷⁹ Pendidikan di Kerajaan Siak berkembang sangat pesat pada masa Sultan Syarif Kasim II. Beliau merupakan figur tokoh yang sangat elok. Di masa pemerintahannya, beliau mendirikan sekolah-sekolah seperti: H.I.S pada tanggal 15 September 1915 untuk seluruh penduduk Kesultanan Siak, tahun 1917 beliau membangun Sekolah Agama Islam, Madrasah Taufiqiah Al-Hasyimah, Madrasah Annisa' (khusus wanita), mendirikan sekolah latihan untuk wanita, dan mendirikan asrama pelajar.⁸⁰

2. Kerajaan Islam di Jawa

a. Kerajaan Demak

Kerajaan Demak berdiri kurang lebih setengah abad, antara tahun 1500-1550. Raja

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 225-226.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 226.

⁸⁰ Rahmi Putri Atria, "Pendidikan Sosial Budaya Masyarakat Melayu Riau (Sebuah Warisan Kerajaan Siak Sri Indapura)," Blog E=MC2. <http://anjunofarofpki.blogspot.com/2013/07/pendidikan-sosial-budaya-masyarakat.html>. 8 April 2021.

pertamanya adalah Raden Fatah.⁸¹ Awalnya, Raden Fatah adalah santri perguruan Islam di Ampel Denta. Setelah mendapatkan ijazah beliau mendirikan pesantren di Glangan Arum. Di sanalah terbentuk Bayangkara Islam yang akan mendukung pendidikan dan pengajaran Islam.⁸²

Proses pendidikan Islam di Kerajaan Demak beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati.⁸³

Dalam melakukan tugas pendidikan Islam kepada masyarakat, para wali menggunakan masjid sebagai sarana pengembangan pendidikan Islam. Masjid Agung Demak adalah Masjid tertua di pulau Jawa yang menjadi pusat dan lambang kerajaan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid Agung Demak juga digunakan sebagai pusat bertukar pendidikan Islam. Selain di masjid Agung, pendidikan agama juga diadakan di masjid-masjid umum. Masjid-masjid ini dipimpin oleh seorang badal yang ditugaskan oleh kerajaan. Badal kemudian digelari Kyai Ageng yang bertugas menjadi seorang guru. Pendidikan agama yang dilaksanakan di masjid-masjid diperuntukkan bagi masyarakat umum, sementara keluarga kerajaan belajar agama secara

⁸¹ Abuddin Nata, op. cit., hlm. 240-241.

⁸²*Ibid.*, hlm. 226.

⁸³*Ibid.*, hlm. 226.

langsung dari wali-wali yang digelar sunan, baik di istana maupun di rumah para wali.⁸⁴

Adanya kebijaksanaan wali-wali menyiarkan agama dan memasuki anasir-anasir pendidikan dan pengajaran Islam dalam segala cabang kebudayaan nasional Indonesia, sangat menggembirakan, sehingga agama Islam dapat tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.⁸⁵

b. Kerajaan Pajang

Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Perpindahan kekuasaan Kesultanan Demak ke Pajang tidak membawa perubahan berarti terhadap sistem pengajaran dan pendidikan Islam.⁸⁶

c. Kerajaan Mataram

Setelah pusat kerajaan Islam berpindah dari Pajang ke Mataram (1586 M), terutama di saat Sultan Agung (1613 M) berkuasa terjadi beberapa macam perubahan termasuk dalam bidang pendidikan Islam.

Dalam bidang pendidikan Islam, perhatian Sultan Agung cukup besar. Pada zaman itu telah dibagi tingkatan-tingkatan pesantren itu kepada beberapa tingkatan, yaitu:

⁸⁴ Yusran Khaidir al_Lumbuky, "Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Demak," Blog ArsiPllmu Pengetahuan. http://jimmygeneh.blogspot.com/2012/03/pendidikan-islam-padamasa-kerajaan_13.html. 8 April 2021.

⁸⁵ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidayakarya Agung, 1979.

⁸⁶ Abuddin Nata, op. cit., hlm. 268.

- 1) Tingkatan pengajian al-Qur'an, tingkatan ini terdapat pada setiap desa, yang diajarkan meliputi huruf hijaiyah, membaca al-Qur'an, barazanji, rukun Islam, rukun iman.
 - 2) Tingkatan pengajian kitab. Para santri yang belajar pada tingkat ini ialah mereka yang telah khatam al-Qur'an. Tempat belajar biasanya di serambi masjid dan mereka umumnya mondok. Guru yang mengajar di sini diberi gelar Kyai Anom. Kitab yang mula-mula dipelajari adalah kitab-kitab 6 Bis, yaitu sebuah kitab yang berisi 6 kitab dengan 6 Bismillāhirrahmānirrahīm. Kemudian dilanjutkan dengan Matan Taqrib dan Bidāyatul Hidāyah karangan Imam al-Ghazālī.
 - 3) Tingkat Pesantren Besar. Tingkat ini didirikan di daerah kabupaten sebagai lanjutan dari pesantren desa. Kitab-kitab yang diajarkan di sini adalah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Cabang-cabang ilmu yang diajarkan adalah fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya.
 - 4) Pondok pesantren tingkat keahlian (takhassus), ilmu yang dipelajari pada tingkatan ini adalah satu cabang ilmu dengan secara mendalam. Tingkatan ini adalah tingkatan spesialis.⁸⁷
- d. Kerajaan Cirebon dan Banten
- Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini

⁸⁷Haidar Putra Daulay, op. cit., hlm.18-19.

didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1448 M. dan wafat 1568 M. dalam usia 120 tahun. Pada tahun 1525 M, Sunan Gunung jati berhasil menaklukkan Banten.

Proses pendidikan Islam di Cirebon sebagai pusat keagamaan di Jawa Barat juga berlangsung dengan baik. Peranan historis yang dijalankan Sunan Gunung Jati tidak pernah hilang dalam kenangan masyarakat. Pendidikan keagamaan di Cirebon terus berkembang. Pada abad ke-17 dan ke-18 di keraton-keraton Cirebon berkembang kegiatan-kegiatan sastra yang sangat memikat perhatian. Hal ini antara lain terbukti dari kegiatan karang-mengarang suluk, nyanyian keagamaan Islam yang bercorak mistik. Di samping itu, pesantren-pesantren yang pada masa awal Islam berkembang di daerah pesisir Pulau Jawa hanya bertahan di Cirebon, selebihnya mengalami kemunduran atau pindah ke pedalaman.⁸⁸

Adapun di Banten, ketika Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Banten selama 18 tahun (1552-1570 M). Ia telah memberikan andil terbesarnya dalam meletakkan fondasi Islam di nusantara sebagai salah seorang pendiri Kesultanan Banten. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran bangunan peribadatan berupa masjid dan sarana pendidikan Islam, seperti pesantren. Di samping itu, ia juga mengirim muballig ke

⁸⁸Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam I, hlm. 274.

berbagai daerah yang telah dikuasainya. Usaha yang telah dirintis oleh Sultan Maulana Hasanuddin dalam menyebarluaskan Islam dan membangun Kesultanan Banten kemudian dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya.⁸⁹

3. Kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku
a. Kerajaan Banjar

Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha (Banjar) yang beragama Hindu, berkat bantuan Sultan Demak, Sultan Trenggono (1521-1546 M), Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam sehingga berdirilah kerajaan Islam Banjar, dengan raja pertamanya Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suriansah. Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaan, yakni daerah Sambas, Batangla, Sukaciana, dan Sambangan.

Salah satu kerajaan Islam yang memiliki pengaruh terhadap proses pengembangan pendidikan Islam di Kalimantan adalah kerajaan Islam Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Tahmidillah (1778-1808 M) hadirilah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary. Beliau diangkat sebagai Mustasyar kerajaan (Mufti Besar Negara Kalimantan) untuk mendampingi Sultan dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Untuk mendidik dan membina masyarakat Islam, ia mendirikan pondok pesantren untuk menampung para santri yang datang menuntut ilmu dari

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 238.

berbagai pelosok Kalimantan. Dari sini lahirlah ulama-ulama yang akan melanjutkan syiar dan dakwah Islam di Kalimantan.⁹⁰

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary banyak mengarang kitab-kitab agama, di antaranya yang paling terkenal sampai sekarang adalah kitab *Sabilul Muhtadīn*. Di pondok pesantren Darussalam di Kampung Dalam Pagar beliau memberikan pengajian kitab dengan sistem halaqah, menerjemahkan kitab-kitab yang dipakai ke dalam bahasa daerah (Banjar), sedang para santri menyimaknya.⁹¹

Di Banjar, terdapat juga ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjary, yang mengarang sebuah kitab tasawuf "*Addurunnāfis*". Bagaimana tingginya iman dan ketebalan tauhid umat Islam di zaman itu, dapatlah terbaca pada karya Syekh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjary ini, sehingga bagi yang iman tauhidnya belum mencukupi, niscaya kitab ini akan membahayakan kepada iman dan tauhid seseorang.⁹²

Kerajaan Banjar atau Banjarmasin telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam, sehingga peran-peran tersebut berdampak terhadap kemajuan Islam di Kalimantan.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 229.

⁹¹ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 38-39.

⁹² *Ibid.*, hlm. 38-39

b. Kerajaan Gowa-Tallo

Kerajaan pertama di Sulawesi Selatan adalah kerajaan kembar Gowa-Tallo pada tahun 1605 M. Rajanya ikut masuk Islam bernama I Mallingkang Daeng Manyonri bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam. Disusul kemudian oleh I Mangnga'rangngi Daeng Manrabia juga mengucapkan syahadat dan bergelar Sultan Alauddin. Dalam waktu dua tahun, seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Mubalig yang berjasa atas penyebaran Islam di sana adalah Abdul Qadir Kkatib Tunggal bergelar Datok Ribandang yang berasal dari Minangkabau.⁹³

Seperti halnya kerajaan Islam pada umumnya, masjid menjadi pusat pengembangan agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan raja Gowa ke-15 (1637-1653), Sultan Malikussaid (I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung), tiap-tiap negeri memiliki masjid dan di tiap-tiap kampung memiliki langgar. Selain sebagai tempat ibadah, masjid dan langgar juga digunakan sebagai tempat pengajian agama bagi anak-anak muda di tempat itu. Guru yang mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu Islam lainnya disebut anrong-gurunta atau gurunta.⁹⁴

Adapun usaha-usaha dalam bidang pendidikan dan agama, di antaranya:

⁹³ Ramayulis, op. cit., hlm. 243.

⁹⁴ Mattulada, Latoa: *Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995, hlm. 29.

- 1) Memperluas dan menyempurnakan Masjid
- 2) Mendatangkan Ulama dari Madinah (Syekh Madinah)
- 3) Mengeluarkan perintah kepada raja-raja bawahannya, agar masjid yang ada di daerahnya dipelihara dan diperbaiki, yang belum memiliki masjid segera membangun, agar rakyat melaksanakan salat secara berjamaah.⁹⁵

Selain itu, penulisan dan penyalinan buku-buku agama Islam dari bahasa Melayu ke bahasa Makassar giat dilaksanakan. Berbagai lontara yang asalnya dari bahasa Melayu diduga berasal dari zaman permulaan perkembangan Islam di Sulawesi Selatan (abad ke-17 dan 18) yang sampai saat ini masih populer di kalangan orang tua-tua Bugis-Makassar. Lontara yang dimaksud antara lain:

- 1) Lontara perkawinan antara Sayidina Ali dengan Fatimah, putri Rasulullah
- 2) Lontara Nabi Yusuf dan percintaan Laila dan Majnun
- 3) Sura' Bukkuru yang dalam bahasa Bugis dikenal dengan lontara Pau-paunna Sultanul Injilai
- 4) Budi Istihara
- 5) Kitta' Faraid (Kitab Hukum Pewarisan)
- 6) Kitta' Nika (Kitab Hukum Perkawinan)
- 7) Lontara'na Sehe Maradang

⁹⁵Azhar Arsyad, et al., eds., *Ke-DDI-an, Sejarah dan Pandangan atas Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 17.

- 8) Lontara tentang peperangan Nabi Muhammad dengan raja Hindi
- 9) Berbagai mukjizat Nabi Muhammad
- 10) Lontara tentang wewenang kali (kadhi) menurut sara' dan banyak yang lain.⁹⁶

c. Kerajaan Bone

Atas bantuan Petta Mangkau Bone, Andi Mappanyukki, pada tahun 1929 M, didirikan sebuah Madrasah yang diberi nama "Madrasah Amirah" di Watampone. Para pengasuh Madrasah ini, selain para Ulama dari Bone yang pernah mukim lama di Mekkah, juga didatangkan ulama-ulama dari luar seperti Abdul Azis al-Hasyim al-Murabbi dan Abdul Hamid dari Mesir.⁹⁷

d. Kerajaan Ternate dan Tidore

Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate (mengikuti nama ibukotanya) adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di nusantara. Didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17.

Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya kerajaan Ternate masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

⁹⁷ Azhar Arsyad, et al., eds., op. cit., hlm. 18.

pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15.

Adapun Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah Kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya (sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18), kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua barat.

Sama halnya kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, Kerajaan Ternate dan Tidore juga memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Maluku, bahkan pengaruhnya sangat besar karena daerah timur adalah daerah yang merupakan basis penyebaran agama Nasrani di wilayah nusantara.

Adapun di Maluku khususnya Kerajaan Ternate perkembangan Islam berjalan lambat dan mendapat tantangan dari penduduk yang masih terikat pada kepercayaan lama, sehingga penyembahan patung-patung masih terus berlangsung bercampur dengan ajaran Islam dan menyebabkan akal pikiran rakyat mengambang dalam keraguan.

Kedatangan dan perkembangan agama Islam di Ternate dan daerah-daerah taklukannya berkaitan erat dengan sultan. Penyebaran dakwah

melalui jalur “atas” ini melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih bercorak formalitas. Pendidikan agama berlangsung secara tradisional, anak-anak mengaji ke seorang kasisi (pegawai masjid). Oleh sebab itu paham keagamaan tampak sempit dan statis.⁹⁸ Walaupun demikian Kerajaan Ternate telah memberikan pengaruh yang baik terhadap proses pertumbuhan pendidikan Islam di Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

al_Lumbuky, Yusran Khaidir. (Maret 2012). *Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Demak*, Blog Arsip Ilmu Pengetahuan. Diakses pada 8 April 2021, dari http://jimmygeneh.blogspot.com/2012/03/pendidikan-islam-padamasa-kerajaan_13.html.

Al-USairy, Ahmad. 2003. *Sejarah Islam, Sezak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media.

Arsyad, Azhar, et al., eds. 2003. *Ke-DDI-an, Sejarah dan Pandangan atas Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS.

Atria, Rahmi Putri. (Juli 2013). *Pendidikan Sosial Budaya Masyarakat Melayu Riau (Sebuah Warisan Kerajaan Siak Sri Indapura)*, Blog E=MC2. Diakses pada 8 April 2021, dari <http://anjunofarofpki>.

⁹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 5* (Cet. 9, Jakarta: Ichtar Baru VanHoeve, 2001), hlm. 102.

blogspot.com/2013/07/pendidikan-sosial-budaya-masyarakat.html.

Blog SALAAM. (Maret 2013). *Menunggu Asingnya Islam, Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia*, Diakses pada 8 April 2021, dari http://jimmygeneh.blogspot.com/2012/03/pendidikan-islam-pada-masakerajaan_13.html.

Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2001. *Ensiklopedi Islam* 5. Cet. 9. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2003. *Ensiklopedi Islam* 4. Cet. 11. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Edya Busman r, dkk (Ed.). 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss.

Hasymi, A. 1983. *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. Jakarta: Beuna, 1983.

Mattulada, Latoa. 1995. *Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujungpandang Hasanuddin University Press, 1995.

Nata, Abuddin. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. cet. I. Jakarta: Kencana.

- Ramayulis. 2012. *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi dari Era Nabi saw. sampai Ulama Nusantara*. cet. I; Jakarta: Kalam Mulia.
- Saridjo, Marwan. 2010. *Pendidikan Islam Dari Masa ke Masa, Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani.
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tjandrasasmita, Uka (Ed.). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Yatim, Badri. 2007. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Yunus, Mahmud. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidayakarya Agung.
- Zuhairini, et al. 2000. *Sejarah Pendidikan Islam*. cet. VI. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 4

SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA KOLONIAL BELANDA

Assayyidatu Zil Kamala Rofi'ah
NIM. 5320008

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda

Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dengan jalan perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan. Mereka memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah westernisasi dari Kristenisasi yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai

kebijaksanaan penjajahan Barat di Indonesia selama ± 3,5 Abad.⁹⁹

Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 M, yaitu ketika Jan Pieter Zoon Coen menduduki Jakarta, dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayidin Panotogomo.¹⁰⁰ Sejak dari zaman VOC (Belanda Swasta) kedatangan mereka di Indonesia sudah bermotif ekonomi, politik dan agama. Dalam hak octroi VOC terdapat suatu pasal yang berbunyi sebagai berikut : "Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah". Ketika Van den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlakukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu. Dan di tiap daerah Kepresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen.

Gubernur Jenderal Van den Capellen pada tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati tersebut sebagai berikut : "Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi

⁹⁹ Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta; BumiAksara 2011) Hal.146

¹⁰⁰ Ibid Hal. 147

penduduk pribumi agar lebih mudah untuk dapat mentaati undang-undang dan hukum negara".¹⁰¹ Setelah ambrohnya VOC tahun 1816, pemerintah Belanda menggantikan kedudukan VOC Status Hindia Belanda tahun 1801 dengan terang-terangan menyatakan "bahwa tanah jajahan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada perdagangan dan kepada kekayaan negeri Belanda." Pada tahun 1842, Merkus, menteri jajahan memberikan perintah agar Gubernur Jenderal berusaha dengan segenap tenaga pembesar keuntungan bagi negerinya. Walaupun setiap gubernur jenderal pada penobatannya berjanji dengan khidmat bahwa ia akan memajukan kesejahteraan Hindia Belanda dengan segenap usaha, ternyata Hindia Belanda sebagai negeri yang direbut harus terus memberi keuntungan kepada negeri Belanda sebagai tujuan pendudukan itu. Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Berbeda dengan kondisi di negeri Belanda sendiri dimana lembaga pendidikan dikelola secara bebas oleh organisasi-organisasi keagamaan, maka selama abad ke-17 hingga 18 M, bidang pendidikan di Indonesia harus berada dalam pengawasan dan kontrol ketat VOC. Jadi, sekalipun penyelenggaraan pendidikan tetap dilakukan oleh kalangan agama (gereja), tetapi mereka adalah berstatus sebagai pegawai VOC yang memperoleh tanda kepangkatan dan gaji. Dari sini dapat dipahami,

¹⁰¹ Op.cit. Hal.148

bahwa pendidikan yang ada ketika itu bercorak keagamaan (Kristen Protestan). Secara umum sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar
2. Sekolah Latin
3. Seminarium Theologicum (Sekolah Seminari)
4. Academie der Marine (Akademi Pelayanan)
5. Sekolah Cina
6. Pendidikan Islam

Pendidikan untuk komunitas muslim relatif telah mapan melalui lembaga-lembaga yang secara tradisional telah berkembang dan mengakar sejak proses awal masuknya Islam ke Indonesia. VOC tidak ikut campur mengurus atau mengaturnya.

Pada tahun 1882 M pemerintah belanda membentuk badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan islam yang disebut Priesterraden.¹⁰²

Maka pada tahun 1901 M muncullah apa yang disebut dengan politik ETIS yakni politik balas budi bangsa Belanda kepada Indonesia. Pencetus politik ini adalah Van Deventer, yang kemudian politik ini dikenal juga dengan Trilogi Van Deventer. Secara umum isi dari politik ETIS ini ada tiga macam yaitu, Education (pendidikan), Imigrasi (perpindahan penduduk) dan Irigasi (pengairan). Yang akan dikupas adalah mengenai education atau pendidikan.

Pada tahun 1905 M pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan

¹⁰² Ibid Hal.149

pengajaran (baca pengajian) harus minta izin lebih dahulu. Pada tahun 1925 M pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama islam yaitu bahwa tidak semua orang (kiyai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Pada tahun 1932 M keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tak disukai oleh pemerintah yang disebut Ordonansi Sekolah Luar (Wilde School Ordonantie) peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme-islamisme pada tahun 1928 M, berupa semua pemuda. Selain daripada itu untuk lingkungan kehidupan agama kristen di Indonesia yang selalu menghadapi reaksi dari rakyat, dan untuk menjaga dan menghalangi masuknya pelajaran agama disekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama islam, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut netral agama. yakni bahwa pemerintah bersikap tidak memihak kepada salah satu agama sehingga sekolah pemerintah tidak mengajarkan agama. dan pemerintah melindungi tempat peribadatan agama (*Indische Staat Regeling* pasal 173-174). Maka dengan demikian dengan tempo yang tidak lama pendidikan islam akan menjadi lumpuh atau porak poranda. akan tetapi apa yang dapat disaksikan dalam sejarah adalah keadaan yang sebaliknya. masyarakat islam di Indonesia pada zaman itu laksana air hujan atau air bah yang sulit dibendung.

Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan

pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan. (2) Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan. (3) Pendidikan tinggi.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan islam pada zaman kolonial belanda tidak mendapat rintangan, hal ini ditandai dengan bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan yang semuanya berjalan dengan lancar walaupun terlihat abiturie(lulusan)nya tidak bisa diterima oleh mereka dan yakin kalau kesadaran dari pihak islam telah timbul untuk tidak bekerja pada belanda yang telah menjadi perintang kemajuan bangsa. Kenyataan seperti ini sayang masih berlaku sampai sekarang sehingga orang-orang islam kurang berperan dalam pemerintahan. Hal ini tentu penyebabnya adalah melemahnya kekuatan politik islam walaupun islam di indonesia mencapai jumlah yang sangat banyak.

B. Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda pendidikan Islam di sebut juga dengan bumiputera, karena yang memasuki pendidikan islam seluruhnya orang pribumi indonesia. Pendidikan islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam,yaitu:

1. Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam

Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Pada garis besarnya, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan dua

sistem, Yakni: (1) sistem Keraton; dan (2) sistem Pertapa. Sistem pendidikan keraton ini dilaksanakan dengan cara, guru mendatangi murid-muridnya. yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata.

2. Sistem Pendidikan Surau

Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di Asia Tenggara, seperti Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, Patani (Thailand). Namun yang paling banyak dipergunakan di Minangkabau. Secara bahasa kata surau berarti "tempat" atau "tempat penyembahan". Menurut pengertian asalnya, surau adalah bangunan kecil yang dibangun untuk menyembah arwah nenek moyang. Beberapa ahli mengatakan bahwa surau berasal dari India yang merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan Hindu-Budha.

Seiring dengan kedatangan Islam di Minangkabau proses pendidikan Islam dimulai oleh Syekh Burhanudin sebagai pembawa Islam dengan menyampaikan pengajarannya melalui lembaga pendidikan surau. Di surau ini anak laki-laki umumnya tinggal, sehingga memudahkan Syekh menyampaikan pengajarannya. Dalam lembaga pendidikan surau tidak mengenal birokrasi formal, sebagaimana yang dijumpai pada lembaga pendidikan modern. aturan yang ada didalamnya

sangat dipengaruhi oleh hubungan antar individu yang terlibat. Secara kasat mata dapat dilihat di lembaga pendidikan surau tercipta kebebasan, jika murid melanggar suatu aturan yang telah disepakati bersama, murid tidak mendapatkan hukuman tapi sekedar nasehat. Lembaga surau lebih merupakan suatu proses belajar untuk sosialisasi dan interaksi kultural dari hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan saja. jadi, nampak jelas fungsi *learning society* di surau sangat menonjol.

Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuan, proses belajarnya tidak kaku sama muridnya (Urang Siak) diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. dalam proses pembelajaran murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, yang ada hanya kitab kuning merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran.

Metode utama dalam proses pembelajaran di surau dengan memakai metode ceramah, membaca dan menghafal. materi pembelajaran yang diberikan Syeikh kepada urang siak dilaksanakan sambil duduk di lantai dalam bentuk setengah lingkaran. Syeikh membacakan materi pembelajaran, sementara murid menyimaknya dengan mencatat beberapa catatan penting di sisi kitab yang dibahasnya atau dengan menggunakan buku khusus yang telah

disiapkan oleh murid. Sistem seperti ini terkenal dengan istilah halaqah.¹⁰³

3. Sistem Pendidikan Pesantren

a. Asal-usul Pesantren

Secara garis besarnya, dijumpai dua macam pendapat yang mengutamakan tentang pandangannya tentang asal usul pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam.

Pertama pesantren adalah institusi pendidikan Islam, yang memang berasal dari tradisi Islam. Mereka berkesimpulan, bahwa pesantren lahir dari pola kehidupan tasawuf, yang kemudian berkembang di wilayah Islam, seperti Timur Tengah dan Afrika utara yang dikenal dengan sebutan zawiyat.

Kedua, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Budha yang sudah mengalami proses islamisasi. mereka melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata Shastri dari bahasa sanskerta.

Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren sudah menjadi milik umat Islam setelah melalui proses Islamisasi dalam sejarah perkembangannya. KH Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa pesantren adalah pesantren. Disana diajarkan norma-norma yang tidak mungkin dijumpai di tempat-tempat lain. Disana bukan sekedar dipelajari berbagai ilmu, dan bukan pula sekedar melakukan ibadah saja, tetapi

¹⁰³ Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta, Kalam Mulia,2011), Hal 253-256

disana diajarkan nilai-nilai yang paling mutlak harus dimiliki seseorang dalam mengarungi kehidupan.

b. Metode yang digunakan

1) Metode sorogan, atau layanan individual

Sorogan yaitu bentuk belajar mengajar dimana Kyai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kyai, kemudian kiyai membacakan beberapa bagian dari kitab itu, lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai materi baru lagi.

2) Metode wetonan dan bandongan, atau layanan kolektif

Wetonan ialah metode mengajar Dengan sistem ceramah. Kyai membaca kitab di hadapan kelompok santri tingkat lanjutan dalam jumlah besar pada waktu tertentu seperti sesudah shalat berjamaah Subuh atau Isya. di daerah Jawa Barat metode ini lebih dikenal dengan istilah Bendungan. Dalam metode ini Kiyai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari suatu kitab dan para santri menyimak bacaan Kyai sambil membuat catatan penjelasan di pinggir kitabnya. Di daerah Jawa metode ini disebut (halaqoh) yakni

murid mengelilingi guru yang membahas kitab.

3) Metode Musyawarah

Adalah belajar dalam bentuk seminar (diskusi) untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran-pelajaran santri tingkat tinggi. metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan kyainya. Kyai harus menyerahkan dan memberi bimbingan seperlunya.¹⁰⁴

c. Kurikulum Pesantren

Menurut Karel A Steenbrink semenjak akhir abad ke-19 pengamatan terhadap kurikulum pesantren sudah dilakukan misalnya oleh LWC Van Den Berg (1886) seorang pakar pendidikan dari Belanda. berdasarkan wawancaranya dengan para kyai, dia mengkompilasi suatu daftar kitab-kitab kuning yang masa itu dipakai di pesantren-pesantren Jawa dan umumnya Madura. kitab-kitab tersebut sampai sekarang pada umumnya masih dipakai sebagai buku pegangan di pesantren. Daftar tersebut meliputi kitab-kitab fikih, baik fiqih secara umum maupun fiqih ibadah, tata bahasa arab, ushuludin, tasawuf dan tafsir.

Dari hasil penelitian Van De Berg tersebut, karel A. Steenbrink menyimpulkan antara lain kitab-kitab yang dipakai di pesantren masa itu

¹⁰⁴ Ibid Hal 268

hampir semuanya berasal dari zaman pertengahan dunia Islam. pendekatan terhadap al-Quran dan tidak terjadi secara langsung melainkan hanya melalui seleksi yang sudah dilakukan kitab-kitab lain khususnya kitab fikih. Disamping itu, sekalipun yang masuk ke Jawa adalah Islam yang berbau sufi, namun kedudukan tasawuf menempati kedudukan yang lemah sekali dalam daftar buku tersebut. kesimpulan yang lebih utama adalah bahwa studi fiqih dan tata bahasa arab merupakan profil pesantren pada akhir abad ke-19 tersebut.

Pada umumnya pendidikan di pesantren mengutamakan pelajaran fiqih. Namun sekalipun mengutamakan pelajaran fiqih mata pelajaran lainnya tidak diabaikan sama sekali. Dalam hal ini mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu alat, pembinaan iman, dan akhlak sangat diperlukan. pengajaran bahasa arab adalah ilmu bantu untuk pemahaman kitab-kitab agama. Pengajaran bahasa arab tersebut terdiri dari beberapa cabang dan tingkatan sebagai dasar bagi santri untuk melakukan pengajian kitab. dengan begitu, santri harus memiliki pengetahuan bahasa arab terlebih dahulu sebelum pengajian kitab yang sebenarnya dilaksanakan. Pengajian kitab yang dimaksudkan itu adalah pengajian fikih dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Kitab-kitab fikih tersebut ditulis dalam bahasa arab. ¹⁰⁵

¹⁰⁵ Op.cit , Hal 272-273

C. Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Kolonial Belanda

Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkembang pada masa kolonial Belanda adalah:

1. Pesantren

Pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu kata "pondok" mungkin juga berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti hotel atau asrama.¹⁰⁶ Pesantren adalah sebuah pondok pendidikan yang terdiri dari seorang guru pemimpin umumnya seorang Kyai dan kelompok murid yang berjumlah tiga sampai ratusan orang yang disebut santri. Secara tradisional, sampai ketinggian tertentu, para santri tinggal dalam pondok yang menyerupai asrama biara, mereka mengurus diri sendiri mulai dari memasak hingga mencuci pakaian sendiri.

Beberapa pakar melihat pesantren sebagai hasil adopsi dari sistem pendidikan *kuttab* yang berkembang dalam tradisi Islam klasik, mulai dari Dinasti Umayyah hingga selanjutnya di mana model pendidikan *kuttab* yang terdapat dalam tradisi Islam Indonesia kemudian dipopulerkan dengan nama "Pondok Pesantren" yaitu lembaga pendidikan Islam didalamnya terdapat seorang kyai yang mengajar dan mendidik para santri melalui sarana masjid digunakan sebagai tempat penyelenggara

¹⁰⁶ Zamaksyari Dofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 18.

pendidikan tersebut. dilengkapi pula dengan fasilitas pemondokan bagi para santri yang kebanyakan berasal dari luar dari daerah. Ciri utama pesantren adalah:

- a. Adanya kyai sebagai pengajar.
- b. Adanya sebagai pelajar.
- c. Adanya masjid sebagai sarana untuk pelajar.
- d. Adanya tempat pemondokan santri.¹⁰⁷

2. Masjid

Masjid fungsi utamanya adalah sebagai tempat sholat yang lima waktu ditambah dengan sekali seminggu dilaksanakan sholat Jum'at dan dua kali setahun dilaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari pada masjid ada juga tempat ibadah yang disebut langgar, bentuknya lebih kecil dari masjid dan digunakan hanya untuk sholat lima waktu, bukan untuk tempat sholat Jum'at. Selain dari fungsi utama masjid dan langgar juga difungsikan juga untuk tempat pendidikan. Ditempatkan dilakukan pendidikan buat orang dewasa maupun anak-anak. Pengajian-pengajian yang dilakukan untuk orang dewasa adalah penyampaian-penyampaian ajaran-ajaran oleh mubaligh (*al-ustadz*, guru, kyai) kepada para jamaah dalam bidang yang berkenaan dengan akidah, ibadah dan akhlak.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Karel A. Steenbrink, *Kawan dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*. Penj. Suryan A. Jamrah. (Jakarta. Mizan. 1995), hal. 152.

¹⁰⁸ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007), hal. 20-21.

3. Meunasah

Secara etimologi meunasah berasal dari perkataan madrasah, tempat belajar atau sekolah. Bagi masyarakat aceh meunasah tidak hanya semata-mata tempat belajar, bagi mereka meunasah memiliki multifungsi, meunasah di samping tempat belajar, juga berfungsi sebagai tempat ibadah (sholat), tempat pertemuan, musyawarah, pusat informasi, tempat tidur dan tempat menginap bagi musafir.¹⁰⁹

4. Surau

Christine Dobbon memberikan pengertian bahwa surau adalah rumah yang didiami para pemuda setelah akil baligh, terpisah dari rumah keluarganya yang menjadi tempat tinggal wanita dan anak-anak.¹¹⁰ Perkataan surau menyebar luar di Indonesia dan Malaysia, yang dalam kehidupan keseharian adalah suatu bangunan kecil yang penggunaan utamanya untuk shalat berjamaah bagi masyarakat sekitar. Di Sumatera Barat, surau tidak hanya mempunyai fungsi pendidikan dan ibadah, tetapi hanya juga mempunyai fungsi budaya. Surau diperkirakan telah ada sebelum Islam datang ke Sumatera Barat. Hanya berfungsi sebagai aplikasi dari budaya mereka. Surau dalam sistem adat budaya masyarakat kepunyaan kaum, suku. Selanjutnya setelah Islam masuk, maka dilaksanakan

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 23.

¹¹⁰ Cristine dobbin, *Kebangkitan Islam dan Ekonomi Petani yang Sedang Berubah*, Terj. Lilian D. Tedjasudana, (Jakarta: INIS, 1992), hal. 142.

proses Islamisasi dalam segala aspek, termasuk lembaga-lembaga budaya. Hal yang serupa juga diberlakukan terhadap pesantren.¹¹¹

Surau menurut istilah Melayu, arti kata surau sangat luas penggunaannya di Asia tenggara. karena banyak digunakan di daerah Minangkabau, Sumatra Selatan, semenanjung Malaysia, Sumatera Tengah, dan Pattani (Thailand Selatan).¹¹² Surau tersebut merupakan kebudayaan pedesaan yang perkembangannya lebih akhir dan dapat ditemukan di daerah urban. Surau dalam perkembangannya setelah datang Islam, mengalami perubahan yang mendasar tanpa perubahan nama seperti surau Hindu-Budha, yang berada di puncak bukit cepat hilang di bawah pengaruh Islam.

Perkembangan istilah surau setelah masuknya Islam mengacu pada "Masjid kecil"¹¹³ yang biasanya digunakan untuk shalat Jum'at. Perbedaan penggunaan surau dan masjid cukup kabur, contohnya di Malaysia khususnya kegiatan surau adalah pusat ritual keagamaan di pedesaan dan pusat kegiatan keagamaan lainnya termasuk pendidikan keagamaan di Malaysia ada dua istilah surau kecil umumnya tempat pengajian Al- Qur'an dan pendidikan agama dasar, dan surau besar sama fungsinya di Indonesia seperti masjid dan tempat pendidikan agama yang arti sebenarnya.

¹¹¹ Haidar Putra Daulay, *Op. Cit.*, hal. 26.

¹¹² Omar Amir Husin, *Kultur Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 59.

¹¹³ Zamakhsyari Dofier, *Op. Cit.*, hal.18.

Fungsi sama dengan langgar di Jawa sama kedudukannya seperti surau di daerah Minangkabau sama dengan pesantren di daerah Jawa atau pondok di Malaysia. Dengan demikian surau dalam arti sebenarnya adalah pusat pengajaran Islam Tinggi bagi pelajaran tingkat lanjutan.

Surau dalam sejarah Minangkabau¹¹⁴ di mana sejarah pendidikan Islam di Minangkabau mulai tahun 1900 M yang mengalami perubahan semenjak pertempuran paderi. Tetapi pada sebelumnya kita melihat pendidikan Islam sebelum tahun 1900 M. Menurut pendapat setengah para ahli bahwa agama Islam masuk ke Minangkabau kira kira tahun 1250 M. Maka tentulah waktu itu mulai sejarah pendidikan agama Islam. Selain itu menurut para ahli berdirinya sejarah kerajaan Islam berdiri di Minangkabau pada tahun 1500 M atau 1650 M, bahwa sesungguhnya kerajaan Melayu Islamlah yang baru berdiri. Pada kenyataanya Islam telah masuk ke daerah Minangkabau sebelum tahun 1500 M.

Lembaga pendidikan Islam tradisional yang bersifat lokal semacam pondok, pesantren, dayah, dan surau seakan tidak bisa berkuat ketika berhadapan dengan gelombang modernisasi pendidikan Islam. Menurut Hasbullah, munculnya istilah madrasah di Indonesia dimulai sejak adanya gagasan untuk memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam lembaga pendidikan Islam yang

¹¹⁴ Tadjab, *Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hal. 77.

sudah menggunakan sistem klasikal pada waktu itu.¹¹⁵

Madrasah-madrasah yang didirikan oleh ulama kaum muda di wilayah Minangkabau periode 1900-1930 adalah antara lain:

a. Adabiyah School

Sekolah ini didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang.¹¹⁶ Belum cukup satu tahun, sekolah ini gagal berkembang dan tidak diminati oleh masyarakat Padang Panjang. Hal ini disebabkan pola pendidikan yang diajarkan di sekolah ini dinilai terlalu kebaratan dan pro kolonial Hindia Belanda. Bisa jadi, pengaruh ulama kaum tua masih sangat kuat di daerah ini sehingga ide-ide pembaruan Haji Abdullah Ahmad belum mendapat tempat dengan baik. Sekolah ini akhirnya dipindahkan ke Padang, sambutan masyarakat cukup baik untuk perkembangan sekolah ini. Sekolah Adabiyah adalah tipe sekolah umum yang memberikan mata pelajaran agama Islam. Pada tahun 1915, sekolah ini mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda dan berubah menjadi Hollands Inlandsche School (HIS).¹¹⁷ Sekolah ini merupakan HIS pertama yang didirikan oleh organisasi Islam dan memasukkan

¹¹⁵ Hasbullah, *Kapita Selecta Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 66.

¹¹⁶ Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*(Jakarta:LP3ES, 1974).

¹¹⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996)

mata pelajaran agama Islam sebagai rencana pelajarannya.

b. Madrasah School (Sekolah Agama)

Madrasah ini didirikan tahun 1910 oleh M. Thaib Umar di Sungayang, Batusangkar. Pada perkembangannya, madrasah ini tidak mampu bertahan terlalu lama. Madrasah ini terpaksa ditutup pada tahun 1913 dengan alasan kekurangan tempat. Pada tahun 1918, Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai kelanjutan Madrasah School.

c. Madrasah Diniyah

Madrasah ini didirikan pada tanggal 10 oktober 1915 oleh Zainuddin Labay el Yunusi di Padang Panjang. Madrasah ini merupakan madrasah sore untuk pendidikan agama yang diorganisasikan berdasarkan sistem klasikal. Madrasah ini juga memberikan pendidikan umum seperti sejarah dan ilmu bumi.

d. Sumatera Thawalib

Sumatera Thawalib merupakan surau yang diubah menjadi madrasah berjenjang. Sumatera Thawalib berawal dari kelompok baca yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi pada 1913 dengan bantuan pelajar senior surau jembatan besi di Padang Panjang.¹¹⁸ Pada tahun 1916, atas prakarsa seorang pelajar surau jembatan besi, Haji Habib perkumpulan ini menjadi sebuah

¹¹⁸ Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Kaum Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia* (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 304.

himpunan kerjasama pelajar. Sumatera Thawalib secara formal membuka madrasah di Padang Panjang pada tahun 1921 di bawah pimpinan Haji Rasul. Organisasi serupa juga didirikan oleh pelajar Surau Parabek di Bukittinggi. Surau terkemuka ini dibawah kepemimpinan Syaikh Ibrahim Musa, seorang ulama moderat dari kalangan ulama kaum muda Minangkabau. Kedua organisasi ini bertemu pada february 1919 dan membentuk sebuah perserikatan yang dikenal dengan Sumatera Thawalib.¹¹⁹ Selanjutnya didirikan pulau Sumatera Thawalib di daerah Padang Japang, Sungayang, Batusangkar dan Maninjau. Hasilnya Sumatera Thawalib tumbuh menjadi organisasi pendidikan yang terkemuka di Minangkabau.

e. Madrasah Diniyah Putri

Madrasah ini didirikan di Padang Panjang pada tahun 1923 oleh Rangkayo Rahma el-Yunusiah. Madrasah ini merupakan madrasah putri pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelajar putri.

Adapun madrasah yang didirikan oleh ulama kaum tua pada periode 1900-1930 adalah sebagai berikut:

a. Arabiyah School

Madrasah ini didirikan pada tahun 1918 di Ladang Lawas oleh Syaikh Abbas. Awalnya

¹¹⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996).

Syaikh Abbas memiliki surau di daerah Alanglaweh, Bukittinggi.¹²⁰ Madrasah ini adalah madrasah pertama yang didirikan oleh ulama kaum tua. Usaha Syaikh Abbas dalam mengubah suraunya menjadi madrasah pada awalnya mendapatkan perlawanan dari kolega-koleganya sesama ulama kaum tua. Namun perlahan-lahan usaha ini diikuti oleh ulama kaum tua yang lain. Pada tahun 1924 Syaikh Abbas juga membuka madrasah lain di Bukittinggi.

b. Madrasah Tarbiyah Islamiyah

Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) merupakan surau-surau ulama kaum tua yang mengalami modernisasi menjadi madrasah. Pada tahun 1926, Syaikh Sulaiman Arrasuli (1871-1970) mendapat surat dari Syaikh Abbas dari Bukittinggi yang menyarankan agar bersedia mengubah sistem pengajarannya menjadi madrasah sebagaimana yang dilakukan oleh ulama kaum muda.¹²¹ Saran ini menjadi titik awal pembaruan sistem pendidikan Islam di Surau Baru Canduang yang didirikan pada tahun 1327 H/ 1908 M. Sistem halaqah diubah menjadi sistem kelas seperti di madrasah. Selain itu, madrasah ini dilengkapi dengan sarana modern seperti meja, kursi, dan papan tulis. Ulama kaum tua lainnya

¹²⁰ Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi dan Modernisasi* (Ciputat: Logos, 2003), hlm. 129.

¹²¹ Alaidin Koto, *Pemikiran Politik PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah 1945-1970* (Jakarta: Nimas Multima, 1997), hlm. 35.

yang juga memiliki lembaga surau pada akhirnya mengikuti langkah yang diambil oleh Syaikh Sulaiman Arrasuli diikuti oleh, seperti yang dilakukan oleh Syaikh A. Wahid Tabek Gadang , Syaikh Muhammad Jamil Jaho di Padang Panjang, dan Syaikh Arifin di Batu Hampar.¹²² Seluruh madrasah yang didirikan oleh para ulama kaum tua ini kemudian diberi nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah dan tergabung dalam organisasi bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Kemunculan gelombang madrasah ini sebagaimana ditulis oleh Jajat menunjukkan serangan serius terhadap otoritas ulama tradisional.¹²³ Tidak hanya dengan metode dan bahan pengajaran baru yang mulai diperkenalkan di madrasah, tetapi juga dengan menciptakan elite agama baru selain ulama tradisional. Madrasah di kemudian hari sangat berperan dalam membentuk masyarakat muslim baru Minangkabau yang mampu mendialogkan antara Islam, Adat dan Modernitas dengan sangat Baik.

D. Kebijakan Politik Belanda Terhadap Umat Islam Indonesia

Dua Dasawarsa terakhir abad ke-19 dan dua dasawarsa pertama abad ke-20 dikenal sebagai puncak abad imperialisme, yang merupakan masa keemasan

¹²² Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi* (Ciputat: Logos, 2003), hlm. 130.

¹²³ Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia* (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 305.

bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk kekaisaran. Pada masa itu, Inggris, Perancis, dan lain-lainnya merajalela di Afrika dan Asia, mengancam negara-negara merdeka untuk dijadikan propinsi Eropa. Sedangkan Belanda sudah memulai politik ekspansinya jauh sebelum itu. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di Kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam. Timbulnya aneka perlawanan seperti perang Paderi (1821-1827), perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1873-1903) dan lain-lainnya, betapapun tidak terlepas dari kaitan ajaran agama ini. Namun karena kurangnya pengetahuan yang tepat mengenai Islam, mula-mula Belanda tidak berani mencampuri agama ini secara langsung. Sikap Belanda dalam masalah ini “dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan.”

Kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda tentang Islam, tidaklah mungkin lepas dari situasi kondisi pada masa itu. Pemerintah Hindia Belanda dan umat Islam di Indonesia, masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Di satu pihak, pemerintah Hindia Belanda dengan segala daya berusaha memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya, sementara di pihak lain umat Islam Indonesia berdaya upaya pula untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaannya, setiap pemerintah kolonial selalu berusaha memahami hal ihwal penduduk pribumi yang dikuasainya, sehingga kebijakannya mengenai

pribumi (*Inlandsch Politiek*) sangat besar artinya dalam menjamin kelestarian kekuasaan tersebut.¹²⁴

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani masalah Islam, sering disebut dengan istilah *Islam Politiek*, dimana Prof. Snouck Horgronje dipandang sebagai peletak dasarnya. Sebelum itu, kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam hanya berdasarkan rasa takut dan tidak mau ikut campur, karena Belanda belum banyak menguasai masalah Islam.

Di satu pihak, Belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Sementara di pihak lain Belanda sangat optimis bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan. Dalam hal ini Islam sangat ditakuti, karena dianggap mirip dengan Katolik. Hubungan antara umat Islam di kepulauan ini –terutama pada ulamanya- dengan Khalifah Turki, semula dianggap sama dengan hubungan antara umat Katolik dengan Paus di Roma. Tetapi pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda belum berani mencampuri masalah Islam, dan belum mempunyai Kebijakan yang jelas mengenai masalah ini. Di samping karena belum memiliki pengetahuan mengenai Islam dan bahasa Arab, pada waktu itu pemerintah Belanda juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Keenganan mencampuri masalah Islam ini, tercermin dalam

¹²⁴ Aqib Suminto, *Politi Islam Hindia Belanda* (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1985), hal. 1.

undang-undang Hindia Belanda,¹²⁵ sehingga pada tahun 1865 pemerintah Belanda tidak sudi memberi bantuan bagi pembangunan masjid, kecuali kalau ada alasan istimewa. Kepentingan pemerintah kolonial dalam hal ini terbatas pada usaha memelihara agar penduduk tidak terpaksa memberikan uang, baik untuk pembangunan maupun perbaikan masjid.

Tetapi kebijakan untuk tidak mencampuri urusan agama ini nampak tidak konsisten, karena tidak adanya garis yang jelas. Dalam masalah haji misalnya, ternyata pemerintah kolonial tidak bisa menahan diri untuk tidak campur turun tangan; justru para haji sering dicurigai, dianggap fanatik dan tukang memberontak. Pada tahun 1959, Gubernur Jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan. Di sini terlihat bahwa kebijakan tidak mencampuri urusan agama hanyalah bersifat sementara, karena belum dikuasainya masalah Islam sepenuhnya. Kebijakan ini pun masih harus tunduk kepada kepentingan *rust en orde*.

Setelah kedatangan Snouck Hurgronje pada tahun 1889, barulah pemerintah Hindia Belanda mempunyai Kebijakan yang jelas mengenai masalah Islam, di mana ia melawan ketakutan Belanda selama ini terhadap Islam. Ditegaskannya bahwa dalam Islam tidak dikenal lapisan kependetaan semacam dalam Kristen. Kyai tidak apriori fanatik. Penghulu merupakan bawahan

¹²⁵ Ayat 119 RR: "Setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama."

pemerintah pribumi, dan bukan atasannya. Ulama independen bukanlah komplotan jahat, sebab mereka hanya menginginkan ibadah. Pergi haji ke Mekah pun bukan berarti fanatik berjiwa pemberontak.

Sebagai kolonialis, pemerintah Belanda memerlukan inlandsch politiek, yakni Kebijakan mengenai pribumi. Agaknya dengan menampilkan politik Islamnya, Snouck Hurgronje berhasil menemukan seni memahami dan menguasai penduduk yang sebagian besar muslim itu. Dialah “arsitek keberhasilan politik Islam yang paling legendaris,” yang telah melengkapi pengetahuan Belanda tentang Islam, terutama bidang sosial dan politik, di samping berhasil meneliti mentalitas ketimuran dan Islam.

Sekalipun Snouck Hurgronje menegaskan bahwa pada hakekatnya orang Islam di Indonesia itu penuh damai, namun dia pun tidak buta terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Bagi Snouck Hurgronje, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa Islam sering kali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. Walaupun Islam di Indonesia banyak bercampur dengan kepercayaan animisme dan Hindu, namun ia tahu bahwa orang Islam di negeri ini pada waktu itu memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain. Dalam kenyataannya memang Islam di Indonesia berfungsi sebagai titik pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadap pemerintah Kristen dan asing.

Menghadapi medan seperti itu, Snouck Hurgronje membedakan Islam dalam arti “Ibadah” dengan Islam

sebagai “kekuatan sosial politik”. Dalam hal ini dia membagi masalah Islam atas tiga kategori, yakni: 1. Bidang agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan; dan 3. Bidang politik; di mana masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan yang berbeda. Resep inilah yang kemudian dikenal dengan *Islam Politiek*, atau Kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia.

Prinsip politik Islam Snouck Hurgronje di bidang kemasyarakatan adalah menggalakkan pribumi agar menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda. Prinsip ini sebenarnya tidak lepas dari kaitan upaya merebut kemenangan dalam persaingannya dengan Islam, demi kelestarian penjajahannya. Oleh karena itu, mereka menerapkan politik asosiasi dan pemanfaatan adat. Politik asosiasi ini bertujuan untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan Negara penjajahnya melalui kebudayaan, di mana lapangan pendidikan menjadi garapan utama. Dengan adanya asosiasi ini maka Indonesia bisa memanfaatkan kebudayaan Belanda tanpa mengabaikan kebudayaannya sendiri.¹²⁶

Sasaran akhir politik asosiasi adalah memperkuat kedudukan pemerintah kolonial, oleh karena itu kehadiran Islam diperhitungkan sebagai faktor penghalang. Di mata pemerintah kolonial, Islam sering dinilai sebagai “negara dalam negara” (*staat in den staat*) yang harus dihadapi, karena agama ini juga mengatur dimensi horizontal hubungan antar manusia. Snouck Hurgronje sendiri telah memperhitungkan bahwa

¹²⁶ Husnul Aqib Suminto, *Op. Cit.*, hal. 43

Islam Indonesia akan mengalami kekalahan melalui asosiasi pemeluk agama ini dalam kebudayaan Belanda. Snouck Hurgronje selama di Hindia Belanda telah berjuang untuk mewujudkan ide tersebut. Ia menerima beberapa putra dari kaum ningrat dan pegawai sipil yang berkedudukan tinggi untuk tinggal di rumahnya, menjadi murid *The Batavian Grammar School*.¹²⁷

Mengenai pendidikan bangsa Indonesia, Belanda merasa berkewajiban moral untuk mengajar para bangsawan, dan menjadikannya sebagai partner dalam kehidupan budaya dan sosial. Partner semacam ini diharapkan akan menutup jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat. Snouck Hurgronje mendambakan kesatuan antara Indonesia dan Belanda dalam suatu ikatan Belanda Raya.

E. Kebijakan Politik Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Islam

1. Asosiasi Pendidikan

Ada tiga fase dalam perkembangan pendidikan di Hindia Belanda pada abad ke-20. Sampai tahun 1915, pendidikan Barat dianggap sangat penting bagi pribumi; kemudian timbul suatu reaksi yang menghendaki agar pendidikan bagi pribumi tidak melepaskan mereka dari kebudayaan aslinya. Selanjutnya timbul fase pengurangan pendidikan Barat yang menggunakan bahasa Belanda sebagai

¹²⁷ Karel A. Steenbrink, *Kawan dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*. Penj. Suryan A. Jamrah. (Jakarta. Mizan. 1995), hal. 122.

pengantar, sejalan dengan keinginan mengadakan penghematan dalam bidang pendidikan.

Seiring dengan merosotnya ekonomi, maka pada awal tahun tiga puluhan pemerintah Belanda bermaksud meninjau kembali Kebijakan pendidikannya untuk membatasinya, atas dasar pertimbangan sosio-ekonomi. Dalam kongres pendidikan yang diselenggarakan oleh Budi Utomo pada tanggal 31 Desember 1930 di Solo, gagasan pemerintah untuk meninjau kembali pendidikan ini ditolak secara aklamasi. Pada penglihatan mereka, peninjauan ini berlatar belakang faktor ekonomis dan politis. Dikatakan ekonomis karena pendidikan Barat memberikan kemungkinan bagi pribumi untuk menyaingi Eropa; dan dikatakan politis karena umumnya masyarakat Eropa mendukung pendidikan Barat bagi pribumi, bila pendidikan tersebut menolong kepentingan mereka. Ternyata usaha penghematan tersebut tidak dapat ditunda, berhubung situasi ekonomi keuangan pemerintah kolonial waktu itu.

Agaknya yang ditolak pihak pribumi adalah gagasan untuk membatasi pendidikannya, bukan semata-mata sifat Baratnya pendidikan tersebut. Hal ini terlihat pada banyaknya sekolah-sekolah swasta yang mereka dirikan, yang di mata pemerintah kolonial kemudian disebut sebagai "sekolah liar". Besarnya minat mereka untuk menyelenggarakan Barat ini bisa dimaksudkan, sebab aneka jabatan di lingkungan pemerintah kolonial justru menghendaki pendidikan Barat. Di samping itu, pendidikan Barat juga memungkinkan seseorang untuk memperluas

pergaulannya dengan Belanda sebagai kelas penguasa.

Memang mereka tidak menolak sifat Baratnya pendidikan semata, tapi yang mereka inginkan adalah tertanamnya jiwa Indonesia pada pendidikan tersebut. Hal ini terlihat jelas pada aneka usaha pendidikan Muhammadiyah, berupa pendidikan Barat yang disesuaikan dengan kebutuhan Islam dan Indonesia. Organisasi ini bahkan pada tahun 1937 mendirikan MULO pribumi di Yogyakarta, suatu sekolah menengah pertama dengan sistem pendidikan sebagai MULO biasa tapi menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar. Jiwa Indonesia ini pula agaknya yang melatarbelakangi sikap keras Taman Siswa, dalam menolak sistem pendidikan resmi dan menolak subsidi pemerintah kolonial. Organisasi ini tidak menginginkan tujuan pendidikan hanya sekedar menyiapkan calon pegawai pemerintahan kolonial, sementara itu merenggut mereka dari kecintaan terhadap bahasa dan kebudayaannya sendiri.

Pada tahun 1914, atas inisiatif Dr. Hazeu sekolah pribumi kelas satu dikembangkan menjadi HIS tujuh tahun, dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Hal ini kemudian dinilai sebagai kebelanda- belandaan, karena sejak tahun 1848 telah ditetapkan bahwa bahasa daerah harus menjadi bahasa pengantar bagi sekolah pribumi. Sampai- sampai pada tahun tiga puluhan timbul keinginan yang disuarakan oleh Van der Plas, agar sistem pendidikan lebih menekankan kepentingan pribumi. Pada tahun 1934, C.C. Berg juga

menganjurkan agar kebudayaan Indonesia memperoleh perlindungan. Namun betapapun arah pendidikan ini tetap tidak berubah, dan HIS pun tetap menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sampai akhir masa penjajahan Belanda.

Sejalan dengan pola pendidikan Snouck Hurgronje yang memimpikan pengubahan bangsawan tradisional pribumi menjadi elit berpendidikan barat, maka sekolah HIS semula hanya diperuntukkan bagi keluarga bangsawan pribumi. Agaknya pemerintah kolonial sedikit sekali berbuat bagi pendidikan rakyat biasa, sehingga 93 persen dari 60 juta rakyat Indonesia pada akhir tahun 1930 masih dalam keadaan buta huruf. Pada waktu itu hanya sekitar 200 orang Indonesia yang lulus dari sekolah menengah atas per tahun. Pada tahun 1940 hanya 40 persen anak usia enam sampai delapan tahun yang telah memperoleh pendidikan dasar.

Keengganan pemerintah kolonial Belanda dalam memajukan pendidikan rakyat Indonesia ini bisa dimaklumi, karena masih mendambakan kelestarian penjajahannya. Pemerintah kolonial menyadari, bahwa, "pendidikan akan merupakan dinamit bagi sistem pemerintahan kolonial yang berlaku." Kebijakannya dalam bidang pendidikan, tidak terlepas dari pola politik kolonialnya. Alasan penyelenggaraan pendidikan pengajaran, lebih ditekankan pada kepentingan pemerintah kolonial daripada kepentingan rakyat jajahannya sendiri, sebagaimana terlihat jelas dalam Kebijakannya yang menyangkut agama mayoritas pribumi, dalam

ordonansi guru maupun dalam ordonansi sekolah liar.

2. Kebijakan Pendidikan dan Islam

Kelestarian penjajahan, betapapun merupakan impian politik pemerintah kolonial, sejalan dengan pola ini, maka Kebijakan di bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Pendidikan barat diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Pada akhir abad ke-19 Snouck Hurgronje telah begitu optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan Barat. Agama ini dinilai sebagai beku dan penghalang kemajuan, sehingga harus diimbangi dengan meningkatkan taraf kemajuan pribumi.

Agaknya ramalan tersebut belum memperhitungkan faktor kemampuan Islam untuk mempertahankan diri di negeri ini, juga belum memperhitungkan faktor kesanggupan Islam menyerap kekuatan dari luar untuk meningkatkan diri. Memang cukup alasan agaknya untuk merasa optimis. Kondisi obyektif pendidikan Islam pada waktu itu memang sedemikian rupa, sehingga diperkirakan tidak akan mampu menghadapi superioritas Barat, tidak akan sanggup melawan pendidikan Kristen yang jauh lebih maju dalam segala bidang, dan tidak akan bisa berhadapan dengan sikap diskriminatif pemerintah kolonial. Tetapi ternyata kemudian kondisi agama ini berkembang menjadi berbeda dengan perhitungan dan ramalan tersebut.

Kesadaran bahwa kolonial Belanda merupakan “pemerintahan kafir” yang menjajah agama dan bangsa mereka, semakin mendalam tertanam di benak para santri. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda. Sampai uang yang diterima seseorang sebagai gaji dari pemerintah Belanda, nilainya sebagai uang haram. Celana dan dasi pun dianggap haram, karena dinilai sebagai pakaian identitas Belanda. Sikap konfrontasi kaum santri dengan pemerintah kolonial ini, terlihat pula pada letak pesantren di Jawa pada waktu itu, yang umumnya tidak terletak di tengah kota atau desa, tapi di pinggiran atau bahkan di luar keduanya.

Di mata umat Islam, pemerintah kolonial sering dituduh sebagai pemerintah Kristen, sementara pelbagai Kebijakan pemerintah maupun aktivitas zending dan misi sendiri, justru sering mempersubur tuduhan tersebut. Sekolah-sekolah Kristen yang umumnya diberi subsidi oleh pemerintahan kolonial sering mewajibkan pendidikan agama Kristen bagi murid-murid Islam. Sekolah-sekolah negeri juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda suatu aliran gereja.

Semua ini ikut memperdalam jurang pemisah antara pemerintah kolonial dengan masyarakat santri. Aksi menimbulkan reaksi. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, umat Islam berusaha mempertahankan diri, dan kemudian ternyata berhasil.

3. Ordonansi guru

Suatu Kebijakan pemerintah kolonial yang oleh umat Islam dirasakan sangat menekan adalah Ordonansi Guru. Ordonansi pertama yang dikeluarkan pada tahun 1905 mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Sedangkan ordonansi kedua yang dikeluarkan pada tahun 1925, hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur Islam di negeri ini.

Sesudah terjadinya peristiwa Cilegon tahun 188, K.F. Holle pada tahun 1890 menyarankan agar pendidikan agama Islam diawasi, karena pemberontakan para petani di Banten itu dinilai sebagai dimotori oleh para haji dan guru agama. Maka di Jawa terjadilah perburuan terhadap guru agama; dan demi penyeragaman dalam pengawasannya, maka K.F. Holle menyarankan agar bupati melaporkan daftar guru di daerahnya setiap tahun. Kemudian pada tahun 1904 Snouck Hurgronje mengusulkan agar pengawasan tersebut meliputi adanya izin khusus dari bupati, daftar tentang guru dan murid, serta pengawasan oleh bupati harus dilakukan oleh suatu panitia. Pada tahun 1905 lahirlah suatu peraturan tentang pendidikan agama Islam yang disebut dengan Ordonansi Guru, dan dinyatakan berlaku untuk Jawa madura kecuali Yogya dan Solo.

Bagi suatu sekolah yang memiliki organisasi teratur, tuntutan ordonansi ini memang tidak menjadi masalah. Tapi bagi guru-guru agama pada umumnya yang tidak memiliki administrasi yang memadai dalam mengelola pengajiannya, peraturan ini terasa sangat memberatkan. Apalagi pada waktu itu lembaga pendidikan pesantren belum memiliki administrasi yang teratur, daftar murid dan guru, atau mata pelajaran. Banyak diantara guru agama waktu itu yang tidak bisa membaca huruf latin, sedangkan yang bisa pun sangat jarang yang mempunyai mesin tulis untuk mengisi sekian lembar daftar laporan.

Dalam praktek, ordonansi guru ini bisa dipergunakan untuk menekan agama Islam, karena dikaitkan dengan ketertiban keamanan. Misalnya ketika terjadi persaingan ketat antara Islam - Kristen di Tanah Batak pada awal abad ini. Lulofs selaku penasehat urusan luar Jawa menetapkan adanya suatu garis perbatasan antara Islam dan Kristen. Orang Islam tidak dibenarkan tinggal di daerah Kristen lebih dari 24 jam. Tetapi gagasan ini ditentang oleh Hazeu, selaku *Adviseur voor Inlandsche zaken*, yang sangat keras melawan gagasan yang nilainya sebagai penyalahgunaan Ordonansi guru untuk mengusir orang Islam. Ditegaskannya, Ordonansi Guru itu dibuat untuk mengawasi pendidikan Islam, bukan untuk menghambat atau menekannya.

Ordonansi Guru tahun 1905 yang mewajibkan guru-guru agama Islam untuk minta izin itu, kemudian dinilai kurang efisien, karena laporan

tentang guru agama dan aktivitasnya yang secara periodik disampaikan bupati ternyata kurang meyakinkan, di samping situasi politik waktu itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan “perburuan” guru agama. Karena itu pada tahun 1925 dikeluarkanlah Ordonansi Guru baru sebagai pengganti yang hanya mewajibkan guru agama untuk memberitahu, bukan meminta izin. Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk Jawa - madura. Sejak 1 Januari 1927 berlaku pula untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lombok. Kemudian pada tahun tiga puluhan berlaku pula untuk Bengkulu.

Tetapi seperti halnya Ordonansi Guru sebelumnya, ordonansi baru ini pun dalam praktek bisa dipergunakan untuk menghambat agama Islam, meskipun bukan itu tujuan yang tercantum dalam ketentuan ordonansi tersebut. Misalnya peristiwa yang terjadi di Sekayu pada tahun 1926. H. Fachruddin selaku Ketua Muhammadiyah menyatakan keluhan bahwa sejak diumumkannya ordonansi ini pelbagai rintangan ditimbulkan untuk menghalangi kemajuan dan penyebaran Islam di Indonesia. Karena itu ia mengimbau gobee, selaku Adviseur voor Inlandsche zaken, agar turun tangan.

Memang banyak reaksi yang dilancarkan oleh pihak pribumi terhadap ordonansi ini. Kongres Al-Islam tahun 1926 (1-5 Desember) di Bogor menolak cara pengawasan terhadap pendidikan agama ini. Kewajiban memberitahukan kurikulum, guru dan murid secara periodik ini nilainya memberatkan, karena lembaga pendidikan Islam pada umumnya

tidak memiliki administrasi dan sarana yang memadai. Begitu pula keharusan mengisi formulir berbahasa Belanda, dirasakan sebagai beban sangat berat, sebab hampir semua guru agama tidak mengerti bahasa ini; paling-paling mereka mengerti bahasa Arab. Organisasi Muhammadiyah dalam kongres XVII tahun 1928 (12-20 Februari) dengan sangat keras menuntut agar Ordonansi Guru ini ditarik kembali. Tetapi reaksi yang demikian hebat terjadi di Sumatera Barat, ketika pemerintah kolonial bermaksud hendak menerapkan Ordonansi Guru ini di daerah tersebut, segera setelah timbulnya pemberontakan komunis pada tahun 1927. Apalagi di beberapa tempat ternyata untuk mengajarkan agama, seseorang harus memperoleh izin resmi, bukan hanya cukup memberitahu. Tidaklah mengherankan kalau di kalangan masyarakat setempat banyak timbul pendapat bahwa andaikata Ordonansi Guru diterapkan, berarti orang Minang akan kehilangan kebebasan dalam melaksanakan aktivitas agamanya.

Dalam menjajaki kemungkinan dilaksanakannya Ordonansi Guru di Sumatera Barat, misi petugas Kantoort voor Inlandsche zaken, Dr. L. De Vries, memperoleh dukungan para demang dan para asisten demang, sebagian besar kepala nagari dan sebagian besar ulama tradisional. Ternyata tidak semua kaum muslimin Minangkabau bersedia menerima ordonansi tersebut. Untuk membicarakan masalah ini, pada tanggal 18 Agustus 1928 diselenggarakanlah rapat besar di Bukittinggi yang dihadiri 800 orang ulama dan guru agama, ditambah

200 orang utusan dari 115 organisasi Islam di Minangkabau. Menurut laporan resmi pemerintah Belanda, dalam pertemuan tersebut tampil 23 pembicara, yakni 17 orang dari Kaum Muda dan 5 orang dari Kaum Kuno, serta seorang dari golongan netral. Agaknya pidato H. Rasul itu berhasil menguasai sidang sehingga semuanya sepakat untuk mengirim utusan ke Gubernur Jenderal, guna menolak dilaksanakannya Ordonansi guru di Sumatera Barat. Gubernur Jenderal memberikan jawaban, bahwa pemerintah Belanda “belum berniat berketetapan hendak menjalankan Ordonansi Guru itu di Minangkabau.”

Reaksi terhadap Ordonansi Guru agaknya bukan hanya dilancarkan oleh pihak pribumi, tapi juga oleh pihak Belanda sendiri. Sebagaimana diuraikan di atas, tujuan ordonansi ini adalah untuk mengawasi atau mengontrol pendidikan agama Islam; dan untuk itu adanya daftar guru dan segala aktivitasnya sangat diperlukan. Dalam hal ini Van Der Plas pada tahun 1934 berpendapat, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut daftar guru yang dipaksakan itu sama sekali tidak ada gunanya. Dia pun melihat akibat sampingan ordonansi ini dan memandangnya sebagai “rintangan paling besar bagi karya produktif di Hindia Belanda.” Dia berpendapat bahwa demi penyederhanaan dan efisiensi, hendaknya pemerintah kolonial menghapuskan ordonansi guru yang nilainya hanya akan menghabiskan kertas ini.

Menanggapi berbagai keinginan dihapuskannya ordonansi guru ini, Snouck

Hurgronje dalam suratnya kepada Menteri Jajahan tahun 1935 masih berpendapat perlunya dipertahankannya ordonansi tersebut, meskipun dengan beberapa usul perubahan. Namun betapapun situasi kondisi telah jauh berubah. Di pihak pemerintahan kolonial sendiri, situasi ekonomi moneter menuntut diadakannya penghematan dan penyederhanaan. Di pihak pribumi, kekhawatiran akan timbulnya pemberontakan seperti terjadi di Cilegon tahun 1888, sudah tidak perlu ada. Bahaya gerakan tarekat maupun Pan Islam juga tidak perlu dikhawatirkan lagi, sehingga guru agama Islam tidak lagi harus diburu. Itulah sebabnya mengapa nasehat arsitek ordonansi guru 1905 ini, tidak seampuh masa-masa yang lalu. ordonansi guru 1905 kehilangan urgensinya dan betapapun terpaksa menghilang dari peredaran.

4. Ordonansi Sekolah Liar

Sejak tahun 1880 pemerintah kolonial secara resmi memberikan izin untuk mendidik pribumi. Kebebasan mendidik pribumi ini kemudian dihapuskan oleh adanya ordonansi pengawasan tahun 1923. Sejak itu setiap orang yang hendak mendirikan suatu lembaga pendidikan, harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada kepala daerah setempat, dengan menyebutkan cara pengajaran dan tempat mengajarnya.

Agaknya perlu dicatat beberapa faktor yang ikut mewarnai situasi menjelang lahirnya ordonansi pengawasan ini. Pemerintah kolonial pada saat itu terpaksa mengadakan penghematan, berhubung

merosotnya ekonomi dunia, dan terpaksa pula memperendah aktivitasnya termasuk dalam bidang pendidikan. Kebijakan ini membawa akibat sangat majunya pendidikan Kristen di Indonesia. Sementara itu, keinginan orang-orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan Barat juga semakin berkembang. Ketidakmampuan pemerintah kolonial dalam mengatasi arus yang justru sejalan dengan apa yang digalakkannya selama ini, mengakibatkan bermunculannya sekolah swasta pribumi, yang kemudian dikenal sebagai "sekolah liar". Tetapi karena pengelola dan kurikulum sekolah ini dinilai tidak memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah, maka ijazah sekolah tersebut tidak diakui di kantor-kantor resmi. Sekolah liar ini selalu didirikan oleh orang-orang Indonesia dan dimasuki oleh anak-anak Indonesia.

Sementara itu menghebatnya propaganda komunis di tengah memburuknya situasi politik pada awal tahun dua puluhan itu, dinilai pemerintah kolonial sebagai sudah cukup membahayakan stabilitas kekuasaannya. Kesadaran politik orang-orang Indonesia di pelbagai partai terus tumbuh, sementara di pihak lain - sejak diangkatnya Fock sebagai Gubernur Jenderal - tindakan pemerintah kolonial semakin keras. Persaingan antara Islam dan komunis dalam tubuh Sarekat Islam (SI) pun bertambah ketat, sampai kemudian orang-orang komunis terpaksa harus dikeluarkan dari SI. Gerakan komunis ini semakin menghebat sejak kembalinya Semaun dari Moskow pada pertengahan 1922, meskipun terpaksa harus berdiri di luar SI.

Corak politik pergerakan Indonesia pada tahun 1922 pada umumnya menjadi semakin radikal. Konsentrasi Radikal di Volksraad merupakan manifestasi perkembangan ini. Pada awal tahun 1923, banyak organisasi pribumi yang cenderung mengambil sikap non-kooperasi dan menolak keras imperialisme. Dikeluarkannya Ordonansi Pengawasan tersebut sebenarnya tidak terlepas dari keinginan untuk mengontrol dan mengendalikan perkembangan ini.

Pengawasan melalui Ordonansi 1923 ini hanya bersifat wajib lapor bagi penyelenggara suatu lembaga pendidikan, sementara kalangan luas pejabat kolonial menghendaki pengawasan lebih ketat. Pada tanggal 17 Oktober 1929, Schrieke selaku direktur Pendidikan diperintahkan oleh Sekretaris Negara atas saran Dewan Penasehat Hindia, untuk meninjau kemungkinan tindakan sekolah liar. Tetapi Schrieke, yang pada dasarnya menyetujui pendapat pendahulunya Hardeman bahwa pemerintah belum perlu mengambil tindakan terhadap sekolah liar agaknya berhasil menunda masalah ini sampai tahun 1932; yakni keluarnya Toezicht-ordonantie particulier Onderwijs tanggal 17 September 1932 yang dinyatakan berlaku mulai 1 Oktober 1932.

Krisis ekonomi tahun tiga puluhan memaksa pemerintah kolonial untuk menekan anggaran belanja pendidikan. Sementara itu tuntutan pendidikan sudah semakin meningkat, sehingga bermunculanlah sekolah-sekolah swasta, meskipun tanpa subsidi pemerintah. Tetapi, dan ini suatu ironi, justru pemerintah kolonial menyambut inisiatif

masyarakat ini dengan Ordonansi Sekolah Liar. Akibatnya timbullah reaksi hebat dari kalangan luas masyarakat, baik dari organisasi nasional maupun Islam. Direktur Pendidikan sendiri agaknya bisa memaklumi hal tersebut, namun hal ini justru menyebabkan dirinya sedikit tersisih dari lingkungannya.

Taman siswa yang seluruh sekolahnya terkena ketentuan ordonansi ini bertekad untuk mengadakan perlawanan pasif. Tekad tersebut dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam kawatnya ke Gubernur Jenderal, juga dalam pembicaraan lisan dengan Kiewiet de Jonge selaku kuasa pemerintah ketika berkunjung ke rumahnya. Sarekat Islam (SI) yang sejak tahun 1932 telah menjelma menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), juga mengumumkan suatu manifesto menentang ordonansi ini.

Pada tahun tahun 1932 sering terjadi konferensi atau rapat umum yang berakhir dengan keputusan menolak Ordonansi Sekolah Liar. Konferensi dewan pendidikan Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) di Sumatera Barat tanggal 26-27 Desember 1932 memutuskan bahwa ordonansi ini melanggar dasar-dasar Islam dan dasar-dasar umum, di samping mengurangi kebebasan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun pendidikannya sendiri. Para ulama besar Minangkabau, yang beranggapan ordonansi ini merupakan percobaan untuk membunuh sekolah-sekolah Islam, menuduh pemerintah kolonial bertindak menguntungkan Kristen. Mereka memutuskan akan berjuang hidup

atau mati untuk Islam, dan membentuk suatu panitia aksi yang diketuai oleh H. Rasul. Suatu partai yang dianggap loyal yaitu Budi Utomo, juga menentang keras ordonansi ini. Partai ini bertekad akan menarik anggota-anggotanya dari aneka lembaga perwakilan, andaikata pada tanggal 31 Maret 1933 Ordonansi Sekolah Liar belum ditarik kembali; bahkan akan menutup-menutup sekolahnya serta akan memberikan bantuan keuangan kepada para korban perlawanan pasif. Sedangkan Muhammadiyah, pada mulanya menunjukkan sikap ragu terhadap ordonansi ini, mungkin karena sebagian sekolahnya memperoleh subsidi dari pemerintah, meskipun hanya sebagian kecil. Namun dalam konferensi daruratnya di Yogyakarta pada tanggal 18-19 November 1932, akhirnya organisasi ini pun menolak Ordonansi Sekolah Liar.

Dari sini terlihat bahwa usaha pemerintah kolonial untuk menekan pendidikan swasta, ternyata memperoleh perlawanan keras dari pihak pribumi, baik dari organisasi nasional maupun organisasi Islam. Organisasi PSII dan Permi serta Muhammadiyah bahu membahu dengan Taman Siswa, Budi Utomo, PNI, Partindo, dan Isteri Sedar, untuk menentang keras Ordonansi Sekolah Liar. Reaksi ini memaksa pemerintah kolonial untuk meninjau ordonansi yang berumur setengah tahun itu. Pada pertengahan Februari 1933 ordonansi ini dinyatakan ditarik kembali, dan pada pertengahan Oktober 1933 penarikan ini dipertegas dengan keluarnya peraturan baru. Sejak itulah pelbagai sekolah yang selama ini dinilai sebagai liar, disebut

sebagai “sekolah swasta tak bersubsidi”. Dalam perkembangan selanjutnya jumlah sekolah ini semakin banyak dan mutunya pun semakin meningkat.¹²⁸

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi & Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Anwar, Kasful; Kompri. 2017. *Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (Dahulu, Kini dan Masa Depan)*. Jambi: Pusaka.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi dan Modernisasi*. Ciputat: Logos.
- Burhanuddin, Jajat. 2012. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Kaum Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dobbin, Cristine. 1992. *Kebangkitan Islam dan Ekonomi Petani yang Sedang Berubah*, Terj. Lilian D. Tedjasudana. Jakarta: INIS.

¹²⁸ Kasful Anwar dan Kompri , *Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (Dahulu, Kini dan Masa Depan)*, (Jambi: Pusaka,2017) Hlm. 25-37

- Dofier, Zamakhsyari. 1983. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Hasbullah. 1999. *Kapita Selecta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husin, Omar Amir. 1981. *Kultur Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Koto, Alaididin. 1997. *Pemikiran Politik PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah 1945-1970*. Jakarta: Nimas Multima.
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Ramayulis. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Steenbrink, Karel A. 1995. *Kawan dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*. Penj. Suryan A. Jamrah. Jakarta. Mizan.
- _____ 1986. *Pesantren, Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Suminto, Aqib. 1985. *Politi Islam Hindia Belanda*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Tadjab. 1994. *Perbandingan Pendidikan*. Surabaya: Karya Abditama.

Zuhairini, dkk. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta:
BumiAksara.

BAB 5 PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA KOLONIAL JEPANG

Nur Ismiati
NIM. 5320009

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. Pengertian Madrasah

Kata madrasah berasal dari bahasa Arab sebagai keterangan tempat (*dzaraf*), dari kata “*Darasta, Yadrusu, Darsan, dan Madrasatun*” yang berarti “tempat belajar para pelajar atau diartikan jalan (*Thariq*)”.¹²⁹ Meskipun dalam kenyataannya “madrasah” berarti “sekolah”, di Indonesia istilah tersebut secara khusus mengacu kepada “sekolah (agama) Islam”. Di Nusantara sistem madrasah mulai berkembang pada awal abad ke-20 pada mulanya memfokuskan diri nyaris secara eksklusif pada studi bahasa Arab dan studi Islam lainnya. Seperti Alquran, Hadis, fiqh, sejarah Islam dan mata pelajaran Islam lainnya. Lama sebelumnya, madrasah secara perlahan mengadopsi matematika, geografi dan ilmu-ilmu umum lainnya yang dimasukkan kedalam ilmu-ilmu umum lainnya.¹³⁰

¹²⁹ Muslihat, *Kepala Madrasah pada PKKM (Penilaian Kinerja Kepala Madrasah)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 7

¹³⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 72

Madrasah dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang sangat menonjol dalam sejarah Islam. Madrasah merupakan kelanjutan dari pendidikan masjid dan pendidikan di lembaga Khan, yaitu masjid yang dilengkapi dengan asrama. Penggunaan nama madrasah untuk lembaga pendidikan Islam pada awal-awal Islam mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian madrasah pada masa sekarang. Pengertian madrasah pada masa klasik Islam disebut sebagai pendidikan akademi (college). Pemberian nama lembaga pendidikan Islam untuk berbagai jenjang dengan nama madrasah ini dapat dipahami mengingat pemberian nama lebih cenderung pada fungsi esensialnya sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan sekaligus menyebarkan paham keagamaan.¹³¹

B. Pertumbuhan Madrasah Masa Penjajahan Jepang

Pergantian kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintahan pendudukan Jepang turut mempengaruhi wajah pendidikan nusantara. Pemerintahan Jepang yang menjajah lebih pendek, sekitar 3.5 tahun, meninggalkan jejak pendidikan yang berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda yang berkuasa di Nusantara sekitar 350 tahun. Jepang yang menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942 hingga Agustus 1945, banyak menimbulkan reaksi yang

¹³¹ A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LPNI, 1998), hlm. 129

bersifat konflik fisik, ekonomi, politik maupun dalam bidang pendidikan.¹³²

Untuk memperoleh dukungan dari umat islam, pemerintah jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan dana bagi madrasah. Berbeda dengan pemerintah belanda, pemerintah jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena kenyataan pemerintahan jepang sendiri tidak dapat menjangkau madrasah dan pesantren yang sebagian besar berlokasi di desa-desa terpencil. Namun demikian, pemerintah jepang tetap mewaspadaai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi penduduk jepang di indonesia.¹³³ Selain itu untuk mengamankan kepentingannya, pemerintah Jepang lebih banyak mengangkat kalangan priyayi dalam jabatan-jabatan di Kantor Urusan Agama, untuk lebih memudahkan pihak Jepang bekerja sama.¹³⁴

Di awal kedatangannya, kelihatan memang bahwa Jepang seakan-akan mendukung sistem pendidikan, hal ini terlihat bahwa :¹³⁵

¹³² Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.36.

¹³³ Maksum, *Madrasah: sejarah dan perkembangannya*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Ilmu, 1999), hlm. 119

¹³⁴ Miftahur Rohman, *Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang*, *jurnal pendidikan agama islam*, Vol. 02 Nomor 01 Tahun 2018, hlm. 20

¹³⁵ Asmah Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 62-63.

1. Pondok pesantren yang besar-besar sebagai institusi pendidikan Islam sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar Jepang.
2. Sekolah negeri dalam berbagai tingkatannya diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
3. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH.Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta.

Di masa pendudukan Jepang banyak terjadi perubahan dalam sistem pendidikan. Karena dihapusnya sistem penggolongan, baik menurut bangsa maupun menurut status sosial. Beberapa perubahan mendasar tersebut dapat adalah sebagai berikut:¹³⁶

- a. Jenjang Sekolah Dasar atau Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko), terbuka bagi semua golongan penduduk tanpa diskriminasi status sosial. Lama pendidikannya diseragamkan menjadi enam tahun. Sekolah ini ada di semua desa dan kota atau tempat yang dulunya terdapat Sekolah Dasar, Sekolah Kelas Satu, Kelas Dua atau HIS dan ELS.
- b. Jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (Shoto Chu Gakko) atau sekarang setingkat SMP, terbuka bagi semua golongan penduduk yang memiliki Ijazah SR. Sedangkan Sekolah Kejuruan yang ada adalah Sekolah Pertukangan (Kogyo Gakko), Sekolah

¹³⁶ Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 122-123

Pertanian (Nogyo Gakko) dan Sekolah Pelayaran. Lama pendidikannya 3 tahun.

- c. Jenjang sekolah lanjutan umum tingkat atas (Koto Chu Gakko). Lama pendidikannya 3 tahun.
- d. Jenjang Sekolah Tinggi. Pada tingkat ini hampir seluruh sekolah tinggi ditutup. Kecuali yang masih ada ialah Sekolah Kedokteran Tinggi (Ika Dai Gakko) di Jakarta, Sekolah Obat (Yaku Gakko) di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi (Sika Gakko) di Surabaya, Sekolah Teknik Tinggi (Kagyo Dai Dakko) yang dibuka tahun 1944 di Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor, Akademi pemerintahan (Kenkoku Gakko In) yang dibuka pada awal tahun 1945 di Jakarta sebagai ganti MOSVIA pada masa Belanda.

Namun di sisi lain, pemerintah Jepang menyediakan kursus sekolah dan latihan bagi calon-calon guru. Adapun sekolah yang dimaksud bagi calon tenaga pengajar yaitu:¹³⁷

- a. Sekolah Guru (SG) lama belajar 2 tahun yang dinamakan Sjootoo Sihan Gakkoo.
- b. Sekolah Guru Menengah (SGM) lamanya 4 tahun yang dinamakan Cutoo Sihan Gakkoo.
- c. Sekolah Guru Tinggi (SGT) lamanya 6 tahun yang dinamakan kootoo Sihan Gakkoo.

Walaupun disatu sisi kebijakan pendidikan oleh pemerintah Jepang ini ada aspek positifnya karena penyeragaman sekolah, namun disisi lain

¹³⁷ Aisyah Abbas, Pendidikan di Indonesia Pada Masa Jepang, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2018, hlm. 67

ternyata ada aspek kekurangannya, terutama dilihat dari jumlah sekolah yang jauh lebih sedikit dari era penjajahan Belanda. Sekolah Dasar menurun jumlahnya dari 21.500 menjadi 13.500, Sekolah Lanjutan dari 850 menjadi 20, begitu pula jumlah murid sekolah dasar menurun sebanyak 30% dan murid sekolah menengah merosot 90%. Jumlah guru sekolah dasar menurun 35% dan guru sekolah menengah merosot 95%.¹³⁸

Penyebabnya antara lain adalah beratnya tugas sebagai guru. Materi pendidikan di era pendudukan Jepang juga mengalami perubahan. Materi pendidikan pada masa ini adalah untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Murid-murid sering kali ditugaskan untuk melakukan kerja bakti, membersihkan bengkel, asrama, mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat pertahanan. Selain itu, indoktrinasi mental dan ideologi mengenai hakko Ichiu dalam rangka mencapai kemakmuran di Asia Raya bersama Jepang, memperbanyak latihan militer, pengenalan budaya Jepang, olahraga serta lagu-lagu Jepang.¹³⁹

Kemudian lebih lanjut, untuk Kurikulum pendidikan pada masa pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia terjadi beberapa perubahan yang penting, yaitu:

a. Terhapusnya Kurikulum Dualisme Pengajaran.

¹³⁸Setiyadi, *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 139

¹³⁹ Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Islam ...*, hlm. 125

Berbagai jenis lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah kolonial Belanda dihapuskan di masa Jepang. Oleh karena itu, riwayat susunan pengajaran yang dualistik telah berakhir. Dualisme yang dimaksudkan adalah pengajaran barat dan pengajaran bumi putera. Hanya satu jenjang sekolah yang diadakan untuk seluruh lapisan masyarakat ialah sekolah rakyat (SR) yang saat itu lebih populer dengan sebutan kokimin gakkoo Adapun Sekolah Desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi Sekolah Pertama.¹⁴⁰ Berkenaan dengan itulah, maka jenjang pendidikan pendidikan dan pengajaran di masa Jepang berdasarkan tingkatannya adalah, Sekolah Rakyat enam tahun (termasuk Sekolah Pertama), Sekolah Menengah tiga tahun, dan Sekolah Menengah Tinggi tiga tahun (SMU pada zaman Jepang).

b. Kurikulum Pengajaran Bahasa Indonesia.

Kurikulum pendidikan di setiap jenjang pendidikan, adalah dimasukkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar materi, yang sebelumnya mengalami penekanan. Pada masa Jepang atau era Nippon ini, cukup penggunaan bahasa Indonesia menjadi signifikan. Dalam pada itu, maka pelajaran Bahasa Indonesia tetap menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, dan menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah.

¹⁴⁰ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada, 2001), hlm. 22.

Hanya saja kemudian, ada kompensasi lain yaitu bahasa Jepang ditetapkan sebagai mata pelajaran dan adat istiadat Jepang yang harus dipelajari, dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Berkenaan dengan itulah, diketahui bahwa Jepang lebih toleran dalam persoalan kurikulum.¹⁴¹ Hal ini pula yang kemudian menjadi kurikulum pendidikan di masa Jepang lebih plural ketimbang di masa penjajahan Belanda. Dengan kata lain bahwa sikap penjajahan Jepang ternyata lebih lunak, sehingga gerakan pendidikan lebih bebas berkembang dibanding masa penjajahan Belanda.

c. Bantuan Dana untuk Pembenahan Kurikulum.

Pendidikan Untuk memperoleh dukungan dari umat Islam pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah, sehingga sekolah maupun madrasah dengan bebas menyelenggarakan pendidikan sesuai target kurikulum seperti buku-buku pelajaran, Dana yang diberikan, diperuntukkan untuk pengadaan buku-buku dan literatur sebagai sarana utama dalam pembenahan kurikulum pendidikan.¹⁴² Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Jepang membiarkan kembali dibukanya madrasah-madrasah yang pernah

¹⁴¹ Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 89.

¹⁴²K. Enung, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 51-52.

ditutup pada masa sebelumnya, dan ini dilakukan bersinergi dengan pemberian dana pendidikan yang diberikan. Namun dalam kenyataannya, pengawasan pemerintah Jepang sendiri tidak dapat menjangkau madrasah dan pesantren yang sebagian berlokasi di desa-desa terpencil sehingga bantuan yang diberikan terbatas pada sekolah-sekolah atau madrasah tertentu.

Dengan dibukanya kembali sekolah dan madrasah-madrasah seperti yang disebutkan di atas, maka lembaga pendidikan pada itu, memiliki kesempatan untuk memasukan unsur-unsur islam dalam kurikulumnya. Sekolah dan madrasah dapat melakukan tugasnya secara efektif, sehingga diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat. Itulah sebabnya, pembaruan kurikulum di lembaga pendidikan termasuk di pondok pesantren pada masa Jepang mulai dilakukan sejak tahun 1940-an Hal ini dapat ditandai dengan diajarkannya beberapa mata pelajaran umum mulai tahun itu, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan geografi. Kemudian pada tahun 1942 mula mula diajarkan bahasa Jepang.¹⁴³

Selanjutnya metode pendidikan, yakni metode pengajaran pada lembaga pendidikan yang diberlakukan pada zaman Jepang, terdiri atas dua, yakni metode klasikal dan metode pengajian. Metode klasikal, diselenggarakan di sekolah-sekolah melalui kegiatan program

¹⁴³Aisyah Abbas, *Pendidikan di ...*, hlm. 68

kurikuler dan kegiatan program ekstrakurikuler, yang berfokus pada pengembangan kemampuan belajar lebih lanjut bagi peserta didik. Sedangkan metode pengajian diselenggarakan di pondok-pondok pesantren yang menerapkan metode bandungan dan Sorogan.¹⁴⁴ dimana seorang ulama mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan sedang santrinya tinggal dalam pondok atau asrama. Pondok pesantren di masa Jepang, tetap mempertahankan bentuk manajemen pendidikannya yang asli (tradisional).

Metode klasikal dalam pendidikan di masa Jepang dilaksanakan pada pagi hari di sekolah sesuai jam dan waktu yang ditentukan dan mengarah pada program yang menekankan pencapaian tujuan secara sistematis dan terjadwal. Sedangkan metode pengajian kitab dilaksanakan oleh kyai atau badal kiai secara jama'i dalam kelompok besar santri tanpa hirarki, yang arah penyajiannya lebih menekankan pada pencapaian membaca dan memahami teks kitab yang menjadi sumber tambahan dari sistem klasikal.¹⁴⁵ Selanjutnya tentang metode pengajaran yang digunakan dalam pendidikan pada masa Jepang, umumnya mengikuti pola metodologi pengajaran pendidikan seperti metode kisah, metode teladan,

¹⁴⁴Aisyah Abbas, *Pendidikan di ...*, hlm. 69

¹⁴⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Muadalah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam-Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren, 2009), hlm. 22-23

metode nasehat, metode pembiasaan, dan lainnya. Menyoal metode kegiatan belajar mengajar berdasarkan strategi yang digunakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, murid-murid atau peserta didik seringkali diharuskan melakukan kinrohooshi (kerja bakti), seperti membersihkan bengkel-bengkel, asrama, kantor-kantor, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kebutuhan militer Jepang di medan perang. Peserta didik diharuskan membuat rabuk kompos atau secara bersama-sama membasmi hama tikus di sawah. Sebagian waktu belajar juga dihabiskan untuk bercocok tanaman jarak dan tanaman-tanaman lain baik di lingkungan sekolah maupun di pinggir-pinggir jalan, sebagai cara untuk menghasilkan bahan penting yang dibutuhkan bagi kelangsungan peperangan.¹⁴⁶ Dalam pada itu, ditemukan pula adanya latihan-latihan jasmani yang bersifat militerisme juga dilakukan agar berjalan lancar maka dibentuklah barisan-barisan tiap sekolah, Seinentai yaitu barisan murid Sekolah Rakyat dan Gakuto-tai yaitu barisan murid-murid Sekolah lanjutan.¹⁴⁷

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Aisyah. 2018. Pendidikan di Indonesia Pada Masa Jepang. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Volume 4 Nomor 1.

¹⁴⁶K. Enung, dkk, *Sejarah Pendidikan ...*, hlm. 54.

¹⁴⁷K. Enung, dkk, *Sejarah Pendidikan ...*, hlm. 56.

- Assegaf, Abdurrahman. 2007. *Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Milenium Baru*. PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI. 2009. *Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Muadalah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam-Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren.
- Enung, K, dkk. 2006. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Hasan, Asmah Fahmi. 1999. *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbullah. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada.
- Maksum. 1999. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Ilmu.
- Malik, A. Fajar. 1998. *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*. Jakarta: LPNI.
- Muslihat. 2020. *Kepala Madrasah pada PKKM (Penilaian Kinerja Kepala Madrasah)*. Yogyakarta: Deepublish.

Putra, Haidar Daulayi. 2009. *Sejarah Pertumbuhan dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Rohman, Miftahur. 2018. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal pendidikan agama islam*. Vol. 02 Nomor 01.

Setiyadi. 1979. *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suwendi. 2004. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

BAB 6 SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA KEMERDEKAAN

Anik Maghfiroh
NIM. 5320010

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. Madrasah Pada Masa Awal Kemerdekaan

Perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan-sangat terkait dengan peran Departemen Agama, yang mulai resmi berdiri pada 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama meliputi:

1. Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir.
2. Memberi pengetahuan umum di madrasah dan
3. Mengadakan pendidikan guru agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).¹⁴⁸

¹⁴⁸ Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangan* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. ke-1 hlm.131

Institusi ini pada dasarnya merupakan representasi aspirasi umat Islam dalam kebijakan negara. Sehingga tidak mengherankan, institusi ini menjadi kunci utama peningkatan usaha pencerahan terhadap masa depan madrasah di Indonesia. Setidaknya terdapat dua usaha pokok yang muncul dalam perkembangan madrasah di Orde Lama, yaitu *pertama* berdiri dan berkembangnya Pendidikan Guru Agama dan Pendidikan Hakim, *kedua* terciptanya variasi kurikulum antar berbagai organisasi sosial keagamaan. yang pertama dapat dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan oleh kedua madrasah (PGA dan PHIN), bahwa kedua madrasah ini amat menandai perkembangan yang sangat strategis, di mana madara di samping bertujuan melahirkan tenaga-tenaga profesional keagamaan, juga mempersiapkan tenaga yang siap pakai untuk mengembangkan madrasah. Tingginya intensitas terhadap kedua tujuan di atas, dapat dicermati dari pertumbuhan madrasah dalam dekade 50-an, yakni jumlah PGA yang mencapai 25 buah pada tahun 1951 dan meningkat menjadi 30 pada tahun 1954.

Pada dekade 60-an, madrasah sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan jumlah madrasah tingkat ibtidaiyah berjumlah 13057 buah. Dengan jumlah ini, sedikitnya 1.927.777 siswa telah terserap untuk mengenyam pendidikan agama. Adapun madrasah pada tingkat tsanawiyah dan tingkat aliyah masing-masing telah mencapai 776 buah dan 16 buah, dengan jumlah siswa masing-masing sebanyak 87.932 orang dan 1881 orang. Dari laporan ini, jumlah keseluruhan madrasah telah mencapai 13.849 buah

dengan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 2.017.590. orang.¹⁴⁹

Dari perkembangan ini dapatlah dikatakan bahwa sudah sejak awal, pendidikan madrasah memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pencerdasan dan pembinaan akhlak bangsa. Kedua, mengenai beragamnya kurikulum. Kurikulum merupakan entitas inheren dalam sebuah institusi madrasah. Dalam perkembangannya, bahwa mengingat kondisi perpolitikan bangsa yang tengah mengalami kerja besar mengkonsolidasikan kekuatannya membangun bangsa, mengakibatkan pengaturan sistem pendidikan madrasah lebih dititikberatkan kepada penyerahan otoritas sepenuhnya kepada Departemen agama. Akibatnya, dalam upaya pengembangan madrasah pada umumnya, versi kurikulum antar berbagai organisasi sosial keagamaan tidak dapat terelakkan. Walaupun belakangan, muncul ide untuk menyeragamkan kurikulum di semua level pendidikan madrasah.

Selanjutnya, dalam perkembangan madrasah muncul tarik menarik yang kuat antara kelompok Islam dan non-muslim tentang sejauh mana lingkup pendidikan Islam. Bagi kalangan Islam, lebih cenderung mengatakan bahwa pendidikan Islam harus dikembangkan di Indonesia sejauh mungkin. Sementara kalangan non-muslim berpendapat bahwa pendidikan Islam harus dibatasi hanya dalam lingkup yang pengajaran agama an sich. Akhirnya, dari polemik ini lahir sebuah rekomendasi yang

¹⁴⁹Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangan ...* hlm.132.

dikeluarkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKINP) yang mengatakan:

"Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata dan sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa bantuan materil dari pemerintah".¹⁵⁰

Rekomendasi di atas kemudian dipertegas lagi oleh Menteri P dan K yang saat itu dijabat oleh R. Suwandi (2 Oktober 1946-27 Juni 1947) yang mengeluarkan kebijaksanaan yang menyatakan bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain.¹⁵¹

Dalam rangka memperkuat eksistensi madrasah sebagai komponen pendidikan nasional, artinya diakui sebagai penyelenggara belajar, maka keluarlah Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950. Pada pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Untuk itu pemerintah menggariskan kebijaksanaan bahwa madrasah yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar harus terdaftar pada kementerian agama, dengan syarat madrasah

¹⁵⁰Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Binbaga, 1986), cet. ke-1 hlm. 77.

¹⁵¹ Abdurrahman Saleh, *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1984), cet. ke-1 hlm. 19.

yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu, secara teratur di samping mata pelajaran umum.¹⁵²

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan madrasah sesuai dengan sasaran BPKNIP agar madrasah mendapat bantuan materil dan bimbingan dari pemerintah, maka kementerian agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. I Tahun 1952. Menurut ketentuan ini, yang dinamakan madrasah adalah “tempat pendidikan yang telah diatur sebagai sekolah dan memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, jenjang pendidikan pada madrasah tersusun sebagai berikut:

1. Madrasah rendah atau dikenal dengan madrasah Ibtidaiyah, yaitu madrasah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya, lama pendidikannya adalah 6 tahun.
2. Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama atau dikenal dengan nama Madrasah Tsanawiyah yaitu madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah rendah atau sederajat serta memberikan pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok, lama pendidikannya adalah 3 tahun.
3. Madrasah Lanjutan Atas atau dikenal sebagai Madrasah Aliyah yaitu madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah lanjutan pertama

¹⁵²Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam ...* hlm. 77.

atau sederajat, memberi pendidikan ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok, lama belajarnya adalah 3 tahun.

Pada tahun 1954, madrasah-madrasah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan telah terdaftar di kementerian agama berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik berupa dana, fasilitas maupun tenaga skill. Pada tahun 1958, Departemen Agama, dalam rangka melaksanakan program pengembangan madrasah sebagai pelaksanaan kewajiban belajar, memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB). Madrasah Wajib Belajar dimaksudkan sebagai awal untuk memberikan bantuan dan pembinaan madrasah dalam rangka penyeragaman materi kurikulum dan sistem penyelenggaraannya dengan madrasah Ibtidaiyah yang diselenggarakan oleh masyarakat.¹⁵³

B. Perkembangan dan Dinamika Madrasah Setelah Indonesia Merdeka

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah muncul dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Dan Terus mengalami perkembangan mulai masa kesultanan, penjajahan, sampai masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah merubah pendidikan dari bentuk awalnya, seperti pengajian di rumah-rumah, langgar, mushalla, dan mesjid, menjadi lembaga formal sekolah seperti bentuk madrasah yang dikenal saat ini.¹⁵⁴

¹⁵³Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam ...* hlm. 77.

¹⁵⁴Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*(Ttt: Lista Fariska Putra, 2004),cet ke-1, hlm. 31.

Banyak tantangan serta rintangan-rintangan yang dialami umat Islam dalam mempertahankan eksistensi madrasah di Indonesia, baik di masa penjajahan Belanda ataupun penjajahan Jepang, namun dengan kegigihan para tokoh-tokoh Islam, semua rintangan serta hambatan-hambatan tersebut dapat dilalui. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan Islam Indonesia, khususnya dalam perkembangan madrasah.

Menurut Haidar dalam bukunya *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*, dari segi dinamika dan perkembangannya, madrasah mengalami tiga fase perkembangan. Fase pertama, sekitar tahun 1945-1975. Dimana madrasah menekankan materi pendidikannya kepada penyajian ilmu agama dan sedikit pengetahuan umum. Disebabkan Hal Itulah, maka pengakuan ruang lingkup madrasah hanya berada di sekitar Kementerian Agama. Fase kedua adalah fase diberlakukannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975 (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri dalam Negeri). Fase ini berlangsung dari tahun 1975-1989. Intidari SKB itu adalah upaya untuk meningkatkan mutu madrasah. Fase ketiga adalah setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.2 Tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 2003) dan diiringi dengan sejumlah peraturan pemerintah.¹⁵⁵

¹⁵⁵Haidar Putra Daulay, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia* (Medan : Perdana Publishing, 2012), cet. ke-1 hlm.25-26.

Adapun yang akan dibahas dalam makalah ini adalah fase pertama yaitu sekitar tahun 1945-1975. Pada awal kemerdekaan Indonesia BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam sidangnya tanggal 29 Desember 1945 memuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan, yang intinya agar selekas mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru. Dalam rekomendasi itu juga disinggung tentang keberadaan madrasah dan pesantren, yakni: "... Madrasah dan pesantren- pesantren yang pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.¹⁵⁶

Perhatian Serta bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut antara lain adalah adanya perbaikan-perbaikan kualitas madrasah, seperti memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah. Atas dasar rekomendasi di atas, maka pemerintah atas usul BP KNIP membentuk Kementerian Agama melalui Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD/1946, tanggal 3 Januari 1946 untuk mengurus permasalahan agama termasuk pendidikan agama. Sejak Terbentuknya Kementerian Ini, segera dilakukan upaya- upaya lebih serius untuk

¹⁵⁶ AryH. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm.32-33

memantapkan keberadaan pendidikan Islam, termasuk madrasah.¹⁵⁷

Hal Ini Merupakan salah satu contoh perhatian pemerintah yang ditujukan terhadap pendidikan Islam, dan merupakan langkah-langkah awal dari perkembangan madrasah. Departemen Agama yang sekarang menjadi Kementerian Agama dulunya merupakan *Shumubu* yang didirikan pada masa pemerintahan kolonial Jepang. Lembaga inilah yang secara aktif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa bagian pendidikan di lingkungan Kementerian Agama bertugas untuk :

1. Memberi pengajaran agama disekolah negeri danpartikulir.
2. Memberi pengetahuan umum di madrasah.
3. Dan mengadakan pendidikan guru agama (PGA).¹⁵⁸

Memberikan pendidikan agama disekolah-sekolah umum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan serta menjadikan pesertadidik yang berbudi pekerti serta memiliki akhlak yang mulia sebagaimana tertera dalam tujuan pendidikan, sehingga lulusan dari sekolah-sekolah negeri tersebut tidak hanya mengerti pelajaran umum, tapi juga paham masalah agama. Begitu juga dengan lulusan madrasah, dengan adanya pendidikan umum dalam kurikulum madrasah, para peserta didik diharapkan akan mampu bersaing

¹⁵⁷Mohammad Kosim, "Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan)," dalam *Tadris*, Vol.2, No. 1,2007,h.7

¹⁵⁸Maksum, *Sejarah Madrasah dan Perkembangannya ...* hlm.123.

dengan lulusan-lulusan sekolah- sekolah umum lainnya.

Berdirinya Kementerian Agama merupakan awal dari perkembangan madrasah di Indonesia, karena dengan berdirinya Kementerian Agama tersebut, secara politis madrasah kini memperoleh perhatian secara terus-menerus di kalangan pengambil kebijakan. Disamping melanjutkan usaha-usaha yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan Mahmud Yunus, Kementerian Agama terfokus pada pengembangan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah.¹⁵⁹

Dalam rangka upaya peningkatan madrasah, pemerintah melalui Kementerian Agama juga memberikan bantuan-bantuan kepada madrasah dalam bentuk material dan bimbingan. Untuk itu, Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 dan disempurnakan dengan peraturan Menteri Agama No.7 tahun 1952. Menurut ketentuan tersebut, jenjang pendidikan pada madrasah terdiri dari :

1. Madrasah rendah, sekarang disebut dengan madrasah Ibtidaiyah.
2. Madrasah lanjutan tingkat pertama, sekarang disebut dengan madrasah Tsanawiyah.
3. Madrasah lanjutan atas, sekarang disebut dengan namanya madrasah Aliyah.

Upaya pemerintah selanjutnya untuk meningkatkan status madrasah adalah dengan jalan

¹⁵⁹Maksum, *Sejarah Madrasah dan Perkembangannya ...* hlm.123

menegerikan madrasah-madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat, baik berbentuk pribadi maupun organisasi. Tercatat sejumlah ratusan madrasah negeri, yang meliputi tingkat Ibtidaiyah dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), setingkat tsanawiyah dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTs AIN), dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MA AIN).¹⁶⁰

Penerangan madrasah-madrasah swasta menjadi madrasah negeri memberikan banyak manfaat bagi rakyat Indonesia khususnya di kalangan para orangtua peserta didik, karena dengan status negeri tersebut, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendidikan semakin terjangkau.

Dalam sejarah perkembangan madrasah di Indonesia tercatat pula bahwa pemerintah pernah mendirikan Madrasah Wajib Belajar atau MWB. Madrasah ini lama belajarnya 8 tahun, materi pelajarannya terdiri dari materi pelajaran agama, umum dan keterampilan dalam lapangan ekonomi, industri, dan transmigrasi, namun kenyataan konsepsi Madrasah Wajib Belajar atau MWB tidak berjalan sebagaimana yang diprogramkan. Ada juga madrasah yang menekan dirinya dengan madrasah wajib belajar, tetapi kegiatannya tidak sesuai dengan kurikulum MWB. ¹⁶¹ Pendidikan agama, meliputi keimanan/akhlak, Quran, fikih/ibadah, diberikan sejak

¹⁶⁰ Haidar Putra Daulay, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia...* hlm.25-26.

¹⁶¹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.105

dari kelas I s/d kelas VIII, tafsiran hadis, diberikan di kelas VII dan VIII, sejarah Islam mulai dari kelas V-VIII.¹⁶²

Perkembangan berikutnya, pemerintah mendirikan madrasah-madrasah yang mempunyai jenjang yang sama dengan sekolah-sekolah umum. Dan pada bulan Agustus 1970, Musyawarah kurikulum yang diadakan di Cibogo, Bogor, berhasil menyusun kurikulum dan silabus Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTs AIN), dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MA AIN). Kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 52 tahun 1971. Kurikulum ini dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut yang kemudian dikenal sebagai kurikulum 1973.¹⁶³

Adapun salah satu contoh Rekapitulasi kurikulum tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rekapitulasi kurikulum MIN

No	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran / Kelas							Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
	Kelompok Dasar								
1	Al-qur'an Hadits/ Terjemah	2	2	2	2	2	2	2	14
2	Tauhid	-	-	-	2	2	2	1	7
3	Praktek Ibadah	1	1	1	1	1	1	1	7

¹⁶²Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan ...* hlm. 76

¹⁶³*Ibid.*, hlm. 76

4	Akhlak	2	2	2	2	2	2	2	14
5	Kewarganegaraan	3	3	3	3	3	3	3	21
6	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	5	5	40
7	Pendidikan Jasmani	2	2	2	2	2	2	2	14
Jumlah		16	16	16	18	18	17	15	118
II	Kelompok Pokok								
1	Fiqh	1	1	2	2	2	2	2	12
2	Bahasa Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bahasa Arab	-	-	5	5	5	5	4	24
4	Berhitung	6	6	6	6	6	6	5	41
5	IPA	1	1	3	3	3	3	2	16
6	Kesenian	2	2	2	2	2	2	2	14
7	Sejarah Islam	-	-	1	1	1	1	1	5
8	Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	1	1	1	1	7
Jumlah		11	11	20	20	20	20	17	119
III	Kelompok Khusus								
1	Kejuruan Agraria	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kejuruan Teknik	1	1	2	2	2	3	8	10
3	Kejuruan Ketata Laksana	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		28	28	38	40	40	40	40	254

Meskipun pada awalnya, terdapat berbagai macam madrasah di Indonesia dan tidak memiliki keseragaman antara madrasah yang satu dengan madrasah lainnya seperti mengenai jenjang pendidikan, kurikulum, metode, materi pelajaran atau yang lainnya, namun dengan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Departemen Agama diatas ketidak seragaman tersebut dapat diatasi.

Sampai pertengahan Dekade 60-an, madarasah tersebar diberbagai daerah hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat rendah pada masa itu (Ibtidaiyah) sudah mencapai 13.057. Dengan jumlah itu, sedikitnya 1.927.777 anak usia sekolah telah terserap mengenyam pendidikan agama. Laporan yang sama juga menyebutkan jumlah madrasah tingkat pertama (Tsanawiyah) mencapai 776 buah, dengan murid mencapai 87.932, sedangkan jumlah Madrasah tingkat atas (Aliyah) diperkirakan mencapai 16 madrasah dengan jumlah murid 1.881. Dengan Demikian,berdasarkan laporan tersebut, jumlah Madrasah Secara keseluruhan mencapai 13.849 dengan jumlah murid sebanyak 2.017.590. Menurut Maksum perkembangan ini menunjukkan, sudah sejak awal pendidikan madrasah memberikan sumbangan yang signifikan bagi proses pencerdasan dan pembinaan akhlak bangsa. Dengan Banyaknya Jumlah lembaga pendidikan Islam “madrasah” yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tentunya akan semakin mudah untuk menyebarkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam ke berbagai daerah, oleh sebab itu,

wajarlah penduduk Indonesia merupakan mayoritas muslim.¹⁶⁴

DAFTAR PUSTAKA

Daulay Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Daulay Haidar Putra, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2012.

Dawam Ainurrafiq dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, ttt :Lista Fariska Putra,2004.

Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Binbaga, 1986.

GunawanAryH.,*Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta:Bina Aksara, 1986.

Kosim Mohammad, *Madrasah di Indonesia, Pertumbuhan dan Perkembangan, dalam Tadris. Vol. 2, No. 1,2007.*

Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

¹⁶⁴Maksum,*SejarahMadrasah ...*hlm. 126

Saleh, Abdurrahman, *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1984.

BAB 7

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MADRASAH ORDE LAMA

Roshida Khaulaa Aeny
NIM. 5320012

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. PADA MASA ORDE LAMA

1. KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN SECARA UMUM

Kemerdekaan Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh putra bangsa, Soekarno - Hatta memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan nasional Indonesia. Kesempatan itu dipergunakan oleh para tokoh nasional untuk membangun bangsa Indonesia di segala bidang. Kesungguhan untuk mengisi kemerdekaan itu terlihat ketika dibentuknya kementerian-kementerian yang sekarang dinamakan Departemen oleh pemerintah. Diantaranya ada Departemen Agama yang dulu disebut Kementerian Agama, yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana

yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP).¹⁶⁵

Dengan ikut serta mengembangkan dan memberikan pendidikan agama untuk seluruh bangsa Indonesia. Diantaranya ada juga Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Dengan segera menteri PP dan K pertama Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, mengeluarkan instruksi umum yang memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru untuk :

- a. Mengibarkan Sang Merah Putih setiap hari di halaman sekolah
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Menurunkan bendera Jepang dan menghentikan nyanyian lagu kebangsaan Jepang (Kemigayo)
- d. Menghapus bahasa dan upacara yang berasal dari Jepang
- e. Memberikan semangat kebangsaan kepada murid.¹⁶⁶

Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, perjalanan sejarah Pendidikan Islam di

¹⁶⁵ Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hal 70

¹⁶⁶ Samsul Nizar. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 346

Indonesia semenjak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan masa Orde Lama (Orla), akan berbeda dengan tahun 1965 sampai sekarang yang lebih dikenal dengan Orde Baru sampai sekarang.¹⁶⁷

Dalam jangka waktu beberapa tahun di awal berdirinya kementerian agama, telah dikeluarkan berbagai peraturan yang menentukan tugas serta ruang lingkup kementerian agama. Meskipun ruang lingkungnya tetap sama, rumusannya sudah beberapa kali berubah. Tujuan dan fungsi Departemen Agama yang dirumuskan pada tahun 1967 adalah sebagai berikut :

- a. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah, serta membimbing perguruan-perguruan agama.
- b. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan.
- c. Memberi penerangan dan penyuluhan agama.
- d. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama.
- e. Mengurus dan memperkembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi.
- f. Mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, ...*, hal 347.

¹⁶⁸ Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 308

Sebagaimana telah disebutkan diatas, salah satu tugas penting yang dilakukan Departemen Agama adalah menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi pendidikan agama. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang tersebar di berbagai pelosok. Dengan berkembangnya pemikiran pembaharuan dalam Islam di awal abad ke-20, persoalan administrasi dan organisasi pendidikan mulai mendapat perhatian dari beberapa kalangan atau organisasi. Pada umumnya, madrasah dibagi menjadi dua jenjang, yaitu tingkat dasar yang dinamakan dengan madrasah Ibtidaiyah selama 5-7 tahun dan tingkat lanjutan yang dinamakan madrasah tsanawiyah selama 3-5 tahun.

Haji Mahmud Yunus, yang di zaman Belanda memimpin sekolah Normal Islam di Padang, menyusun rencana pembangunan pendidikan Islam. Ketika itu beliau menduduki sebagai seksi Islam dari Kantor Agama Provinsi. Dalam rencananya antara lain; Ibtidaiyah selama 6 tahun, Tsanawiyah Pertama 4 tahun, dan Tsanawiyah Atas 4 tahun. Mahmud Yunus menyarankan agar pelajaran agama diberikan di sekolah-sekolah "umum" yang disetujui oleh konferensi pendidikan di Padang. Akan tetapi semua yang dilakukannya mengalami kemandegan karena terjadi aksi militer Belanda kedua. Setelah selesai barulah dimulai kembali usaha untuk

mengkoordinasi sekolah-sekolah agama di seluruh Indonesia.

Banyak lembaga pendidikan agama yang didirikan , seperti Madrasah Ibtidaiyah (6 tahun), Tsanawiyah (4 tahun), Aliyah (3 tahun), Sekolah Guru Agama Islam (5 tahun bagi lulusan Sekolah Dasar baik umum maupun agama, 2 tahun bagi lulusan SMP atau Tsanawiyah), Sekolah Guru, dan Hakim Agama Islam/ SGHA (4 tahun bagi lulusan SMP atau Tsanawiyah). Dua sekolah yang terakhir mengalami perubahan pada tahun 1953. PGA menjadi 6 tahun, sedangkan SGHA dihapuskan tahun 1954 dan digantikan dengan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama 4 tahun.¹⁶⁹

Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan, terutama dalam landasan idealnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Dengan segala kesungguhannya pemerintah orde lama memberikan perhatian pada pendidikan Nasional bangsa. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 210-311.

¹⁷⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*. ... hal 310.

Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:

- a. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.
- b. Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pasal di atas mengandung maksud:

- a. Mengambil langkah-langkah pertama sebagai usaha persiapan untuk mewujudkan kewajiban belajar, bila keadaan telah mengizinkan.
- b. Mengharuskan untuk mendasarkan segala usaha-usaha di lapangan pendidikan dan pengajaran pada dasar Nasional.¹⁷¹

Usaha selanjutnya mengadakan kongres pendidikan di Solo 1947. Pada tahun 1948 dibentuk panitia pembentukan rencana undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran. Panitia ini juga diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Tahun 1949 diadakan kongres pendidikan kedua di Yogyakarta akhirnya, pada tahun 1950 lahirlah undang-undang tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang disingkat menjadi UUPP. Undang-undang ini seluruhnya terdiri dari 17 Bab dan 30 pasal. Di Dalam UUPP tersebut dicantumkan tujuan dan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang

¹⁷¹ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa, hal 30.

dicantumkan pada bab II pasal 3, yang berbunyi :“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Dasar pendidikan dan pengajaran tercantum pada bab III pasal 4 berbunyi: “Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan bangsa Indonesia”.¹⁷²

2. KEADAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE LAMA

Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dan ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber tersebut.¹⁷³ Ada 2 hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa orde lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.

¹⁷² Haidar Putra Daulay,. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hal 83

¹⁷³ Abuddin Nata,. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. hal 32

a. Perkembangan dan Pembinaan Madrasah

Perkembangan madrasah tak lepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga yang secara politis telah mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dari kalangan pengambil kebijakan. Walau tak lepas dari usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh agama seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy`ari dan Mahmud Yunus. Dengan perkembangan politik dan zaman, Departemen Agama secara bertahap terus menerus mengembangkan program-program peningkatan dan perluasan ases serta peningkatan mutu madrasah.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum. Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Jenjang pendidikan pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari tiga jenjang.

- 1) Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun
- 2) Madrasah Tsanawiyah Pertama pendidikan 4 tahun

3) Madrasah Tsanawiyah Atas pendidikan 4 Tahun.

Sedangkan kurikulum madrasah terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti itu bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga harus mengajarkan pendidikan umum, kebijakan seperti itu untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

Sejarah perkembangan PGA dan PHIN bermula dari program Departemen Agama yang secara teknis ditangani oleh Bagian Pendidikan. Pada tahun 1950, bagian itu membuka dua lembaga pendidikan dan madrasah profesional keguruan:

- 1) Sekolah Guru Agama Islam (SGAI), SGAI terdiri dari dua jenjang:
 - (a) jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan
 - (b) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah.
- 2) Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI), SGHAI ditempuh selama 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. SGHAI memiliki empat bagian:
 - (a) Bagian "a" untuk mencetak guru kesusastaan
 - (b) Bagian "b" untuk mencetak guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti
 - (c) Bagian "c" untuk mencetak guru agama
 - (d) Bagian "d" untuk mencetak guru pendidikan agama.

b. Perkembangan Perguruan Tinggi Islam

Perguruan Tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi

pemerintahan (Kementerian Agama) dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN.

c. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20, (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta). Sebelumnya ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari Tahun 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa:

- 1) Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dapat dimulai dari kelas 1 dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
- 2) Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
- 3) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.
- 4) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

d. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Pondok Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, keberadaan pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Pada masa kolonialisme dari Pondok Pesantren lahir tokoh-tokoh nasional yang tangguh yang menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zaenal Mustopa dll. Maka dapat dikatakan bahwa masa itu Pondok Pesantren memberikan kontribusi yang besar bagi terbentuknya republik ini. Bila dianalisis lebih jauh kenapa dari lembaga pendidikan yang sangat sederhana ini muncul tokoh-tokoh nasional yang mampu menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, jawabannya karena figur Kyai sebagai Pimpinan pondok pesantren sangat dihormati dan disegani, baik oleh komunitas pesantren (santri) maupun masyarakat sekitar pondok, mereka meyakini bahwa apa yang diucapkan kyai adalah wahyu Tuhan yang mengandung nilai-nilai kebenaran hakiki (Ilahiyyah).

Pada masa pasca kemerdekaan, Pondok Pesantren perkembangannya mengalami pasang surut dalam mengemban misinya sebagai pencetak generasi kaum muslimin yang mumpuni dalam bidang Agama (tafaqquh fiddien). Pada masa periode transisi antara tahun 1950 - 1965 Pondok Pesantren mengalami fase stagnasi, dimana Kyai yang disimbolkan sebagai figur yang

ditokohkan oleh seluruh elemen masyarakat Islam, terjebak pada percaturan politik praktis, yang ditandai dengan bermunculannya partai politik bernuansa Islami peserta PEMILU pertama tahun 1955, contohnya dengan lahirnya Partai Politik NU yang mewakili warga Nahdliyin, Partai Politik NU tersebut dapat dikatakan merepresentasikan dunia Pondok Pesantren. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus dari parpol tersebut adalah Kyai yang mempunyai Pondok Pesantren.

Pembinaan pendidikan agama setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah secara formal institusional memberikan kepercayaan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Dalam undang-undang No. 12 tahun 1950 itu juga terdapat pasal yang mengupas tentang pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Pasal ini terdapat pada Bab XII pasal 20 yang berbunyi :

- 1) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran Agama. Orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
- 2) Cara menyelenggarakan pelajaran yang ditetapkan oleh menteri pendidikan,

pengajaran dan kebudayaan bersama-sama dengan menteri agama.¹⁷⁴

Kemudian beberapa tahun berikutnya ditandatangani kembali peraturan bersama menteri PP 2k dan menteri agama nomor : 1432/kat. Tanggal 20 Januari 1951 (menteri pendidikan), Nomor : K/I/652 tanggal 20 Januari 1951 (agama), diatur peraturan pendidikan agama di sekolah-sekolah, yaitu :

Pasal I : “Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama”.

Pasal II:

- 1) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas IV banyaknya 2 jam dalam satu minggu.
- 2) Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan sekolah-sekolah rendah dilain lingkungan.

Pasal III : “Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkatan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam dalam tiap minggu”.

¹⁷⁴ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hal 77

Pasal IV:

- 1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing
- 2) Pendidikan agama baru diberikan pada satu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut satu macam agama.
- 3) Murid dalam satu kelas yang menganut agama lain dari agama yang sedang diajarkan pada satu waktu boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran berlangsung.¹⁷⁵

Dalam bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan untuk itu dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin K.H Imam Zarkasi dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Pada bulan desember 1960 saat sidang Pleno MPRS, diputuskan sebagai berikut : melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/agama kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia, serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II pasal 2 ayat I).

Dalam ayat 3 dan pasal tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar sampai universitas), dengan pengertian

¹⁷⁵ Hasbullah,. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hal 78

bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya.

Setelah Indonesia merdeka dan mempunyai Departemen Agama, maka secara instansional Departemen Agama disertai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dalam lembaga-lembaga tersebut. Lembaga pendidikan agama Islam ada yang berstatus negeri dan ada yang berstatus swasta.¹⁷⁶

DAFTAR PUSTAKA

Arifin. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Nata, Abuddin. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa.

Nizar, Samsul. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahab, Rochidin. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

¹⁷⁶ Zuhairini,. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 196

Yatim, Badri. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zuhairini. 1997. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 8
SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA
MASA ORDE BARU
(TAHUN 1968 - 1998)

Muhammad Faqih Firdaus
NIM. 5320005

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. Pendidikan Di Masa Orde Baru

Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpadiimbangi dengan perkembangan kualitas.¹⁷⁷ Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.

Pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan orde baru mengusung ideologi

¹⁷⁷Moh Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*, (Jogjakarta: Ar Ruz, 2009), hlm .99.

“keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBTANAS,UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik.¹⁷⁸

1. Produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Sehingga, berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya (tidak memanusiaikan manusia).
2. Lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial, dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistik.
3. Hilangnya kebebasan berpendapat.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mengedepankan moto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia”.¹⁷⁹ Pada Tahun 1969-1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Dan hasilnya digunakan untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K). Pada masa orde baru dibentuk BP-7 yang menjadi pusat pengarusutamaan (*mainstreaming*) pancasila dan UUD 1945 dengan produknya mata ajar Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan penataran P-4. Di Tahun 1980 mulai timbul masalah pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah

¹⁷⁸Nugroho, Notosusanto. 1990 . *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1-6*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 122.

¹⁷⁹Adinoto, 1992, *Indonesia Pada Orde Baru* , Jakarta, Erlangga, hlm. 10.

“pengangguran terdidik” Depdiknas di bawah Menteri Wardiman Djojoadiningrat (kabinet pembangunan VI) mengedepankan wacana pendidikan “link and match” sebagai upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia pada masa itu. Posisi Siswa Sebagai Subjek dalam Era Orde Baru Telah dipaparkan sebelumnya bahwa pada masa ini seluruh bentuk pendidikan ditujukan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Siswa sebagai peserta didik, dididik untuk menjadi manusia “pekerja” yang kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara.

Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa.¹⁸⁰

Kurikulum-kurikulum yang digunakan pada masa orde baru yaitu sebagai berikut:

1. Kurikulum 1968
2. Kurikulum 1975
3. Kurikulum 1984
4. Kurikulum 1994

B. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Di Bidang Pendidikan Islam

Ketika memasuki era orde baru tahun 1966 MPRS mengeluarkan ketetapan nomor XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal I, mengatakan bahwa “ pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari

¹⁸⁰Sujatmoko Ivan, *Perkembangan Pendidikan Guru Pada Masa Orde Lama Dan Orde Baru*, Pressmedia, hlm. 90.

sekolah dasar sampai dengan universitas negeri”¹⁸¹ Demikian pula halnya dengan TAP MPR Nomor IV /MPR/1978 yang memuat GBHN mempertegas kembali pelaksanaan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan lebih rinci lagi dijelaskan pada keputusan pemerintah nomor 08/c/u/1975 bahwa, pendidikan agama di sekolah dasar sampai sekolah menengah merupakan salah satu bidang studi. Bidang studi pendidikan agama diajarkan dalam tiap minggu 2 jam untuk kelas I,II, III SD 3 jam untuk kelas IV,V,VI serta 2 jam untuk SMP dan SMA, bahkan menjadi penentu kenaikan kelas jika nilai PAI tidak mencapai sekurang- kurangnya enam”¹⁸² Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat kedudukan pendidikan agama, Hal ini dapat dilihat setelah ditetapkannya undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab IX Pasal 39 ayat I ditegaskan bahwa, isi kurikulum tiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan”¹⁸³ Dengan demikian pendidikan agama menjadi komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan betapa penting dan

¹⁸¹Karel A. Stenbrink, *Pesantren, Madrasah, Dan Sekolah* (Jakarta:PT. Pustaka, LP3 ES, 1994), hlm. 93.

¹⁸²*Ibit.*, hlm. 94.

¹⁸³Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA, *PENDIDIKAN ISLAM Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2004., hlm. 89-90.

strategisnya pendidikan agama di Indonesia.

Dalam sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekarang, selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan pendidikan agama sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-kanak (BAB V pasal 9 ayat 1 PP Nomor 27 sejak Tahun 1990 dalam UU Nomor 2 Tahun 1989).

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, merupakan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945. Melalui perjalanan yang cukup panjang perjalanannya, sejak 1945 sampai tahun 1989, tampaknya undang-undang tersebut juga merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam kedalam sistem pendidikan nasional, sebagai usaha untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan yang selama ini masih berjalan. Dengan demikian berarti UU Nomor 2 tahun 1989 tersebut merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, dan dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapat peluang serta kesempatan untuk terus berkembang.

Adanya peluang-peluang dan kesempatan untuk berkembangnya pendidikan Islam dalam pendidikan nasional tersebut, dapat dilihat dari beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 1 ayat 2, disebutkan: Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945. Tidak bisa dipungkir bahwa Pendidikan Islam, baik sebagai sistem maupun institusinya, merupakan warisan budaya bangsa, yang berurat akar pada masyarakat bangsa Indonesia . Kalau begitu jelaslah bahwa Pendidikan Islam akan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

2. Pasal 4 tentang Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu: Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nilai-nilai aspek-aspek tujuan pendidikan nasional tersebut, sepenuhnya adalah nilai-nilai dasar ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan dengan tujuan Pendidikan Islam. Oleh karena itu perkembangan pendidikan Islam akan mempunyai peran yang menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut.
3. Pada pasal 10 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Kita ketahui bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, menurut ajaran Islam. Dengan masuknya lembaga pendidikan keluarga menjadi dasar sistem pendidikan nasional, maka

pendidikan muslim pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

4. Pasal 11 ayat 1 disebutkan “ Jenis pendidikan yang termasuk pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Yang dimaksud pendidikan agama sebagaimana dalam ayat tersebut adalah: pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Setiap orang Islam berkepentingan dengan pengetahuan ajaran-ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial budayanya. Oleh karenanya, pendidikan Islam dengan lembaga-lembaganya, tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional.
5. Pada pasal 39 ayat 2 dinyatakan: Isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pendidikan Agama, tentunya termasuk pendidikan Agama Islam merupakan bagian dasar dan inti kurikulum pendidikan nasional. Dan dengan demikian Pendidikan ama Islam pun terpadu dalam sistem pendidikan nasional.
6. Kemudian pada pasal 47, terutama ayat 2 dinyatakan bahwa: ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.

Dengan pasal ini, satuan-satuan Pendidikan Islam baik yang berada dalam jalur maupun jalur luar sekolah akan tetap tumbuh dan berkembang secara terarah dan terpadu dalam sistem Pendidikan Nasional. Sehubungan dengan satuan pendidikan yang berciri khas ini, pada PP Nomor 28 tahun 1990, tentang pendidikan Dasar, 4 ayat 3 menegaskan bahwa: SD dan SLTP yang berciri khas Agama Islam, yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, masing-masing Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Dengan demikian, Madrasah diakui sama dengan sekolah umum dan merupakan satuan pendidikan yang terintegrasi dalam sistem Pendidikan Nasional.¹⁸⁴

C. Madrasah di Masa Orde Baru

1. Kondisi Madrasah

Masa Orde Baru dimulai setelah tumbangnya pemerintahan Orde Lama, yang pada masa itu di bawah pemerintahan Soekarno.¹⁸⁵ Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan pemerintah Orde Lama. Pada era ini madrasah masih belum dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, akan tetapi madrasah menjadi lembaga otonom di bawah pengawasan menteri agama.

¹⁸⁴Drs.Hasbullah.*Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 86-88.*

¹⁸⁵Yunus, Abdul., *Menggugat Peran Madrasah Dalam Pendidikan Agama. STAIN Cirebon Press: Jurnal Lektur, Vol. 13 No. 2, Desember 2007., hlm. 204.*

Ketika Departemen Agama didirikan, salah satu tugas Bagian Pendidikan adalah mengadakan suatu pilot project sekolah yang akan menjadi contoh bagi orang-orang atau organisasi yang ingin mendirikan sekolah secara partikelir (swasta). Tugas ini mengandung maksud sekolah agama (madrasah) milik pemerintah diperlukan sebagai panutan atau contoh bagi pihak swasta dalam mengelola pendidikan agama. Pendirian madrasah negeri merupakan sisi lain dari bentuk bantuan dan pembinaan terhadap madrasah swasta.

Pada pertengahan tahun 1960-an, terdapat 13.057 Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan murid 1.927.777 siswa. Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) terdapat 776 madrasah dengan murid 87.932 siswa. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) terdapat 16 madrasah dengan jumlah murid 1.881 siswa.¹⁸⁶ Dari data ini terlihat bahwa perkembangan madrasah di tengah masyarakat cukup mengalami perkembangan. Hal ini membuktikan bahwa madrasah menjadi bagian penting dari upaya ikut mencerdaskan bangsa, terutama umat Islam.

Madrasah ibtidaiyah Negeri sebagian besar berasal dari madrasah-madrasah yang semula diasuh oleh Pemerintah Daerah Aceh, Lampung dan Surakarta. Sejak tahun 1946 ada 205 Sekolah Rendah Islam yang diasuh oleh Pemerintah Daerah Aceh yang dengan Ketetapan Menteri Agama No. I tahun 1959, pengasuhan dan pemeliharannya diserahkan

¹⁸⁶Yunus, Abdul., *Menggugat Peran ,..., hlm.204*

kepada Kementerian Agama dan namanya diubah menjadi Sekolah Rakyat Islam (SRI). Kemudian melalui Keputusan Menteri Agama No.104 tahun 1962 diubah namanya menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Hal yang sama terjadi di Karesidenan Lampung. Sebanyak 19 SRI berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 2 tahun 1959. Di Karesidenan Surakarta sebanyak 11 SRI dengan Penetapan Menteri Agama No. 12 tahun 1959. Sejak tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menegerikan madrasah swasta berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 80 tahun 1967. Kesempatan penegerian itu kemudian dihentikan pada tahun 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.813/ 1970, ketika itu jumlah MIN sudah mencapai 358 buah.

Madrasah Tsanawiyah, seperti halnya Madrasah ibtidaiyah, juga kebanyakan berstatus swasta. Madrasah Tsanawiyah negeri baru mulai didirikan pada tahun 1967. Penegerian Madrasah Tsanawiyah ini semula dimaksudkan sebagai model bagi madrasah swasta. Sampai tahun 1970 Madrasah Tsanawiyah Negeri yang disingkat (MTs.A.I.N) telah berjumlah 182 buah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah restrukturisasi dan relokasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 15,16 dan 17 tahun 1978, singkatan Madrasah Tsanawiyah Negeri dari M.Ts.A.I.N diubah menjadi MTsN dan jumlahnya menjadi 470 buah.

Madrasah Aliyah Negeri pertama kali didirikan melalui proses penegerian seperti halnya Madrasah Tsanawiyah Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 80 tahun 1967. Dalam keputusan itu

disebutkan penegerian Madrasah Aliyah AI-Islam Surakarta, Madrasah Aliyah di Magetan Jawa Timur, dan Madrasah Aliyah Palangki di Sumatera Barat. Proses penegerian berjalan terus sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 yang mengatur penghentian penegerian sekolah madrasah swasta dan pendirian sekolah sekolah/madrasah negeri dalam lingkungan Departemen Agama. Sampai tahun 1970 jumlah Madrasah Aliyah Negeri sebanyak 43 buah. Singkatan Madrasah Aliyah Negeri pada mulanya M.A.A.I.N kemudian diubah menjadi MAN berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 15, 16 dan 17 tahun 1978.

Pada masa orde baru pemerintah mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam pendidikan nasional. Berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga dimensi, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/4 1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum, ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Lulusan Madrasah Aliyah dapat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi umum dan agama.

Pemerintah orde baru melakukan langkah konkret berupa penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, penegasan definitif tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa Madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.¹⁸⁷ Pada masa orde baru ini madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah ke atas.

Sedangkan pertumbuhan jenjangnya menjadi 5 (jenjang) pendidikan yang secara berturut-turut sebagai berikut :

a. Raudhatul Athfal (Bustanul Athfal).

Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal terdiri dari 3 tingkat :

- a. Tingkat A untuk anak umur 3-4 tahun
- b. Tingkat B untuk anak umur 4-5 tahun
- c. Tingkat C untuk anak umur 5-6 tahun

b. Madrasah Ibtidaiyah.

Madrasah Ibtidaiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran

¹⁸⁷Maksum Dr.H,1999 "Madrasah Sejarah Dan Perkembangannya", Pengantar : Prof.Dr.Zakiyah Daradjat, 1999), hlm. 130-131.

dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.

c. Madrasah Tsanawiyah

Madrasah Tsanawiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.

d. Madrasah Aliyah.

Madrasah Aliyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah keatas dan menjadikan mata pelajaran agama Islam. Sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Dewasa ini Madrasah Aliyah memiliki jurusan-jurusan : Ilmu Agama, Fisika, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya.

e. Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah ialah lembaga pendidikan dan pelajaran agama Islam, yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapat pendidikan agama Islam. Madrasah Diniyah ini terdiri 3 tingkat :

- 1) Madrasah Diniyah Awaliyah ialah Madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan kelas 4 dengan jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dan seminggu.
- 2) Madrasah Diniyah Wusta ialah Madrasah Diniyah tingkat pertama dengan masa belajar 2

(dua) tahun dari kelas I sampai kelas II dengan jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu.

- 3) Madrasah Diniyah Ula ialah Madrasah Diniyah tingkat menengah atas dengan masa belajar 2 tahun dari kelas I sampai kelas II dengan jumlah jam pelajaran 18 jam pelajaran dalam seminggu.

Kemunculan Orde Baru tampil dengan konsep pembangunan yang lebih dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Pembangunan nasional merupakan bagian penting dari kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru pendidikan bersifat sentralisme, dengan birokrasi yang ketat. Hal ini terjadi akibat dari sistem pemerintahan yang otoriter. Hal ini memberi akibat pada kegiatan pendidikan bersifat menunggu perintah dari atas (top down).¹⁸⁸

Dengan adanya sentralisasi, maka pendidikan tidak berjalan dengan baik, inovasi terhenti karena setiap pembaruan dan inovasi dianggap menentang pemerintah. Sehingga pembaruan dan inovasi dalam pendidikan tidak berjalan secara maksimal. Lulusan pendidikan masa Orde Baru tidak mampu menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang dinamis dan inovatif. ¹⁸⁹ Hal senada juga

¹⁸⁸Cecep Koiruddin, "Politik Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Baru", Dalam, Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003, hlm.42.

¹⁸⁹ Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010, hlm. 43.

diungkapkan oleh Jamaluddin Idris, bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia selama 32 tahun tidak mempunyai visi yang jelas dan filosofis yang mendasar. Menurutnya ada empat hal yang muncul dalam kurun waktu tersebut. Pertama, pemberlakuan sistem mekanistik dalam proses pembelajaran. Kedua, pemberlakuan relasi monolog di ruang kelas, sehingga mengabaikan kreativitas, inovasi dan daya nalar anak. Ketiga, penekanan pembelajaran cenderung hanya sebatas aspek kognitif, sedangkan aspek lainnya, seperti afektif dan psikomotor terabaikan. Keempat, kurikulum disesuaikan dengan apa yang dipikirkan para pengambil kebijakan, bukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Sehingga kurikulum menjadi asing bagi peserta didik dan masyarakat.¹⁹⁰ Apa yang diungkapkan oleh Jamaluddin Idris adalah kondisi umum dari pendidikan di Indonesia, keadaan tersebut bisa saja terjadi terhadap pembelajaran di madrasah. Namun demikian, masih ada sekolah-sekolah maupun madrasah yang masih idealis dan inovatif. Tidak semua proses pendidikan menghasilkan lulusan yang tidak dinamis dan kreatif.

Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan agama, termasuk madrasah bersifat positif dan konstruktif, khusus pada dekade terakhir tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Kebijakannya bersifat melanjutkan dan memperkuat

¹⁹⁰ Jamaluddin Idris, *Kompilasi Pemikiran Pendidikan*, Yogyakarta: Suluh Press, 2005, hlm. 8-10.

kebijakan Orde lama. Meskipun demikian pada tahap ini madrasah belum dianggap sebagai bagian sistem pendidikan secara nasional, akan tetapi merupakan lembaga otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Pada masa ini sistem pendidikan madrasah secara khusus lebih didominasi oleh muatan-muatan yang bersifat keagamaan, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.¹⁹¹

Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa madrasah pada masa Orde Baru belum mempunyai kurikulum yang standar, manajemen dan struktur yang berbeda di setiap madrasah. Keadaan ini menimbulkan sulitnya pemerintah mengontrolnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Husni Rahim, Guru Besar Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta, bahwa madrasah mempunyai karakteristik yang unik, diantaranya adalah, pertama, madrasah adalah milik masyarakat. Kedua, madrasah menerapkan manajemen berbasis sekolah. Ketiga, madrasah sebagai lembaga untuk memperdalam agama Islam (*tafaqquh fid dien*). Keempat, madrasah sebagai lembaga kaderisasi dan mobilisasi umat. Dengan demikian pantaslah madrasah belum dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan madrasah surut dan tenggelam, bahkan

¹⁹¹ Nizar, Samsul Dan Muhammad Syaifuddin. 2010. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam, Jakarta : Kalam Mulia*, hlm. 40.

sudah melangkah sedikit lebih maju. Hal ini dapat dipandang bahwa madrasah telah menerapkan manajemen berbasis sekolah, yang disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan dimana madrasah itu berada.

Meskipun demikian madrasah perlu melakukan pembaruan dengan jalan, pertama melakukan formalisasi dengan cara menegerikan sejumlah madrasah swasta sesuai dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah, di samping mendirikan madrasah-madrasah baru. Kedua, melakukan restrukturisasi madrasah swasta dengan cara mengatur penjenjangan dan perubahan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁹²

Apa yang diusulkan oleh Samsul Nizar dilatarbelakangi oleh keadaan madrasah yang belum mempunyai kurikulum yang belum terstandar dengan baik, termasuk penjenjangan dan struktur yang tidak seragam. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa perlu pembaruan pada pendidikan madrasah. Akan tetapi di sisi lain, madrasah mempunyai posisi kuat dalam hal pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.¹⁹³ Hal ini mungkin satu kelebihan madrasah pada waktu itu, karena

¹⁹² Nizar, Samsul Dan Muhammad Syaifuddin. 2010. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam, Jakarta : Kalam Mulia*, hlm. 41.

¹⁹³ Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2009*, hlm. 112.

pendidikan madrasah tidak memberlakukan manajemen yang sama untuk setiap madrasah.

2. Eksistensi Madrasah

Sekitar akhir tahun 70-an dan akhir 80-an, pemerintah Orde Baru mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Usaha tersebut diwujudkan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan upaya memperkuat struktur madrasah, kurikulum dan jenjangnya, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sekolah-sekolah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1974 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.¹⁹⁴

Tiga orang menteri tersebut adalah Menteri Agama A. Mukti Ali dengan Nomor. 6 tahun 1975, Menteri P dan K yang dijabat oleh Syarief Thajeb dengan Nomor. 037/U/1975, dan Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Amir Mahmud dengan Nomor.36 tahun 1975 tanggal 24 maret 1975. SKB tersebut berlaku untuk madrasah dan semua jenjang baik negeri maupun swasta, madrasah di lingkungan pondok pesantren dan di luar pesantren. Di antara tujuan SKB adalah, pertama Ijazah madrasah dapat mempunyai, pertama, Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan

¹⁹⁴Maksum Dr.H,1999 "Madrasah Sejarah Dan Perkembangannya", Pengantar : Prof.Dr.Zakiyah Daradjat, 1999), hlm. 132.

ijazah sekolah umum. Kedua, Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih tinggi. Ketiga, siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang sama tingkatannya.¹⁹⁵ Dengan adanya keputusan tersebut, maka posisi madrasah setara dengan sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah. Bahkan akan lebih mempunyai nilai lebih jika pengelolaan madrasah dioptimalkan secara maksimal.

Maka dalam rangka merespon SKB tersebut, maka disusun kurikulum madrasah tahun 1975 dengan perbandingan bobot alokasi waktu 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama.¹⁹⁶ Dengan perbandingan tersebut, pada dasarnya madrasah mempunyai nilai lebih dibandingkan sekolah umum. Karena selain mempunyai standar pengetahuan umum yang sama, siswa madrasah mempunyai nilai positif, yaitu materi agama. Tentunya, jika hal ini dilakukan secara baik dan profesional, maka madrasah akan lebih berkualitas dan unggul. Dengan adanya SKB tiga menteri tersebut, maka eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah setara dengan sekolah umum yang dikelola oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Madrasah Pasca SKB Tiga Menteri
Kebijakan pemerintah Orde Baru terkait

¹⁹⁵Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 2003, hlm. 51.

¹⁹⁶Zakiah Daradjat (Dkk), *Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985, hlm. 82.

pendidikan madrasah yang paling fenomenal adalah terbitnya SKB Tiga Menteri, Menteri Agama No. 6 Tahun 1975, Menteri Dikbud No. 037/U/1975, dan Mendagri No. 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB ini ditandatangani oleh tiga menteri, yaitu Dr. H. Mukti Ali (Menteri Agama), Dr. Sjarif Thajeb (Mendikbud), dan H. Amir Machmud (Mendagri). Inilah kebijakan 'legendaris' yang memperkuat posisi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional. Secara politis, keberadaan lembaga madrasah makin kuat. Hal ini bisa dilihat pada bab 4 pasal 4 yang menyatakan:

- 1) Pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama;
- 2) Pembinaan Mata Pelajaran Agama pada madrasah oleh Menteri Agama;
- 3) Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Mendikbud, bersama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri

Dengan SKB tersebut, maka berimplikasi pada peniadaan dikotomi pendidikan umum (sekolah) dan pendidikan Islam (madrasah). Posisi madrasah pun dengan demikian cukup strategis, sebab secara substantif mengandung makna:

- 1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah sekolah umum yang setingkat.
- 2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas.

- 3) Lulusan madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Secara teknis, keputusan bersama tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing menteri. Menteri Agama Prof. Dr. H. Mukti Ali mengeluarkan kebijakan:

- 1) KMA No. 70 Tahun 1976 tentang Persamaan Tingkat/Derajat Madrasah dengan Sekolah Umum tertanggal 15 Desember 1976 dan KMA No. 5 Tahun 1977 tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri tertanggal 26 Januari 1977.
- 2) KMA No. 15, 16, dan 17 Tahun 1976 tentang Restrukturisasi Madrasah (masing-masing MI, MTs, dan MA).
- 3) KMA No. 73, 74, dan 75 Tahun 1976 tentang pembakuan kurikulum madrasah untuk semua tingkat (MI, MTs, dan MA).
- 4) Selanjutnya berdasarkan KMA No. 15, 16, 17 Tahun 1978 dalam rangka reorganisasi, relokasi dan restrukturisasi sekolah, maka jenis sekolah di lingkungan Kemenag tinggal 4 jenis, yaitu MIN, MTsN, MAN, dan PGAN. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Keadaan Sekolah diBawah Kemenag
Sebelum dan Sesudah Reorganisasi

SEBELUM REORGANISASI			SESUDAH REORGANISASI	
No	Lembaga	Jml	Lembaga	Jml
1	MIN	358	MIN	376
2	MTs AIN	182	MTsN	470
3	PGAN 4 Th	146	MAN	167
4	PPUPAN	3	PGAN	93
5	MAAIN	43		
6	PGAN 6 Th	116		
7	SP IAIN	83		

Pada SKB yang masih memuat 70% materi umum dari semula 30%, masih menyisakan persoalan kesenjangan muatan kurikulum. Oleh karena itu penyempurnaan dilakukan melalui SKB Dua Menteri, Mendikbud dan Menag No. 299/U/1984 dan No. 45/1984 tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan dan Kurikulum Madrasah. Secara kelembagaan SKB tersebut menurut Asrohah memberikan dampak persamaan antara madrasah dan sekolah umum dalam penjenjangan dan mutu pengetahuan umum, beserta penyeragaman dan pembakuan struktur kurikulum (secara rinci diulas pada bagian kurikulum).

Selain itu, menurut Rahim dalam rangka

mendukung SKB Tiga Menteri, telah ditetapkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diikuti PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar yang menetapkan MI dan MTs adalah SD dan SMP yang berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang menetapkan MA sebagai SMU berciri khas Islam. Demikian pula menurut Ali Munif dengan SK Mendikbud No. 0487/U/1992 dan No. 054/U/1993 tentang kurikulum nasional, integrasi dan perbaikan lembaga madrasah terus dikembangkan. Misalnya dengan KMA No. 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah, KMA 371 Tahun 1993 Tentang MAK. Pada Tahun yang samajugaditetapkanpendidikanprasekolahmelaluiKMA No.367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal sebagai kelanjutan KMA No. 56/1978 yang mengatur kurikulum RA/BA dalam status pelajaran.¹⁹⁷

b. Madrasah Aliyah Program Khusus

Madrasah yang kala itu masih dianggap sebagai lembaga pendidikan 'setengah-setengah', belum mampu menghasilkan lulusan yang ahli di bidang agama, apalagi mencetak ulama yang waktu itu mengalami kelangkaan. Sementara di sisi lain dalam penguasaan umum masih kalah dengan sekolah. Oleh karena itu dalam rangka

¹⁹⁷Rahim, Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam, Ciputat: Logos Wacana Baru, 2001.*

mengatasi kesenjangan dan krisis *ulama-intelek*, Kementerian Agama melakukan terobosan dengan membuka satu lembaga pendidikan Islam bernama Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Ini merupakan hasil eksperimen yang dilakukan Munawir Sadzali, Menteri Agama saat itu, yakni dengan mengembalikan 70% pelajaran agama, dan 30% pelajaran umum. Berikut adalah perkembangan MAPK selama dua periode pada masa Orde Baru seperti ditulis Soebahar:¹⁹⁸

Tabel 2
MAN yang Ditunjuk Menjadi MAPK

NO	LEMBAGA	NO. REGISTER	DASAR HUKUM
1	MAN Darussalam	01/I/MAPK/1987	KMA No. 73 tahun 1987
2	MAN 1 Yogyakarta	02/I/MAPK/1987	
3	MAN Ujung Pandang	03/I/MAPK/1987	
4	MAN Kotabaru	04/I/MAPK/1987	
5	MAN Jember	05/I/MAPK/1987	
6	MAN Banda Aceh	06/MAPK/1990	KMA No.138 tahun 1990
7	MAN Tanjung Karang	07/MAPK/1990	
8	MAN Martapura	10/MAPK/1990	
9	MAN Mataram	10/MAPK/1990	

¹⁹⁸Soebahar, *Abd. Halim, Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.*

Dalam perkembangannya, sebagai konsekuensi dari UUSPN No. 2 Tahun 1989, MAPK berevolusi menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Hal ini seperti dijelaskan sebelumnya diperkuat dengan KMA No. 371 Tahun 1993. Menurut Nurasa, perubahan ini hanyalah bersifat penamaan saja, tidak substansial. Selain itu perubahan tersebut sebagai implikasi PP No 28 Tahun 1990 tentang Dikdas, bahwa MI dan MTs yang diselenggarakan oleh Kemenag adalah sekolah umum yang bercirikan Islam dan SK Mendikbud No.489/U/1992, bahwa MA adalah SMU yang berciri khas Islam.

c. Madrasah Model

Di antara inovasi kelembagaan pendidikan oleh pemerintah Orde Baru melalui Kemenag adalah pengembangan madrasah model. Madrasah model menurut Rahim adalah madrasah negeri yang memiliki standar tertentu dari sarana prasarana, jumlah dan kualifikasi tenaga guru, serta siswa yang terseleksi sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan intensitas yang tinggi. Saat itu telah ditetapkan sebanyak 54 MTsN dan 28 MAN seluruh Indonesia. Strategi “madrasah model” oleh Kementerian Agama ini menurut Subhan dilakukan pada akhir tahun 1990-an dengan melengkapi Pusat Sumber Belajar (PSBB). Hingga saat ini keberadaan madrasah model masih menjadi rujukan dalam mengembangkan madrasah ideal, meskipun tidak semua mampu bertahan. MIN malang 1, MTsN Malang 1 dan

MAN Malang 3 adalah di antara madrasah model yang masih eksis.¹⁹⁹

d. Akreditasi Madrasah

Meskipun kebijakan penegerian madrasah swasta dan pendirian madrasah negeri sudah banyak dilakukan, namun secara kuantitatif tidak sebanding dengan jumlah madrasah swasta. Untuk memacu pengembangan madrasah swasta, diterbitkan KMA No. 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta. Secara teknis KMA ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 29/E/1990 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah. Tujuan dilakukannya akreditasi untuk: Mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan melalui: perbaikan kurikulum; tenaga kependidikan yang berkualitas; dan tersedianya prasarana/sarana pendidikan yang baik.

- 1) Mendorong terciptanya dan terpeliharanya ketahanan madrasah dan lingkungannya;
- 2) Mendapatkan bahan-bahan bagi perencanaan dalam rangka pembinaan madrasah yang bersangkutan;
- 3) Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab;
- 4) Memudahkan pengaturan mutasi murid/siswa.

Meskipun SKB dan peraturan pendukung telah melewati puluhan tahun, namun dampak sosialnya (*civil effect*) menurut Abuddin Nata (2012) cukup terasa hingga kini. Lulusan

¹⁹⁹Rahim, Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam, Ciputat: Logos Wacana Baru, 2001.*

madrasah tidak lagi kelas dua (*second class*). Mereka bisa bersaing dengan lulusan dari lembaga pendidikan umum. Peluang lulusannya tidak hanya berkuat pada urusan doa dan imam shalat, atau juru nikah dan hakim agama, tapi juga bisa meniti karir sebagai konsultan teknik sipil, teknik industri, pengacara, dokter, ataupun profesi lain dengan dijiwai nilai-nilai religius, yang sebelumnya tidak dikuasai oleh lulusan madrasah dan perguruan tinggi agama. Dengan kata lain, madrasah bisa memenuhi permintaan (*demand*) dan kebutuhan (*need*) masyarakat yang religius-modernis. Inilah kontribusi pemerintah Orde Baru dalam pengembangan madrasah yang tidak bisa kita *nafi*-kan.²⁰⁰

e. Sekolah Dinas

Sekolah dinas pernah mengalami masa kejayaan dan sempat menjadi primadona pada akhir pemerintahan Orde Lama dan awal Orde baru. Dalam Repelita pertama, 1969-1973 pemerintah Orde Baru melalui Kementerian Agama sebenarnya sudah merencanakan perluasan Pendidikan Guru Agama dan lembaga pendidikan pegawai Kementerian Agama, seperti IAIN. Hal ini menurut Alinuddin dalam Steenbrink mengingat sistem pendidikan madrasah kala itu tidak dapat dikembangkan lebih luas, atau sekurang-kurangnya dengan dana

²⁰⁰ Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

yang tersedia. Prioritas program diberikan kepada PGA dan IAIN. Kebijakan yang diambil kala itu menurut Steenbrink yaitu, untuk dapat memasuki lembaga ini harus ditempuh melalui jenjang formal yaitu:

- 1) Bagi tamatan MI atau SD dapat melanjutkan ke PGA,
- 2) Tamatan MTs atau SMP untuk PGAA,
- 3) Sedangkan untuk IAIN harus tamat SMA atau aliyah.

Dalam hal ini, untuk memasuki PGA atau IAIN akan lebih baik jika seseorang menamatkan pendidikan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, atau aliyah karena mereka telah mempunyai dasar agama dan Bahasa Arab yang cukup.

Seiring perjalanan waktu dan karena keterbatasan anggaran, pada tahun yang sama (1969), ikatan dinas justru dihentikan bagi seluruh murid. Semenjak itu secara formal PGAPN, PGAAN, dan PHN tidak lagi menjadi ikatan dinas. Demikian halnya Sekolah Persiapan IAIN (SP IAIN), dengan adanya restrukturisasi dan reorganisasi berdasarkan KMA No. 17 tahun 1978 sekolah yang dipersiapkan bagi tamatan Madrasah Menengah Tinggi yang mau masuk PTAIN dengan kemampuan akademik terbatas ini diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Sementara pada struktur yang baru, PGAN masih bertahan meskipun stagnan. Namun dengan terbitnya UU No 2 Tahun 1989 dan PP No. 38 Tahun 1992 pasal 14, yang memperkuat posisi Fakultas Tarbiyah pada PTAIN/IAIN sebagai

satu-satunya LPTK yang dimiliki Kemenag, sekolah guru dengan berbagai corak dan tingkatannya dilebur menjadi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah(MA).

f. Institut Agama Islam Negeri(IAIN)

Institut Agama Islam Negeri, pada masa Orde Baru mengalami pergeseran orientasi. Hal ini tampak setelah dikeluarkannya PMA No. 1 Tahun 1972. Dalam peraturan itu dijelaskan: "IAIN adalah suatu institut yang memberi pendidikan dan pengajaran agama Islam tingkat universitas serta menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam". Di antara tujuan IAIN dalam peraturan itu ialah: "mencetak sarjana-sarjana muslim/pejabat-pejabat agama Islam yang ahli untuk kepentingan Departemen Agama, maupun untuk kepentingan instansi lain yang memerlukan keahliannya di dalam agama Islam serta untuk memenuhi keperluan umum".

Menurut Rahim, sebenarnya maksud dan tujuan itu ingin menggabungkan antara tujuan PTAIN dan ADIA. Namun pada kenyataannya lebih berorientasi mencetak pejabat dari pada pemikir Islam. Inilah pula yang menyebabkan kekhawatiran sebagian kalangan bahwa IAIN belum mampu mencetak para ulama.²⁰¹

Dilihat dari perkembangannya, secara kuantitatif, IAIN sejak awal Orde Baru (tahun

²⁰¹Rahim, Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam, Ciputat: Logos Wacana Baru, 2001.*

1966) sampai dengan 1973, Kementerian Agama telah menambah jumlah sebanyak tujuh IAIN dari tujuh IAIN pada Tahun 1965, sehingga secara keseluruhan berjumlah 14 buah. Ini diperkuat dengan Keppres No. 9 Tahun 1987 yang mempertahankan jumlah tersebut dengan 90 fakultas. Selanjutnya melalui PP No. 33 Tahun 1985, status IAIN makin kuat dan sejajar dengan PTN di lingkungan Kemendikbud.

Rupanya perkembangan IAIN yang begitu pesat, diikuti pihak swasta dengan mendirikan fakultas agama di beberapa kota besar. Semula dengan status “terdaftar”, hingga pada 1972 tercatat sebanyak 110 fakultas agama yang berinduk pada IAIN berstatus “diakui”. Selain itu, menurut Asrohah ada beberapa fakultas agama yang menginduk pada Perguruan Tinggi Islam Swasta, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah (Unmuh), Universitas Islam Bandung (UNISBA), Universitas Islam Malang (UNISMA), dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Fakultas agama pada PT tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Perguruan Tinggi Agama Depag (Kemenag sekarang), sementara fakultas non agama berada di bawah kendali Depdikbud (Kemendikbud Sekarang).

g. Pondok Pesantren

1. Pengembangan Tipologi Pesantren

Perkembangan pendidikan pesantren sebagai pengawal mental, moral, budi pekerti dan keyakinan agama umat Islam yang begitu

pesatnya mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama Mengatur jenis atau tipologi pesantren. Pengembangan tipologi pesantren pada masa Orde Baru, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1979. PMA tersebut menurut Abd. Halim Soebahar telah mengklasifikasikan pondok pesantren menjadi empat tipe, yaitu:

- a) Pondok Pesantren Tipe A, yaitu di mana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem *wetonan* dan sorogan).
- b) Pondok Pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kiai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu, santri tinggal di asrama di lingkungan pondok pesantren.
- c) Pondok Pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan para santrinya belajar di luar (madrasah atau sekolah umum), kyai hanya mengawasi dan membina para santri.
- d) Pondok Pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah dan madrasah. Tipe ini merespon upaya konvergensi yang dilakukan pemerintah Orde Baru melalui Kementerian Agama seperti ditulis Karel A. Steenbrink bahwa kala itu Kemenag menganjurkan

supaya pesantren yang tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal, dengan memakai kurikulum yang tetap dengan memasukkan mata pelajaran umum di samping agama.²⁰²

Keempat tipe sebagaimana dimaksud, bukan sebuah opsi yang mutlak harus diikuti oleh sebuah pondok pesantren. Namun lebih berfungsi sebagai kontrol pemerintah terhadap perkembangan pesantren. Pada faktanya, pesantren memang memiliki kekhasan tersendiri dengan melakukan inovasi sesuai paradigma yang dimiliki kiainya. Dengan otoritas kiai, pesantren bisa mengembangkan lembaganya secara mandiri. Ini tidak terlepas dari semangat “Panca Jiwa Pesantren” sebagaimana ditulis Soebahar yang salah satunya adalah jiwa ‘kemandirian’, bukan hanya bermakna bahwa santri harus mengurus keperluannya sendiri, melainkan telah menjadi semacam prinsip bahwa sejak awal pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak pernah menyandarkan kelangsungan hidup dan perkembangannya pada bantuan dan belas kasihan orang lain termasuk pemerintah. Selain itu, dilihat dari sejarah pertumbuhannya, pondok pesantren hanya mengandalkan dukungan dari santri dan masyarakat sekitar yang memang saling

²⁰²Soebahar, Abd. Halim, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

membutuhkan akan kehadirannya. Ini sekaligus membenarkan apa yang dikatakan Muzayyin Arifin bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang berdiri serta tumbuh dengan sendirinya dalam masyarakat, yang secara *de facto* disahkan oleh masyarakat, sedang landasan yuridis formal belum dirumuskan oleh pemerintah dalam arti khusus. Karena itu, menurut Masdar Hilmy (2013) tidak ada seorangpun yang berhak menghentikan laju perubahan pesantren, karena sejak kelahirannya ia tumbuh dan berkembang secara otonom dari masyarakat, serta didorong atas *demand* (permintaan) dan *need* (kebutuhan) masyarakatnya sendiri.²⁰³

Dengan demikian, meskipun telah terbit PMA yang didalamnya mengatur tipologi pesantren, dalam perkembangannya selalu muncul keunikan-keunikan sebagai bentuk inovasi ala pesantren. Jadi, munculnya berbagai keunikan dan tipologi pesantren, bisa dikatakan tidak bersifat *top down*, tapi lebih bersifat *bottom up*.

2. Pendidikan Keterampilan pada Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas Indonesia, sekaligus embrio pendidikan Islam bahkan pendidikan nasional dalam konteks keindonesiaan, merupakan satu kesatuan dalam Sistem Pendidikan Nasional

²⁰³Hilmy, Masdar, *Pesantren Dan Tradisi Ilmiah*, Surabaya: Pustaka Idea, 2013.

yang secara legal formal diakui sejak masa Orde Pendidikan keterampilan yang semula hanya sebatas kurikulum titipan, selanjutnya berubah menjadi persyaratan dalam penyetaraan pendidikan pesantren dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang dikembangkan Kementerian Agama dan Kemendikbud. Persyaratan lain adanya subsidi pembinaan bagi pondok pesantren penyelenggara madrasah dengan membentuk yayasan dijadikan momentum sejarah yang berpengaruh terhadap perubahan pola kepemimpinan individu menjadi kolektif dalam kepemimpinan sebuah yayasan. Hal Ini membuktikan adanya kontribusi pemerintahan Orde Baru dalam pengembangan kelembagaan pondok pesantren terutama di bidang pendidikan keterampilan yang sangat besar, dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam pengembangan pendidikan pondok pesantren di masa mendatang, meskipun sebagian masih menimbulkan pro-kontra; ada yang menerima sepenuhnya, ada yang menerima dengan catatan, dan ada yang menolak sepenuhnya. Kesemuanya itu kembali pada kyai yang mempunyai otoritas terhadap pondok pesantren yang dikelolanya.

h. Madrasah Diniyah

Pada masa orde Baru, kebijakan madrasah diniyah, tidak terlalu signifikan selain perubahan struktur kurikulum sekaligus memantapkan posisi madrasah diniyah sebagai lembaga

pendidikan keagamaan. Hal ini bisa dilihat pada PMA No. 3 Tahun 1983 pasal 1 yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: "Madrasah Diniyah ialah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapat pendidikan agama Islam". Namun dengan struktur kurikulum yang diperbarui sebagaimana ditulis Abd. Halim Soebahar, yaitu diniyah *Wustha* dan *'Ulya* yang hanya ditempuh 2 tahun (kelas 1 dan 2) dari 3 tahun (sebelum PMA/3/1983), secara otomatis mengurangi jumlah rombongan belajar dari 3 kelas/tingkat menjadi 2 kelas/tingkat, sekaligus memangkas masa pendidikan para santri. Sedangkan dengan menambah jumlah bidang studi dan beban belajar dari 10 menjadi 18 JP /minggu, secara kuantitatif dan kualitatif menguntungkan para santri.²⁰⁴ Tentunya dengan perubahan semacam itu secara kelembagaan berimplikasi pada aspek lain, seperti ketenagaan, sarana prasarana, keuangan, dan sebagainya sehingga mendorong pimpinan lembaga diniyah melakukan pembenahan secara internal.

DAFTAR PUSTAKA

Adinoto. 1992. *Indonesia Pada Orde Baru*. Jakarta: Erlangga.

²⁰⁴Soebahar, Abd. Halim, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Daradjat, Zakiah (Dkk). 1985. *Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Daulay, Haidar Putra. 2004. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
-
- _____ 2009. *Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hilmy, Masdar. 2013. *Pesantren Dan Tradisi Ilmiah*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Idris, Jamaluddin. 2005. *Kompilasi Pemikiran Pendidikan*. Yogyakarta: Suluh Press.
- Ivan, Sujatmoko. *Perkembangan Pendidikan Guru Pada Masa Orde Lama Dan Orde Baru*. Pressmedia.
- Koiruddin, Cecep. 2003. "Politik Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Baru", Dalam, Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Maksum. 1999. *Madrasah Sejarah Dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Nata, Abuddin. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa.

- _____ 2010. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- _____ 2012. *Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nizar, Samsul dan Syaifuddin, Muhammad. 2010. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta : Kalam Mulia.
- Nugroho, Notosusanto. 1990 . *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1-6*. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.
- Rahim; Husni. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam*. Ciputat: Logos Wacana Baru.
- Soebahar; Halim, Abd. 2013. *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Stenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren, Madrasah, Dan Sekolah*. Jakarta: PT. Pustaka, LP3 ES.
- Yamin, Moh. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Jogjakarta: Ar Ruz.
- Yunus, Abdul. 2007. "Menggugat Peran Madrasah Dalam Pendidikan Agama". STAIN Cirebon Press: *Jurnal Lektur*, Vol. 13 No. 2.

BAB 9
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
MADRASAH PADA MASA REFORMASI

Miftahul Jannah
NIM. 5320004

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. Sejarah Madrasah atau Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Ketika mantan Presiden Soeharto membaca “Surat Pengunduran Diri” pada tanggal 21 Mei 1998, maka berakhirnya sudah suatu era yang dinamakan Orde Baru. Hal ini merupakan awal berdirinya era baru yang mampu merubah berbagai tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia. Era baru tersebut sering dikenal dengan Istilah “Reformasi”. Secara harfiah reformasi adalah membentuk atau menata kembali. Yakni mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau balau, yang di dalamnya terdapat kegiatan menambah, mengganti, mengurangi, dan memperbaiki. Adapun dalam arti yang lazim digunakan di Indonesia, era reformasi adalah masa pemerintahan yang dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, oleh sebuah gerakan masa yang sudah tidak terbandung

lagi. Dari sejak tahun itu disebut sebagai era Reformasi.²⁰⁵

Makna reformasi adalah perubahan yang terjadi secara drastis. Sedangkan menurut para ahli, reformasi itu adalah sebuah proses pembentukan kembali sebuah tata kehidupan (tata kehidupan yang lama diganti dengan tata kehidupan yang baru). Tujuannya adalah untuk membawa kehidupan yang lebih baik dengan melihat keperluan di masa depan.

Menurut Emil Salim, reformasi dapat diartikan sebagai perubahan yang bertujuan untuk masa depan.²⁰⁶ Sedangkan Din Syamsuddin, seperti kutipan H.A.R. Tilaar yang menitikberatkan pada proses kembali pada bentuk asalnya.²⁰⁷ Reformasi juga dapat disebut sebagai upaya pembaharuan (modernisasi). Dengan demikian maka reformasi pendidikan Islam dapat dimaknai sebagai upaya untuk menutup dan menyempurnakan berbagai kekurangan. Benang merah dari pengertian di atas adalah bahwa reformasi adalah upaya pembaharuan yang dilakukan secara menyeluruh pada seluruh sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi bahkan pendidikan, termasuk didalamnya adalah pendidikan Islam.

²⁰⁵ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 347.

²⁰⁶ Nata, A, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hal 9-10

²⁰⁷ Tilaar, H. A. R, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Abad 21* (Magelang: Tera Indonesia, 1998) hal 25

Tahun 1998 merupakan awal era reformasi di mana pemerintah terus meningkatkan perhatian dan kepeduliannya terhadap pelaksanaan Pendidikan Islam yang tertera pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007. Tema besar reformasi pendidikan di Indonesia telah membawa suatu konsep penerapan pengelolaan pendidikan yang berfokus pada otonomi dan independensi dalam penentuan keputusan dan kebijakan lokal sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikannya, yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu sekolah yang efektif dan produktif. Masa reformasi berakhir ditandai dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2014.

Reformasi pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan isu reformasi pemikiran Islam. Munculnya gerakan pembaharuan dalam pemikiran Islam, salah satunya dilandasi kesadaran akan mulai terpuruknya bahkan keterbelakangan Islam dalam segala aspeknya tidak terkecuali dalam aspek pendidikan.²⁰⁸ Azyumardi Azra dalam salah satu bukunya menganggap esensi pembaharuan dalam pendidikan Islam adalah pembaruan pemikiran dan perspektif intelektual. Beberapa intelektual dan pemikir Islam di belahan dunia Islam seperti Al-Maududi di Pakistan, Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi, Muhammad Abduh di Mesir, KH Ahmad Dahlan di Indonesia dan lain sebagainya yang

²⁰⁸ Aminatus Sya'adah., dkk, "*Sejarah reformasi pendidikan Islam di Indonesia*", Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Vol. 8, No. 1, April 2019, hal 40

menganggap bahwa pembaharuan dalam pemikiran Islam merupakan gagasan penting sebagai bentuk kritik ambivalensi bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang bersifat kaku, tekstualis, bahkan rigid. Fenomena ini tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi formulasi pendidikan Islam yang sedang berlangsung. Salah satu contohnya adalah bagaimana pada saat awal abad pertengahan pelaksanaan pendidikan Islam masih lebih menitik beratkan pada aspek kognitif, tanpa mewedahi aspek lainnya seperti afektif dan psikomotorik.²⁰⁹

Reformasi yang sedang berjalan di negeri kita, tentu merupakan sebuah proses panjang dan di dalamnya terdapat bermacam-macam pelaku (*actors*) berikut latar belakang gagasan, kepentingan, serta perilaku yang kasat mata. Di antara para pelaku tersebut adalah gerakan-gerakan umat Islam yang semenjak lahirnya Republik ini merupakan salah satu kelompok strategis dalam peraturan politik riil. Dimana gerakan-gerakan tersebut menghendaki salah satunya sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang lebih baik dibandingkan sistem pendidikan yang telah berjalan selama masa sebelum era Reformasi.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah kolonial, awal, dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkenal meng-“anak tirikan”, mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya karena

²⁰⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana, 2002), hal 126

alasan “Indonesia bukanlah negara Islam”. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu “diredam” untuk sebuah tujuan ideal, yaitu “Menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia...” seperti tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dengan demikian, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam, baik dari aspek sosio politik maupun aspek religius.

B. Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah pada Masa Reformasi Sistem Pendidikan Islam pada masa Reformasi

Pada masa ini pendidikan Islam atau madrasah secara umum sudah memiliki jenjang yang baku seperti Madrasah Ibtidaiyyah untuk tingkatan dasar. Madrasah Tsanawiyah untuk tingkatan menengah pertama dan Madrasah Aliyah untuk tingkatan menengah atas. Tujuan Pendidikan Agama Islam berdasarkan jenjang pendidikan, di antaranya yaitu:

1. Tujuan untuk jenjang pendidikan MI /SD dan MTS / SLTP meliputi:
 - a. Tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan dengan mulai belajar Al-Qur’an dan praktek-praktek ibadah secara verbalistik dalam rangka pembiasaan dan upaya penerapannya.
 - b. Tumbuhnya sikap beretika melalui keteladanan dan penanaman motivasi.

- c. Tumbuhnya penalaran (mau belajar, ingin tahu senang membaca, memiliki inovasi, dan berinisiatif dan bertanggung jawab)
 - d. Tumbuhnya kemampuan berkomunikasi sosial.
 - e. Tumbuh kesadaran untuk menjaga kesehatan.
2. Tujuan pendidikan pada jenjang MA/SLTA meliputi:
- a. Tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan dengan memiliki kemampuan baca tulis Al-qur'an dan praktek-praktek ibadah dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri.
 - b. Memiliki etika.
 - c. Memiliki penalaran yang baik.
 - d. Memiliki kemampuan berkomunikasi sosial.
 - e. Dapat mengurus dirinya sendiri.
3. Tujuan Pendidikan Tingkat Tinggi di dalam penguasaan ilmu pendidikan dan kehidupan praktek ibadahnya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi telah memiliki kemampuan untuk menyebarkan kepada masyarakat dan menjadi teladan bagi mereka.²¹⁰

C. Kebijakan Pendidikan Islam Era Reformasi

Kebijakan pemerintah pada masa Reformasi dalam dunia pendidikan Agama Islam bukanlah merupakan produk baru. Kebijakan pemerintah pada masa reformasi merupakan kebijakan yang melanjutkan dari segi positif dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sebelum masa reformasi. Salah satu kebijakan

²¹⁰ Mustofa dan Abdullah Ali, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hal. 44.

pemerintah reformasi yang melanjutkan kebijakan pemerintah masa sebelumnya adalah kebijakan mengenai program wajib belajar sembilan tahun yaitu jenjang SD dan SMP atau sederajat. Pada Masa Reformasi, pendidikan Agama Islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum.

Keadaan pendidikan islam era reformasi keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pemerintah era Orde Baru. Karena dibentuknya kebijakan-kebijakan pendidikan islam era reformasi, kebijakan itu antara lain berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan lainnya yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan atau dapat merugikan masyarakat dapat dibicarakan dan diperdebatkan di depan umum secara terbuka. Sejalan dengan berbagai kebijakan tersebut di atas, telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam yang secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:²¹¹

1. Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya

²¹¹ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 352-356

menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren, ma`had Ali, *Raudhatul Athfal* (Taman Kanak-Kanak), dan majelis taklim.

Ada beberapa Pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang madrasah. Dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan madrasah.

a. Kelembagaan formal dan nonformal kedudukannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, selanjutnya diakui majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal serta dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan.

1) Pendidikan formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan (jalur sekolah) yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.²¹² Jenjang pendidikan formal ditinjau dari sudut tingkatan di lembaga pendidikan Islam terdiri dari:

²¹² Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang...*, hlm. 73

- a) Pendidikan Dasar terdiri dari;
 - (1) Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 - (2) Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- b) Pendidikan Menengah terdiri dari;
 - (1) Madrasah Aliyah (MA)
 - (2) Madrasah Aliyah Khusus (MAK)

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) merupakan pendidikan umum yang mempunyai ciri khas agama, yaitu agama Islam. Meskipun ketiganya telah menjadi pendidikan umum berciri khas Islam, lembaga pendidikan ini tetap memberikan porsi yang lebih banyak pada materi pendidikan keagamaan dibandingkan dengan pendidikan umum non keagamaan.²¹³
- c) Pendidikan Tinggi, terdiri dari;
 - (1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
 - (2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN)
 - (3) Universitas Islam Negeri (UIN)
 - (4) Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAI)
 - (5) Universitas Islam Swasta (pengelolaannya di bawah yayasan)

Selain jenjang pendidikan tersebut, ada juga diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu suatu penyelenggaraan pendidikan

²¹³ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2009), hal. 184

yang diperuntukan bagi anak sebelum memasuki Pendidikan Dasar.²¹⁴ Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), *Raudhatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat.²¹⁵

2) Pendidikan nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal (jalur luar sekolah) yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan agama sebagai institusi yang selama ini dikenal dengan nama madrasah Diniyah serta pondok pesantren telah berakar, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Satuan pendidikan tersebut telah ada sejak permulaan agama Islam masuk ke Indonesia, atau paling lambat sudah dimulai pada abad ke-11.²¹⁶

Dalam sistem pendidikan Nasional, pesantren dan madrasah Diniyah mempunyai akar kuat dalam masyarakat Islam Indonesia dan merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah (*nonformal*). Di pesantren secara

²¹⁴*Ibid.*, hal. 53

²¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang...*, hlm. 88

²¹⁶ Lihat Departemen Agama RI. *Nama Dan Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), hlm. .668

intensif agama dipelajari, dialami, dan dikaji. Pesantren juga mempunyai metode-metode yang khas dalam proses pendidikannya, seperti sorogan, dan *halaqah*, kendati sudah memakai sistem klasikal, di samping juga gaya hidup santri yang dilatih kemandirian. Sistem pembelajaran yang lebih terstruktur dari apa yang terjadi di pesantren adalah madrasah Diniyah (keagamaan). Sistem pengajaran yang digunakan adalah sistem klasikal. Materi yang dipelajari di madrasah diniyah adalah keagamaan, namun berbeda dengan di pondok pesantren umumnya, di madrasah Diniyah materi telah lebih terstruktur dan berjenjang.²¹⁷

Bentuk pendidikan Islam nonformal lainnya adalah majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim memiliki kurikulum tersendiri yang diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Untuk memberikan pendidikan agama kepada masyarakat yang sangat heterogen, perlu disampaikan materi pendidikan agama (bahan ajar) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu dan tidak menyimpang dari aqidah agama serta disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya setempat. Pelajaran disampaikan melalui lembaga keagamaan yang ada pada masyarakat

²¹⁷Hasbullah *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm. 184

itu sendiri, dengan cara (metode) ceramah dan tanya jawab (diskusi), dan metode lain yang sesuai dengan kebutuhan pendengar yang hadir.²¹⁸

- a) Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dikukuhkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- b) Pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan Nasional.

Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi.²¹⁹ Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang-undangan dan peraturan yang merupakan turunannya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang

²¹⁸ Nuryanis Dan Romli, *Pendidikan Luar Sekolah, Kontribusi Ditpenamas Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003) hlm. 40

²¹⁹ Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif; Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 218.

Sertifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur tentang guru, dosen, standar nasional pendidikan, serta sertifikasi guru dan dosen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan nasional saja, melainkan juga tentang guru, dosen, standar nasional pendidikan, serta sertifikasi guru dan dosen yang berada di bawah Kementerian Agama.

2. Kebijakan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional yang mengatur diberbagai bidang pendidikan salah satunya adalah bidang Pendidikan Agama Islam yang memiliki kedudukan sama dengan pendidikan umum.²²⁰

Dalam bidang pendidikan kabinet reformasi salah satunya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis. Program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yakni, bahwa mereka tidak dipungut

²²⁰ Afiful Ikhwan, *Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi*, Jurnal Edukasi STAI Muhammadiyah Tulungagung, Volume 05, Nomor 01, Juni 2017: 014-032, hal 24-25

biaya operasional pendidikan, karena kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS.

Tugas jangka pendek Kabinet Reformasi yang paling pokok adalah bagaimana menjaga agar tingkat partisipasi pendidikan masyarakat tetap tinggi dan tidak banyak yang mengalami putus sekolah. Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan, beban pemerintah menjadi sangat berat. Sehingga terpaksa harus memangkas program termasuk didalamnya program penyetaraan guru-guru dan mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. Sekolah sendiri mengalami masalah berat sehubungan dengan naiknya biaya operasional di suatu pihak dan makin menurunnya jumlah masukan dari siswa. Pembangunan di bidang pendidikan pun mengalami Kemunduran.²²¹

3. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan islam.

Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur,

²²¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hal.58

sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan adanya anggaran pendidikan ini, dunia pendidikan saat ini mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan pendidikan sebelumnya, termasuk pendidikan Islam.

Penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN), sekolah bertaraf internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional. Untuk keperluan ini, maka pemerintah melakukan pemetaan terhadap kondisi objektif lembaga pendidikan yang layak untuk ditetapkan sebagai yang bertaraf nasional dan yang bertaraf internasional. Untuk keperluan ini, Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan sebuah direktorat peningkatan mutu pendidikan.

4. Kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Program ini terkait dengan program peningkatan mutu yang bertolak dari peningkatan mutu tenaga guru dan dosen sebagai

tenaga profesional. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen.

5. Kebijakan Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006).

Bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menggagas kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

KBK lahir di tengah-tengah adanya tuntutan mutu pendidikan di Indonesia. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa mutu pendidikan di Indonesia semakin hari semakin terpuruk. Pendidikan di Indonesia dianggap hanya melahirkan lulusan yang akan menjadi beban negara dan masyarakat, karena kurang ditunjang dengan kompetensi yang memadai ketika terjun dalam masyarakat. Dalam KBK, peserta didik diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.²²²

KBK di gagas ketika Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar M.sc. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam KBK adalah:

²²² Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta: Buletin LPMP DKI Jakarta, Nomor 3 Mei 2005), Volume 2, hal. 9

- a. Bersifat *Competency Based Curriculum*
- b. Penyebutan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menjadi SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi SMA (Sekolah Menengah Atas)
- c. Program pengajaran Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) disusun dalam 8 mata pelajaran
- d. Program pengajaran SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) disusun dalam 12 mata pelajaran
- e. Program pengajaran SMA/Madrasah Aliyah disusun dalam 17 mata pelajaran.

KBK meskipun sudah diujicobakan di beberapa sekolah melalui *pilot project*, tetapi pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional belum mengesahkan kurikulum ini secara formal, karena uji coba kurikulum ini menuai kritik dari berbagai kalangan, baik para ahli pendidikan maupun praktisi pendidikan. Melalui kebijakan pemerintah, KBK mengalami revisi, dengan dikeluarkannya Permendiknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas Nomor 24 tentang pelaksanaan kedua Permendiknas di atas. Ketiga Permendiknas tersebut dikeluarkan pada tahun 2006. Dengan dikeluarkannya ketiga Permendiknas tersebut seakan menjawab ketidakjelasan nasib KBK yang selama ini sudah diterapkan di beberapa sekolah, baik melalui *pilot project* atau swadaya dari sekolah tersebut. Keterandalan dan keunggulan kurikulum ini pun

masih perlu diuji di lapangan dan waktu yang akan menjawabnya.²²³

Melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran (*subjek matter*) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, menjawab pertanyaan, melaksanakan tugas, memecahkan masalah, dan menganalisis.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan revisi dan pengembangan dari KBK. KTSP lahir karena dianggap KBK masih sarat dengan beban belajar dan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru, dan komite sekolah) diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, seperti membuat indikator, silabus dan beberapa komponen kurikulum lainnya. KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara kurikulum tingkat satuan pendidikan individual maupun klasikal. Peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat yang pada

²²³ Ibid., hal 112

akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri. KTSP juga berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sementara itu sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif dan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BNSP. BNSP merekomendasikan kepada Depdiknas untuk mengurangi beban belajar sekitar 10%. Untuk SD/MI kelas I-III satu jam pelajaran 35 menit, dengan jumlah jam pelajaran 577-709 per tahun. Sementara itu, untuk kelas IV-VI SD/MI setahun berkisar 675-754 jam. Untuk SMP/MTs kelas VII-IX satu jam pelajaran 40 menit, dengan jumlah jam pelajaran per tahun 771-861. Sementara itu, SMA/MA kelas X-XII satu jam pelajaran 45 menit dengan jumlah jam pelajaran 969-1.083 jam.

6. Kebijakan pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (*teacher centred*) melalui kegiatan teaching, melainkan juga berpusat pada murid (*student centris*) melalui kegiatan learning (belajar) dan *research* (meneliti) dalam suasana yang partisipatif,

inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).

7. Kebijakan penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan (*to give good service and satisfaction for all customers*) sebagaimana yang terdapat pada konsep *Total Quality Management* (TQM). Berkaitan dengan ini, maka di zaman era Reformasi ini telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi:
 - a. Standar isi (kurikulum)
 - b. Standar mutu lulusan
 - c. Standar proses pembelajaran
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Standar pengelolaan
 - f. Standar sarana prasarana
 - g. Standar pembiayaan
 - h. Standar penilaian.²²⁴
8. Kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini maka, maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah) ini, selain para siswa memperoleh pelajaran umum seperti SD, SMP, dan SMU. Namun demikian, harus diakui bahwa di antara madrasah tersebut masih banyak yang memiliki berbagai kekurangan

²²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

dan kelemahan, sebagaimana hal ini juga terdapat pada sekolah umum. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.²²⁵

DAFTAR PUSTAKA

Agama , Departemen RI. 1984/1985. *Nama Dan Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama.

Ali, Abdullah dan Mustofa. 1998. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Arief, A. 2005. *Reformulasi Pendidikan Islam*. Jakarta: CRSD Press.

Azra, A. 2002. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Ikhwan Afiful. 2017. *Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi*. Jurnal Edukasi STAI

²²⁵ Ach. Syaiful, “Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi”, Jurnal AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2 No. 1 2018, hal 144-147

Muhammadiyah Tulungagung, Volume 05, Nomor
01

Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta:
Radja Grafindo Persada

Mas'ud, Abdurrahman. 2013. *Politics of The Nation and
Madrasah's Policy, Paper The Second International
Symposium Empowering Madrasah In The Global
Context*. Jakarta : tp.

Kunandar. 2005. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan
Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta:
Buletin LPMP DKI Jakarta, Nomor 3

Muliawan Jasa Ungguh. 2005. *Pendidikan Islam Integratif;
Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan
Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nata, Abuddin. 2006. *Modernisasi Pendidikan Islam di
Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Nata Abuddin. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta:
Kencana

Nata Abuddin . 2001. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta:
Logos Wacana Ilmu

Ramayulis. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam
Mulia

- Romli, Nuryanis. 2003. *Pendidikan Luar Sekolah, Kontribusi Ditpenamas Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- Sirozi, M. 2010. *Peran Politik Islam di Masa Orde Baru; Studi Terhadap Perumusan Sistem Pendidikan Nasional 1989*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Syaiful, Ach.2018. "Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi", *Jurnal AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2 No. 1
- Sya'adah, A., dkk. 2019. *Sejarah Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 8, No. 1.
- Tilaar, H. A. R. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.

BAB 10

SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH PADA MASA MODERN

Lilis Mulyawati
NIM: 5320003

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. Kebijakan Pemerintah pada Masa Modern

Masa modern dimulai sejak awal pemerintahan presiden Joko Widodo dengan wakil presiden Jusuf Kalla. Ir. H. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini, Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan 2019 hingga 2024 mendatang.

Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan negara-negara lain. Program prioritas tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, sejak awal masa jabatannya,

Joko Widodo juga mengupayakan reformasi agraria dengan salah satunya melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketiadaan sertifikat.

Pada deklarasi relawan Jokowi-JK di Bogor, Juni 2014, presiden Joko Widodo mengatakan siap menganggarkan dan menargetkan alokasi biaya pendidikan untuk madrasah diniyah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, semua pendidikan harus dilayani dan dibiayai oleh pemerintah. Sebulan kemudian, saat konferensi pers program nyata Jokowi-JK di Bandung, Jokowi berkomitmen untuk menjalankan sembilan program nyata, salah satunya meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sementara wakil presiden Jusuf Kalla saat berbicara pada silaturahmi dan halal bihalal Muslimat NU se-Jatim di Malang, September 2014, berjanji tidak akan membedakan antara pendidikan atau sekolah umum dan madrasah. Perbaikan struktur serta infrastruktur pendidikan menjadi perhatian pemerintah.

Janji Presiden Joko Widodo meningkatkan mutu madrasah ataupun pesantren mulai dipertanyakan banyak kalangan. Sebab, selama dua tahun lebih janji terucap, masih banyak aspek peningkatan mutu pesantren madrasah yang malah belum terjamah. Ekspektasi yang besar selama ini terhadap janji peningkatan mutu tidak akan bisa terwujud, bila pemikiran para pengambil kebijakan masih tradisional. Hal itu tentu akan semakin membuat pesantren dan

madrasah semakin berat berkompetisi, terlebih dari aspek kemajuan pendidikan jika dibandingkan lembaga pendidikan lain.

Menurut Ali yang berasal dari fraksi PAN menyebutkan terdapat enam aspek penting yang perlu diperhatikan apabila pemerintah serius ingin meningkatkan mutu pesantren dan madrasah. *Pertama*, dari aspek kelembagaan yang selama ini belum maksimal. *Kedua* adalah konsep, konsep memang harus dipikirkan matang-matang, terutama terkait apa yang hendak dituju dengan keberadaan pesantren dan madrasah. *Ketiga*, sarana serta prasarana harus mampu mendukung kebutuhan dan keberadaan pesantren dan madrasah, yang bertugas melanjutkan dakwah dan mencari pasar kerja. *Keempat*, ketersediaan tenaga kependidikan, baik tenaga pengunjung maupun tenaga inti, yaitu pengajar atau guru. Pendidik memerlukan sertifikasi dan pemerintah harus mampu menyediakannya. Tujuannya agar kualitas pengajar dan guru dapat benar-benar terukur dan terstruktur. *Kelima*, anggaran yang dialokasikan pemerintah. *Keenam*, perhatian pemerintah atas kesejahteraan guru, terutama di lembaga pendidikan swasta. Karena beberapa tahun terakhir, kesejahteraan malah dirasa menurun.

Guru Besar UIN Jakarta Amany B Umar Lubis menjelaskan, walau Presiden Jokowi menjanjikan perbaikan, ada sekitar 17 ribu madrasah yang belum diakreditasi menjadi indikasi masalah bersama. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, madrasah yang melakukan akreditasi harus memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Hal tersebut jelas butuh dana

besar. Selama dana kurang, kualitas madrasah tidak akan membaik. Dua tahun ini, Amany menyatakan, sudah banyak yang dilakukan Kemenag, terutama perbaikan alokasi dana untuk fisik madrasah melalui Kemenag. Yang belum adalah perbaikan honor dan insentif sertifikasi guru madrasah, yang masih ada perbedaan signifikan antara honor guru agama di kota besar dan daerah. Kualitas madrasah juga terlihat bedanya, baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, saat ini terdapat 76.551 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Perinciannya untuk jenjang pendidikan anak usia dini, Kemenag membina 26.098 raudlatul athfal (RA), sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdapat 50.453 madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA). Akreditasi RA belum menjadi prioritas karena lembaga akreditasinya, yaitu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini/Non Formal atau BAN PAUD/NF, baru terbentuk tahun lalu. Sementara dari total 50.453 madrasah, sebanyak 33.347 madrasah sudah terakreditasi, sedangkan sisanya sebanyak 17.106 madrasah belum terakreditasi. Perinciannya, sebanyak 16.237 MI sudah terakreditasi, sedangkan 8.693 MI lainnya belum. Untuk jenjang MTs, 11.573 madrasah sudah terakreditasi, sedangkan 6.009 madrasah belum. Kemudian sebanyak 5.537 MA sudah terakreditasi, sedangkan 2.404 MA lainnya belum. Meskipun demikian, pada 19 Desember 2014, Presiden mengklaim, kualitas madrasah sudah mampu bersaing

dengan sekolah umum. Madrasah bukan hanya menjadi alternatif, melainkan juga pilihan utama orang tua dalam menyekolahkan anak. Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan, madrasah saat ini tidak kalah unggul dengan sekolah umum.

Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas madrasah. Salah satu cara adalah pemberian dana bantuan langsung kepada lembaga pendidikan Islam yang berprestasi. Salah satunya, kepada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta Selatan. Saat ini, MAN 4 sedang mempersiapkan masterplan pengembangan madrasah unggul guna memenuhi ekspektasi masyarakat. Menurut Kamaruddin Dirjen Pendidikan Islam, masterplan pengembangan sangat penting untuk merespons tuntutan masyarakat Jakarta, dari aspek budaya, pengembangan akademik, kebutuhan guru, desain sarana dan prasarana, serta tuntutan modernisasi dan globalisasi.²²⁶

Pada Pilpres 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla sempat memegang beberapa janji di bidang pendidikan. Salah satu program yang cukup menarik mereka di bidang pendidikan adalah pemberlakuan subsidi penuh untuk anak-anak hingga tingkat SMA yang menjadi programnya. Janji itu mereka tunjukkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain subsidi, untuk urusan pendidikan, Jokowi-JK juga sempat berjanji untuk menghapus aturan tentang Ujian

²²⁶ <https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/12/23/oimm4614-janji-jokowi-soal-madrasah-dan-pesantren-ditagih>, diakses tgl 3 juni 2021, jam 11.10

Nasional (UN). Sebab sistem UN sebelumnya memang dijadikan satu-satunya patokan tunggal untuk mengukur keberhasilan pendidikan. Ditambah perumusan kurikulum baru berbasis budi pekerti.

Jokowi-JK kemudian merumuskan sejumlah misi yang terkait dengan persoalan pendidikan. Hal itu tercantum dalam dokumen Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014. Agenda kebijakan pendidikan Jokowi-JK ini juga dirumuskan secara lebih jelas terangkum dalam ringkasan agenda pemerintahan Jokowi-JK yang disingkat sebagai Nawacita; yaitu:

Butir 5, “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program ‘Indonesia Pintar’ dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.”

Butir 6, “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional [dengan] membangun sejumlah *Science* dan *Techno Park* di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan sarana dan prasarana berteknologi maju.”

Butir 8, “Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan nasional.”

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan enam program prioritas yang merujuk pada Nawacita Kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2015-2019. Keenam program itu, yakni Program Indonesia pintar (PIP), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Zonasi Pendidikan,

Pemajuan Kebudayaan, dan Digitalisasi Sekolah. Sejumlah program bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia. Misalnya, PIP yang dirancang untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin ataupun rentan miskin agar tetap mendapatkan layanan pendidikan formal dan nonformal. Program itu tidak hanya menyasar daerah perkotaan, tetapi juga daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selanjutnya, PPK merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong peran tripusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya menumbuhkan nilai religius, nasionalisme, kemandirian, dan integritas. Kemudian, melalui kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing bangsa. Hal ini tercermin dari semakin banyak lulusan SMA yang dapat bersaing dengan lulusan serupa dari negara lain. Hal lainnya adalah program zonasi pendidikan yang dimulai sejak 2017. Program itu untuk menghilangkan kastanisasi di lingkungan pendidikan. Hingga saat ini zonasi menghasilkan sejumlah dampak seperti melahirkan perhitungan kebutuhan dan distribusi guru pada setiap zona pendidikan. Terkait bidang kebudayaan, undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan akhirnya telah disahkan. Capaian pemajuan kebudayaan ditandai dengan pelaksanaan program Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di semua provinsi.

Terakhir, program digitalisasi sekolah, ialah langkah pemerintah untuk mempersiapkan sekolah memasuki era modern. Digitalisasi sekolah secara resmi

diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada September 2019, yang ditandai dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Bicara mengenai Program Indonesia Pintar atau PIP, program ini adalah salah satu program bantuan pemerintah yang menyentuh masyarakat secara langsung. Pada awal implementasi, bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin berupa uang tunai. Dana itu untuk memenuhi kebutuhan personal yang tidak dicakup bantuan operasional sekolah (BOS). Di antaranya perlengkapan dan iuran sekolah, seragam, dan biaya transportasi dari rumah ke tempat belajar. Penerima PIP di jenjang sekolah dasar (SD) mendapat bantuan dana Rp 450 ribu per tahun, jenjang sekolah menengah pertama (SMP) Rp750 ribu per tahun, serta jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) Rp1 juta per tahun.

Pada pertengahan 2017-2018, kemudian mekanisme penyaluran dana bantuan PIP diubah. Bantuan tidak diserahkan secara langsung, tetapi disalurkan melalui kartu KIP-ATM, yakni kartu yang diterbitkan bank penyalur untuk siswa tercatat sebagai penerima bantuan. Lewat KIP-ATM tersebut, dana dapat diambil melalui anjungan tunai mandiri (ATM) terdekat. Sebuah lembaga survei nasional merilis keberhasilan PIP pada Januari 2019. Program itu menduduki peringkat kedua lantaran paling menyentuh langsung masyarakat, setelah Program Indonesia Sehat. Ke depan, target penerima PIP akan terus ditingkatkan guna memperkuat target pemerintah

khususnya dalam mempersiapkan tenaga kerja berkompeten dan memperkuat program Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam menghadapi era modern, bonus demografi jadi perhatian khusus Kabinet Kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang bersaing di pasar global. Bahkan, Presiden Joko Widodo kerap kali menegaskan urgensi peningkatan daya saing sumber daya manusia dan revitalisasi pendidikan vokasi secara terpadu untuk menyongsong bonus demografi.

Revitalisasi pendidikan vokasi diartikan lebih pada menyiapkan tenaga kerja berdaya saing, terampil, bermutu, serta relevan dengan tuntutan dunia kerja. Targetnya, Indonesia dapat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh dunia pada 2030. Soal revitalisasi pendidikan vokasi, Kemendikbud memiliki peran sangat strategis. Di antaranya melalui program revitalisasi SMK, pendidikan khusus, serta lembaga kursus dan pelatihan. Revitalisasi SMK memiliki payung hukum Instruksi Presiden Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi SMK. Kehadiran Inpres ini sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia lulusan SMK. Sebagai tindak lanjut regulasi, Kemendikbud bahkan menyusun peta jalan revitalisasi SMK. Pemenuhan kebutuhan guru produktif serta peningkatan kompetensi guru produktif dilakukan melalui program keahlian ganda. Untuk meningkatkan kompetensi guru produktif di SMK, Kemendikbud juga mendorong kepemilikan sertifikasi keahlian sesuai bidang. Terkait dengan ini, Kemendikbud bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terus mengembangkan SMK sebagai

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1). LSP-P1 ini kian meningkat dan mencapai 914 lembaga pada 2019.

Pada sisi lain, Kemendikbud memberikan bantuan pengembangan *teaching factory* di SMK. *Teaching factory* merupakan konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi barang atau jasa yang mengacu pada standar serta prosedur dunia industri. Saat ini, *teaching factory* mencapai 500 unit. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) juga kian diberdayakan. Upaya untuk meningkatkan peran LKP diwujudkan melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja serta program Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Kedua program itu bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja serta mendorong jiwa wirausaha. (Tes/S5-25).²²⁷

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti) sempat memaparkan pencapaian kinerja selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Menristekdikti Mohamad Nasir membenarkan, bahwa dalam empat tahun anggaran dialokasikan memang untuk kebutuhan beasiswa di pendidikan tingkat tinggi. Dia menyatakan adanya peningkatan jumlah penerima beasiswa Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (BIDIKMISI). "Ada peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun, yakni 2014-2018 alokasi bagi penerima

²²⁷ <https://m.indonesia.com/humaniora/266451/enam-program-pendidikan-di-nawacita-jadi-prioritas>, diakses tanggal 5 Juni 2021, pukul 17.29.

beasiswa," ujar Nasir dalam konferensi pers di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018 lalu.

Secara rinci, penerima bidik misi pada tahun 2014 sebanyak 196.408 mahasiswa. Tahun berikutnya yaitu 2015 bertambah menjadi 258.015 mahasiswa. Kemudian di 2016 ada 305.205 mahasiswa. Sementara tahun 2017 sebanyak 339.348 mahasiswa.

"Adapun untuk tahun 2018, hingga kuartal III-2018 sudah sebanyak 302.764 mahasiswa yang menerima. Ini dari target yang ditetapkan sebanyak 368.961 mahasiswa," ungkapnya. Sementara untuk, beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua dan 3T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar) pada tahun 2014 tercatat 1.673 mahasiswa, 2015 sebanyak 2.151 mahasiswa, 2016 sebanyak 2.746 mahasiswa, serta di 2018 sebanyak 3.468 mahasiswa. Adapun untuk di tahun 2018, hingga kuartal III penerima sebanyak 4.715 mahasiswa dari target sebanyak 5.437 penerima. Meski begitu, anggaran untuk Kemenristekdikti masih jauh di bawah Kementerian Pertahanan, PUPR, Agama, Kesehatan, Perhubungan, dan Sosial. Adapun untuk alokasi dana pendidikan dalam APBN 2018 diberikan sebanyak Rp 444,1 triliun atau sebanyak 20% dari total anggaran belanja. Sebanyak 149,7 triliun untuk pusat, untuk transfer ke daerah sebesar Rp 279,5 triliun, serta Rp15 triliun untuk pembiayaan.

Selama kepemimpinan Jokowi-JK, ada beberapa kebijakan di bidang pendidikan yang mendapatkan kritikan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Setidaknya ada tiga kebijakan yang menjadi sorotan, yaitu sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi, kebijakan Penguatan Pendidikan

Karakter (PPK), serta kebijakan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan Salim menuturkan, kebijakan sistem PPDB *online* dengan zonasi menuai banyak masalah, terutama di daerah kabupaten/kota yang minim sekolah negerinya. Satriawan mengatakan, akibat sistem PPDB *online* dengan zonasi, banyak anak di Gresik yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri. Kemudian kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) yang dilahirkan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 juga tak luput dari catatan kritis FSGI. Menurut Satriawan, kebijakan PPK ini sulit diimplementasikan oleh para guru. Dari pantauannya, hampir di seluruh sekolah unggulan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat saja, tak mampu membagikan rapor sesuai jadwal yang ditetapkan. Sedangkan untuk kebijakan Kurikulum 2013 untuk SMK, ada dampak berupa perubahan kode mata pelajaran. Di mana hal itu mengakibatkan kacaunya penerimaan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Contohnya, kata Satriawan, di Tasikmalaya banyak guru dan Kepala Sekolah SMK hanya mendapat satu bulan TPP, yang seharusnya mendapat enam bulan TPP.²²⁸

Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama Bidang Pendidikan 2015-2019 adalah:

²²⁸ <https://asumsi.co./post/kinerja-pemerintahan-jokowi-di-bidang-pendidikan-bagaimana-janji-dan-capaiannya>. Diakses tanggal 5 Juni 2021, pukul 15.29.

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - b. Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas;
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
 - d. Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan
 - e. penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku.
2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - a. Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.
 - b. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.
 - c. Meningkatkan mutu peserta didik.
 - d. Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan.
 - e. Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya.
 - f. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
 - a. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan.

- c. Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan.
 - d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan.
4. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
- a. Peningkatan akses pendidikan keagamaan.
 - b. Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan.
 - c. Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan.
 - d. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan.
 - e. Peningkatan penjaminan mutu kelembagaan pendidikan keagamaan.
 - f. Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
- a. Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama.
 - b. Meningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama.
 - c. Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama.
6. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- a. Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan

pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;

- b. Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
- c. Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
- d. Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
- e. Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
- f. Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- g. Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan
- h. Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

B. Strategi Pendidikan Islam

Berdasarkan arah kebijakan maka strategi Pendidikan Islam pada lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dilaksanakan melalui 5 kegiatan prioritas, yaitu:

1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah guna memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur, maka strategi Pendidikan Agama Islam diprioritaskan pada peningkatan mutu guru dan pengawas PAI serta pemahaman siswa terhadap ajaran Islam dan peningkatan mutu sumber daya dan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar.

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

a. Strategi dalam meningkatkan mutu guru dan pengawas PAI berupa:

- 1) Pemberian tunjangan profesi kepada guru PAI non PNS,
- 2) Peningkatan kualifikasi S1,
- 3) Peningkatan kompetensi (khususnya kompetensi pedagogis),
- 4) Pemberian kesempatan untuk mengikuti program visiting teacher (guru tamu) bagi guru PAI yang berprestasi,
- 5) Pemberian kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru,
- 6) Pemberian kesempatan untuk mengikuti lomba pengembangan pembelajaran bagi guru PAI,

- 7) Peningkatan kompetensi pengawas, peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas,
 - 8) Pemberian kesempatan mengikuti bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas PAI.
 - 9) Distribusi dan penempatan guru PAI.
- b. Strategi dalam meningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam berupa pemberian kesempatan bagi siswa untuk mengikuti pelatihan Tuntas Baca Tulis Qur'an (TBTQ), mengikuti lomba kreatifitas PAI, penyelenggaraan USBN PAI, serta perluasan materi pengembangan PAI berwawasan kebangsaan.
 - c. Strategi dalam meningkatkan mutu sumber daya dan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar pada sekolah berupa peningkatan kapasitas lembaga pokjawas, adanya lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI, pengembangan KKG dan MGMP serta pemberian bantuan saran/media pembelajaran PAI.
2. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam;

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun secara merata serta meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas, maka strategi Pendidikan Keagamaan Islam diprioritaskan pada peningkatan akses, mutu sarana dan prasarana pendidikan, mutu santri, mutu pendidik dan tenaga kependidikan,

penjaminan mutu (quality assurance) serta pembelajaran Islam yang moderat pada pendidikan keagamaan Islam.

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

- a. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
 - 1) Pendirian satuan pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren / ma'had aly baru.
 - 2) Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah/program persamaan lulusan/ program wajar dikdas tingkat ula, wustha, ulya, paket A, paket B, serta Paket C.
 - 3) Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdas tingkat ula, wustha, ulya, paket A, paket B, Paket C, dan santri hanya mengaji (takhassus kitab) usia 6 sampai 21 tahun.
 - 4) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada Diniyah Takmiliah/ Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren.
 - 5) Pemberian bantuan Bidikmisi bagi mahasantri di ma'had aly.
 - 6) Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had

aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C.

- 7) Pembangunan asrama pondok pesantren.
 - 8) Pembangunan lembaga pendidikan keagamaan baru dan pemberian dukungan pengembangan/peningkatan mutu, sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
 - 9) Pemberian layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) kepada santri.
- b. Strategi dalam meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
- 1) Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/ Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C.
 - 2) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren.
 - 3) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan Islam.
 - 4) Peningkatan mutu Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren.
 - 5) Penyediaan kitab/buku ajar yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
 - 6) Peningkatan mutu lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan.

- 7) Pemberian dukungan pengembangan hidup sehat dan peningkatan mutu layanan kesehatan.
 - 8) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - 9) Pengembangan pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan vokasional/keterampilan.
 - 10) Pembinaan lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliah, pendidikan al Qur`an.
- c. Strategi dalam meningkatkan mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
- 1) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfidz Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
 - 2) Mengikutsertakan santri dalam Musabaqah Qira`atil Kutub (MQK).
 - 3) Pemberian beasiswa santri berprestasi (Program Beasiswa Santri Berprestasi).
 - 4) Pemberian dukungan pembiayaan Pemagangan Santri Pondok pesantren.
 - 5) Mengikutsertakan santri dalam Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN).
 - 6) Mengikutsertakan santri dalam Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS).
 - 7) Pemberian beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

- d. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan Islam berupa:
- 1) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, Paket C, dan Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren.
 - 2) Mengikutsertakan pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren pada Pendidikan Profesi Guru.
 - 3) Pemberian tunjangan fungsional kepada pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma`had aly/program persamaan lulusan/program wajar dikdas/paket.
 - 4) Pemberian tunjangan profesi kepada pendidik pada pendidikan diniyah formal/ satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma`had aly.
 - 5) Pemberian tunjangan fungsional kepada pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/ Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren.
 - 6) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren.
 - 7) Pemberian beasiswa Beasiswa Pendidikan Kader Ulama kepada pendidik.

- e. Strategi dalam meningkatkan jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
- 1) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan Islam.
 - 2) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan Islam.
 - 3) Penyusunan regulasi pendidikan keagamaan Islam.
 - 4) Penyediaan Data Pendidikan Keagamaan Islam.
 - 5) Penyediaan paket peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam.
 - 6) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll).
 - 7) Penyelenggaraan Bahtsul Ma`sal/Halaqoh pada lembaga pendidikan keagamaan.
 - 8) Penyelenggaraan layanan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja (life skill) pada lembaga pendidikan keagamaan.
 - 9) Penyusunan Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam.
- f. Strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren berupa:
- 1) Penyelenggaraan Tahqiq atas Kitab Karya Ulama Nusantara.

- 2) Sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawasuth), dan cinta tanah air.
 - 3) Penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
3. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;
- Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Kementerian Agama untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun secara merata, maka strategi RA dan Madrasah diprioritaskan pada peningkatan akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan, dan kurikulum pembelajaran madrasah. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:
- a. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan madrasah berupa:
 - 1) Pemberian Biaya Operasional Pendidikan untuk tingkat RA.
 - 2) Pemberian dana BOS untuk MI, MTs dan MA/MAK.
 - 3) Pemberian bantuan dan sosialisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI, MTs dan MA/MAK.
 - 4) Pembangunan ruang kelas baru RA.
 - 5) Pembangunan ruang kelas MI, MTs, dan MA/MAK
 - 6) Pembangunan MTs di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terpencil).
 - 7) Pembangunan MI-MTs satu atap.
 - 8) Pembangunan MA dan MAK.

- b. Strategi dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah berupa:
- 1) Pemberian bantuan sarana dan prasarana pembelajaran kepada RA.
 - 2) Rehabilitasi ruang kelas RA.
 - 3) Rehabilitasi sedang dan berat MI, MTs, MA dan MAK.
 - 4) Pembangunan perpustakaan MI, MTs, MA dan MAK.
 - 5) Meningkatkan standar UKS MI, MTs, MA dan MAK.
 - 6) Kelengkapan sarana dan prasarana MI, MTs, MA dan MAK antara lain sarana olah-raga dan seni, sarana laboratorium sains, perpustakaan, dan meubelair.
 - 7) Pembangunan asrama MTs, MA dan MAK.
 - 8) Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium MTs, MA dan MAK.
 - 9) Pembangunan dan pengembangan MA/MAK berasrama.
 - 10) Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium bahasa MA/MAK.
 - 11) Pembangunan dan pengadaan laboratorium komputer MA/MAK.
 - 12) Pengembangan MA unggulan (Insan Cendekia).
 - 13) Penyiapan MTs dan MA menjadi madrasah unggulan.
- c. Strategi dalam meningkatkan mutu siswa madrasah berupa:
- 1) Pengikutsertaan siswa RA dalam lomba / kompetisi.

- 2) Pemberian beasiswa bakat dan berprestasi pada siswa MI, MTs, MA dan MAK.
 - 3) Pengikutsertaan siswa MI, MTs, MA dan MAK dalam lomba/festival/kompetisi/ olimpiade nasional dan/atau internasional.
 - 4) Pemberian fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi siswa MA/MAK yang berprestasi.
 - 5) Pengikutsertaan siswa MI, MTs, MA pada UAMBN PAI dan Bahasa Arab.
 - 6) Pengikutsertaan siswa MI, MI, MTs, MA pada UN.
 - 7) Pengikut Serta siswa MA pada program pemagangan di Dunia Usaha/Dunia Industri.
- d. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan madrasah berupa:
- 1) Peningkatan kompetensi Guru/Kepala RA.
 - 2) Peningkatan kompetensi PTK, MI, MTs, MA dan MAK.
 - 3) Peningkatan kualifikasi S1 guru madrasah.
 - 4) Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus kepada PTK non-PNS.
 - 5) Pengikutsertaan guru Madrasah pada Pendidikan Profesi Guru.
 - 6) Sertifikasi guru madrasah mapel umum
 - 7) Penilaian kinerja guru.
 - 8) Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi PTK (Guru, Calon Kepala Madrasah, dan Calon Pengawas).
 - 9) Peningkatan kompetensi PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi.

- 10) Pemberian penghargaan dan perlindungan kepada PTK madrasah.
 - 11) Pembinaan kewirausahaan bagi guru MA.
 - 12) Penyiapan guru untuk menjadi Kepala Madrasah.
- e. Strategi dalam meningkatkan jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan madrasah berupa:
- 1) Penyiapan RA, MI, MTs, MA dan MAK untuk ditingkatkan mutu akreditasinya.
 - 2) Penyiapan RA, MI menjadi madrasah unggulan.
 - 3) Peningkatan mutu manajemen RA.
 - 4) Peningkatan kualitas ekstra kurikuler MI, MTs, MA dan MAK.
 - 5) Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) bagi MI, MTs, MA dan MAK.
 - 6) Pemberdayaan KKM dan KKG MI.
 - 7) Jumlah KKG MI
 - 8) Penguatan riset pembelajaran pada MI, MTs dan MA.
 - 9) Pemberdayaan KKM dan MGMP MTs, MA dan MAK.
 - 10) Penyelenggaraan program keterampilan pada MA.
 - 11) Penyelenggaraan program keagamaan pada MA.
 - 12) Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada madrasah.
 - 13) Peningkatan kualitas madrasah daerah tertinggal/perbatasan/ pedalaman.
 - 14) Pemberian apresiasi kepada RA/Madrasah.

- 15) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah.
 - 16) Pemberdayaan Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) di Provinsi.
 - 17) Publikasi Kreatif tentang Pendidikan Madrasah
 - 18) Penyusunan peraturan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang bermutu, termasuk madrasah berasrama, madrasah unggulan, dan pengelolaan asrama pada madrasah berasrama.
 - 19) Kerjasama antara perguruan tinggi dan madrasah dan dengan lembaga internasional untuk pendidikan madrasah yang bermutu.
 - 20) Pelaksanaan kesetaraan gender pada RA/Madrasah.
- f. Strategi dalam meningkatkan mutu kurikulum pembelajaran madrasah berupa:
- 1) Penyiapan pengembangan kurikulum RA.
 - 2) Penerapan kurikulum pada MI, MTs, MA dan MAK.
 - 3) Penggandaan buku PAI dan Bahasa Arab sesuai kurikulum yang berlaku.
 - 4) Pelatihan kurikulum yang berlaku bagi PTK.
 - 5) Pendampingan oleh madrasah tentang pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
4. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
- Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi khususnya PTKI, maka strategi Pendidikan Tinggi Islam diprioritaskan pada

peningkatan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI, peningkatan kualitas hasil penelitian/riset PTKI dan peningkatan hasil inovasi pada PTKI.

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

a. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:

- 1) Pelaksanaan program BIDIKMISI bagi mahasiswa baik untuk mahasiswa baru, on-going 2 semester dan on-going 1 semester.
- 2) Pelaksanaan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B bagi mahasiswa.
- 3) Pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
- 4) Pemberian beasiswa Tahfidz Qur`an.
- 5) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa berprestasi lulusan S1 (fresh graduate) untuk melanjutkan pendidikan S2.
- 6) Pemberian beasiswa pada prodi langka yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- 7) Penyeleksian mahasiswa baru.
- 8) Peningkatan PTKIN penerima BOPTN.
- 9) Pendirian PTKI baru.
- 10) Pengembangan lembaga PTKI melalui alih status.

b. Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:

- 1) Peningkatan mutu gedung pendidikan dan fasilitas penunjang PTKIN.

- 2) Pemberian fasilitas P/HLN dan dana pendamping bagi PTKIN.
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana PTKIN melalui SBSN.
 - 4) Peningkatan koleksi dan prasarana perpustakaan.
 - 5) Peningkatan mutu akademik PTKIN.
 - 6) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan PTKI.
 - 7) Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta akademik PTKIS.
 - 8) Penerbitan regulasi yang terkait dengan PTKI.
 - 9) Pengikutsertaan PTKI pada program Standar manajemen Nasional dan Internasional.
 - 10) Mendorong penyelenggaraan *entrepreneurship* pada beberapa lembaga.
 - 11) Peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan.
 - 12) Pemberian PNPB/BLU bagi PTKIN/BLU
 - 13) Mengadakan kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI
 - 14) Penguatan kekhasan sebagai pusat keunggulan pada setiap PTKI.
 - 15) Penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains bagi PTKI.
 - 16) Pembinaan bagi kopertais.
 - 17) Penguatan kelembagaan LPTK.
- c. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI berupa:
- 1) Sertifikasi dosen.
 - 2) Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non PNS.

- 3) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - 4) Peningkatan kompetensi dosen.
 - 5) Pemberian fasilitas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
 - 6) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.
 - 7) Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presentasi makalah AICIS.
 - 8) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
 - 9) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2
 - 10) Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui LPTK
- d. Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa:
- 1) Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI.
 - 2) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional.
 - 3) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus).
 - 4) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
 - 5) Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI.
 - 6) Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam rahmatan lil `alamin.
 - 7) Peningkatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKI.
- e. Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa:

- 1) Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi.
 - 2) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.
 - 3) Peningkatan pemahaman tentang konsep, pendekatan dan metodologi pengembangan masyarakat partisipatoris sejalan perkembangan ilmu dan penerapannya untuk mengamalkan ilmu bagi pembangunan masyarakat dan pembangunan lokal (daerah) serta mengembangkan keilmuan (PMA No.55/2014).
 - 4) Peningkatan kemampuan penanganan konflik dalam masyarakat untuk mewujudkan Islam rahmatan lil `alamin.
5. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Tata kelola pemerintahan yang baik isu strategis dalam pengelolaan administrasi publik. Fungsi utama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Ketiga fungsi tersebut merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui efisiensi proses pelayanan dan pengendalian mutu yang didukung dengan regulasi dan struktur organisasi yang kuat. Peningkatan kualitas kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring & evaluasi yang diikuti dengan tindakan perbaikan memerlukan dukungan

data dan sistem informasi Pendidikan Islam yang akurat.

Monitoring dan evaluasi Renstra bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala. Sinkronisasi antara keempat langkah tersebut merupakan keniscayaan agar target pembangunan Islam yang dinyatakan dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. Beberapa indikator target dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya adalah:

- a. Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan dan Penganggaran
- b. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Evaluasi Program
- c. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan Islam
- d. Meningkatnya Kualitas Verifikasi Anggaran
- e. Meningkatnya Kualitas Pelaksana Anggaran
- f. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan
- g. Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian
- h. Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tatalaksana
- i. Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerjasama
- j. Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan Kearsipan

- k. Meningkatkan Kualitas Layanan Perkantoran dan Kehumasan
- l. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ²²⁹

C. Sistem Pendidikan Madrasah pada Masa Modern

Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan Nasional. Sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia ditetapkan selama 9 tahun, meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar dan 3 tahun untuk sekolah menengah. Namun, kini telah ditingkatkan hingga 12 tahun yang meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas.

Pendidikan menjadi sektor yang amat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Untuk itu penting memilih hunian yang dekat sarana pendidikan agar memudahkan proses belajar mengajar. Sistem pendidikan Nasional bertujuan untuk mendidik dan memberikan pengetahuan secara akademis, keterampilan, hingga perilaku. Terdapat beberapa sistem pendidikan di Indonesia yang telah diberlakukan, yang mana telah memberikan dampak bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sistem pendidikan tersebut meliputi:

²²⁹ <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=stategipendis>, diakses tanggal 5 Juni 2021, pukul 17.32

1. Sistem Pendidikan di Indonesia dengan Orientasi Nilai

Sistem ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi tanggung jawab, tenggang rasa, kejujuran, dan kedisiplinan. Sistem ini diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Pengaplikasian sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai dapat dilihat dari pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN).

2. Sistem Pendidikan di Indonesia dengan Sistem Terbuka

Melalui sistem ini diharapkan peserta didik dapat bekerja sama dengan teman sekelas dengan mendemonstrasikan nilai inovasi dan kreativitas. Melalui sistem terbuka, peserta didik menjadi fokus utama. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, inisiatif, dan bertanggung jawab dalam mengatur proses belajar mengajarnya sendiri.

3. Sistem Pendidikan di Indonesia Secara Beragam

Sistem ini dibentuk untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia terdiri dari suku, bahasa, budaya yang berbeda-beda. Dengan landasan tersebut, sistem pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pada suatu komunitas. Melalui sistem ini pula, terdapat

jenis instansi pendidikan yang beragam. Mulai dari pendidikan formal, informal, dan non-formal.²³⁰

Era modern memiliki tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan. Syarat maju dan berkembang lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi, dan dapat berkolaborasi. Jika tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi, maka akan tertinggal jauh ke belakang. Namun jika sebaliknya, lembaga pendidikan akan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan cita-cita bangsa yaitu membelajarkan manusia. Menjadikan manusia pembelajar bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman.

Di era modern ini, sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta didik memiliki keterampilan yang mampu berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Juga keterampilan mencari, mengelola dan menyampaikan informasi serta terampil menggunakan informasi dan teknologi sangat dibutuhkan (Lihat, Eko Risdianto, 2019 : 4). Di era modern ini lembaga pendidikan tidak hanya membutuhkan literasi lama yaitu membaca, menulis, dan menghitung, akan tetapi juga membutuhkan literasi baru. Literasi baru yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dapat dibagi tiga yaitu: *Pertama*, literasi data. Literasi ini merupakan

²³⁰ <http://www.rumah.com/panduan.properti/pendidikan-di-indonesia-33286>, diakses tanggal 7 Juni 2021, pukul19.04

kemampuan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi (*big data*) di dunia digital. *Kedua*, literasi teknologi. Literasi ini memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*Coding Artificial Intelligence & Engineering Principles*). *Ketiga*, literasi manusia. Literasi berupa penguatan humanities, komunikasi, dan desain. Berbagai aktivitas literasi tersebut dapat dilakukan oleh siswa dan guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat berpidato pada acara Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2019 mencetuskan konsep “Pendidikan Merdeka Belajar”. Konsep ini merupakan respons terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era modern. Nadiem Makarim menyebutkan merdeka belajar merupakan kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berpikir ditentukan oleh guru (Tempo.co, 2019). Jadi kunci utama menunjang sistem pendidikan yang baru adalah guru. Nadiem Makarim (2019) mengatakan guru tugasnya mulia dan dan sulit. Dalam sistem pendidikan nasional guru ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa namun terlalu diberikan aturan dibandingkan pertolongan. Guru ingin membantu murid untuk mengejar ketertinggalan di kelas, tetapi waktu habis untuk mengerjakan administrasi tanpa manfaat yang jelas. Guru mengetahui potensi siswa tidak dapat diukur dari hasil ujian, namun guru di kejar oleh angka yang didesak oleh berbagai pemangku kepentingan. Guru ingin mengajak murid ke luar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu pada menutup peluang. Guru Sangat frustrasi bahwa di dunia nyata bahwa kemampuan

berkarya dan berkolaborasi menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Guru mengetahui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Guru ingin setiap murid terinspirasi, tetapi guru tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi (Nadiem Makarim dalam Kemendikbud.go.id, 2019).

R. Suyanto Kusumaryono (2019) menilai bahwa konsep “Merdeka Belajar” yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim dapat ditarik beberapa poin (R. Suyanto Kusumaryono dalam Kemendikbud.go.id, 2019). *Pertama*, konsep “Merdeka Belajar” merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. *Kedua*, guru dikurangi bebannya dalam melaksanakan profesinya, melalui keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar siswa dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian, merdeka dari berbagai pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari berbagai tekanan intimidasi, kriminalisasi, atau mempolitisasi guru. *Ketiga*, membuka mata kita untuk mengetahui lebih banyak kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas pembelajaran di sekolah, mulai dari permasalahan penerimaan peserta didik baru (input), administrasi guru dalam persiapan mengajar termasuk RPP, proses pembelajaran, serta masalah evaluasi seperti USBN-UN (output). *Keempat*, guru yang sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran, maka menjadi penting untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih *happy* di dalam kelas, melalui sebuah kebijakan

pendidikan yang nantinya akan berguna bagi guru dan siswa.

Dicetuskannya konsep “Merdeka Belajar” pada saat Nadiem Makarim memberikan pidato pada acara Hari Guru Nasional (HGN) tersebut, diasumsikan tidak lagi menjadi gagasan melainkan lebih pada sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan. Kesimpulan dari konsep merdeka belajar merupakan tawaran dalam merekonstruksi sistem pendidikan nasional. Penataan ulang sistem pendidikan dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dengan cara, mengembalikan hakikat dari pendidikan yang sebenarnya yaitu pendidikan untuk memanusiakan manusia atau pendidikan yang membebaskan.

Dalam konsep merdeka belajar, antara guru dan murid merupakan subjek di dalam sistem pembelajaran. Artinya guru bukan dijadikan sumber kebenaran oleh siswa, namun guru dan siswa berkolaborasi penggerak dan mencari kebenaran. Artinya posisi guru di ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeragamkan kebenaran menurut guru, namun menggali kebenaran, daya nalar dan kritisnya murid melihat dunia dan fenomena. Peluang berkembangnya internet dan teknologi menjadi momentum kemerdekaan belajar, karena dapat meretas sistem pendidikan yang kaku atau tidak membebaskan. Termasuk mereformasi beban kerja guru dan sekolah yang terlalu dicurahkan pada hal yang administratif. Oleh sebabnya kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif dapat dilakukan oleh unit pendidikan, guru dan siswa. Saat ini antara guru dan

siswa memiliki pengalaman yang mandiri termasuk di lingkungan, dan dari pengalaman yang ada tersebut akan dikursuskan di ruang kelas dan lembaga pendidikan. Adaptasi sistem pendidikan di era modern harus distimulasi dengan proses literasi baru tersebut. Siswa/peserta didik pada era modern memiliki pengalaman yang padat dengan dunia digital atau visual saat ini. Tugas guru, kepala sekolah termasuk lembaga pendidikan dapat mengarahkan, memimpin, dan menggali daya kritis dan potensi siswanya. Dalam proses pembelajaran dibangun ekosistem pendidikan yang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya nalar, karakter, inovasi, kemandirian, kenyamanan, dan keahlian siswa. Maka merdeka belajar dapat membentuk sumber daya yang unggul atau berkualitas untuk menuntaskan peluang pendidikan pada era modern ini dengan tujuan kemajuan bangsa dan negara.²³¹

D. Kurikulum Madrasah pada Masa Modern

Pendidikan merdeka belajar merupakan respon terhadap era modern ini. Kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan ini atau lebih khusus dalam metode pembelajaran yaitu penguasaan terhadap literasi baru oleh siswa atau peserta didik. Literasi baru tersebut yaitu *Pertama*, literasi data. Literasi ini merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi (*big data*) di dunia digital. *Kedua*, literasi teknologi. Literasi ini

²³¹<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index> terakreditasi Peringkat 4 (No. SK:36/E/KPT/2019) Vol. 6. No. 1. April 2020 p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862 Jurnal Ilmiah Mandala Education 127-128

memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*Coding Artificial Intelligence & Engineering Principles*). Ketiga, literasi manusia. Literasi berupa penguatan humanities, komunikasi, dan desain. Berbagai aktivitas literasi tersebut dapat dilakukan oleh siswa dan guru. Sistem dan metode pembelajaran pada pendidikan merdeka belajar mempunyai target yang sama. Jika peserta didik atau siswa dapat menguasai literasi baru ini, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam membangun masa depan Indonesia.²³²

Selain literasi baru, sistem pendidikan di era modern ini tetap melakukan pembangunan karakter, seperti kejujuran, religius, kerja keras/tekun, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain-lain. Ada beberapa scholar yang telah meneliti sistem pembelajaran dalam merespon era modern di Indonesia. Hamidulloh Ibda dan E. Rahmadi(2018), Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti (2018), Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo (2019), Aprilia Riyana Putri dan Muhammad Alie Muzakki (2019), Eko Rusdianto (2019), Dan Delipiter Lase (2019).

Scholar di atas dapat memberikan gambaran metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam sistem pendidikan merdeka belajar. Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi (2018) menyebutkan bahwa dalam era

²³²<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index> terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019) Vol. 6. No. 1. April 2020 p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862 Jurnal Ilmiah Mandala Education 131

modern lembaga pendidikan harus mengutamakan literasi baru. Artikel yang ditulis Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi menegaskan bahwa lembaga pendidikan tidak cukup menerapkan literasi lama (membaca, menulis, berhitung), tetapi harus menerapkan literasi baru (literasi data, literasi teknologi dan literasi sumber daya manusia atau humanisme). Dengan penguatan literasi baru, guru menjadi kunci perubahan, yang didukung oleh revitalisasi kurikulum berbasis literasi dan penguatan peran guru yang memiliki kompetensi digital. Guru berperan membangun generasi berkompetensi, berkarakter, memiliki kemampuan literasi baru, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi mengatakan juga bahwa lembaga pendidikan sebagai dasar penentu kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional pada anak, harus memperkuat keterampilan literasi abad 21. Mulai aspek kreatif, pemikiran kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Lembaga pendidikan harus memperkuat literasi baru dan revitalisasi kurikulum berbasis digital. Revitalisasi kurikulum mengacu pada lima nilai dasar dari peserta didik yang baik, yaitu ketahanan, kemampuan beradaptasi, integritas, kompetensi, dan peningkatan berkelanjutan. Pendidik harus menjadi guru digital, paham komputer, dan bebas dari penyakit akademis (Lihat Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi, 2018: 1).

Artikel yang ditulis oleh Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi hasil penelitiannya di Guru Madrasah Ibtidaiyah, jadi fokusnya hanya pada lembaga pendidikan dasar Islam. Walaupun terfokus di lembaga pendidikan Islam, hasil penelitian ini

disepakati oleh semua scholar tentang tantangan dan peluang lembaga pendidikan di era modern. Eko Rusdianto (2019), Delipiter Lase (2019) juga menulis artikel tentang hal tersebut. Namun, kekurangan dalam artikel ini tidak membahas secara khusus metode pembelajaran yang harus diterapkan oleh lembaga pendidikan dan guru dalam sistem pembelajaran. Sehingga artikel ini masih secara umum.

Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti (2018) menjawab kekurangan dari riset Hamidulloh Ibda dan E Rahmadi. Mereka menawarkan model atau metode pembelajaran berbasis Blended Learning dalam era modern. Model Blended Learning merupakan penggabungan dari metode belajar yang offline (tatap muka, dan lain-lain) dengan metode pembelajaran yang online (e-learning). Secara khusus Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti menulis artikel ini secara khusus meningkatkan critical thinking. Dalam era modern ini dimana hidup manusia berorientasi pada teknologi, seperti penguasaan teknologi, dunia maya, big data, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan permasalahan di era modern lebih kompleks, dan manusia harus mampu bertahan dan mengatasi permasalahannya (Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti, 2018: 85). Namun artikel ini hanya mementingkan dimensi literasi baru yaitu literasi teknologi, data, dan manusia dalam metode pembelajaran Blended Learning. Masalah yang kompleks akan menghinggapai manusia ke depan yaitu

berkaitan dengan keterampilan dalam penguasaan teknologi, dunia maya, dan big data. Padahal masalah moral dan etika tetap menjadi masalah utama juga di era modern atau masalah dalam pembangunan critical thinking. Jadi kekurangan dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti mengesampingkan aspek atau dimensi pembangunan karakter dalam model pembelajaran. Sedangkan Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo (2019) menawarkan metode Education Mini Club (EMC) sebagai solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Metode EMC yang ditawarkan oleh Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo sebagai respon terhadap proses pembelajaran yang kurang sesuai dengan keadaan siswa yang tidak suka dengan metode pembelajaran yang monoton. Dari hasil pengamatannya di MTs Nu Ibtidaul Falah, ada peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode Education Mini Club (EMC). Data tersebut diperoleh dari hasil nilai pretest (sebelum diterapkannya metode Education Mini Club (EMC) dibandingkan dengan nilai setelah diterapkannya metode EMC ini hasil nilai yang diperoleh lebih bagus setelah diterapkannya metode EMC. Sebelum diterapkannya ada beberapa siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan pihak sekolah setelah diterapkan metode EMC ini siswa semua telah mencapai KKM (Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo, 2019 : 51). Riset yang dilakukan oleh Ayik

Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo mengamati Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dengan menggunakan metode EMC pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Dalam sistem pendidikan di era modern, murid atau peserta didik diharuskan untuk menguasai literasi baru dan mencapai pembangunan karakter. Agar dapat mencapai kesuksesan pendidikan di era modern, yang menjadi kunci utamanya adalah guru dengan terlebih dahulu untuk menguasai literasi baru. Oleh sebab itu, dalam riset ini, ketuntasan yang menjadi indikator dalam penilaian cenderung belum mensyaratkan sepenuhnya tantangan pendidikan di era modern. Dan penelitian ini sudah cukup memberikan masukan secara metodologi model dan atau metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran di modern. Terutama menjawab tantangan model pembelajaran yang terlalu monoton atau tidak adanya inovasi.

Setelah diskursus pembangunan metode pembelajaran dalam pendidikan era modern, Aprilia Riyana Putri dan Muhammad Alie Muzakki (2019) menyempurnakan dengan menawarkan media pembelajaran. Dalam metode pembelajaran, media pembelajaran membuat peserta didik (siswa/mahasiswa) akan lebih mudah memahami apa yang diterangkan oleh guru maupun dosen dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Ada berbagai macam jenis media, seperti media cetak yaitu; buku, modul, lks dan juga media elektronik yaitu; video, audio, presentasi multimedia dan juga bisa menggunakan konten daring atau online. Di setiap akhir proses pembelajaran, setiap pendidik

melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami apa yang sudah diterangkan dengan berbagai macam cara, bisa dengan memberi kuis, presentasi secara berkelompok, test tertulis dan juga menggunakan media kahoot yaitu dengan cara memasukkan soal pilihan ganda ke aplikasi kahoot yang memang menggunakan fasilitas internet agar handphone siswa bisa terkoneksi langsung untuk menjawab kuis yang disajikan oleh pendidik melalui media kahoot tersebut. Para siswa bisa melihat hasilnya secara langsung dengan urutan peringkat. Ada dua tipe dalam menggunakan kahoot yaitu klasik dan mode. Pemanfaatan media kahoot untuk menghadapi era modern dalam dunia pendidikan sesuai karena hampir semua pendidik maupun siswa bisa menggunakan media kahoot dan dalam realisasinya mereka juga menggunakan internet sebagai alat untuk mencari referensi tambahan dalam proses belajar maupun mengajar baik untuk mencari informasi materi, audio dan video pembelajaran serta memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendidikan yang tersedia secara gratis di play store yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran yang mudah dipahami dan menarik serta menyenangkan (Aprilia Riyana Putri dan Muhammad Alie Muzakki, 2019). Riset yang dilakukan oleh Aprilia Riyana Putri dan Muhammad Alie Muzakki tidak hanya menawarkan media pembelajaran. Namun kahoot tepatnya menjadi instrumen dalam metode pembelajaran. Jadi riset ini sesungguhnya menyimpulkan metode pembelajaran dalam era modern yaitu menggunakan metode E-

Learning. Walaupun tidak menyebut, e-learning secara langsung, namun aplikasi dan cara kahoot digunakan sebagai pelaksanaan metode pembelajaran e-learning (belajar online). Dari diskursus scholar, metode pembelajaran di era modern dapat menentukan kesuksesan pembelajaran. Metode yang digunakan beragam, dan dalam artikel ini pemangku kepentingan sedapat mungkin menentukan metode pembelajaran yang dapat mencapai tujuan dari sistem pendidikan merdeka belajar. Oleh sebabnya, artikel ini menjadi referensi dalam menyempurnakan sistem pendidikan merdeka belajar, yang akan dijadikan sistem pendidikan yang baru di Indonesia. Langkah pemerintah untuk meneruskan kebijakan pendidikan merdeka belajar akan merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada konsep STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics), menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Dan metode pembelajaran harus dapat merepresentasikan keberagaman yang ada di Indonesia. Agar capaian tujuan satuan pendidikan, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Jika pendidikan merdeka belajar sudah benar-benar program yang baik, maka disini dibutuhkan ketegasan dan keberanian untuk mewujudkan dan menjalankan program program tersebut dengan baik. Jangan sampai program yang sudah tersusun dengan baik namun dalam

pelaksanaannya hanya sebatas formalitas belaka (Eko Rusdianto, 2019 : 4).²³³

Ada sembilan kecenderungan terkait dengan pendidikan di era modern yaitu:

1. Belajar pada waktu dan tempat yang berbeda.
2. Pembelajaran individual.
3. Siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar.
4. Pembelajaran berbasis proyek.
5. Pengalaman lapangan.
6. Interpretasi data.
7. Penilaian beragam.
8. Keterlibatan siswa.
9. Mentoring.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *Blended Learning* merupakan metode pembelajaran yang digunakan dalam sistem pendidikan merdeka belajar. Blended learning disimpulkan juga dari berbagai riset dan perdebatan scholar dalam merespon sistem dan metode pembelajaran di era modern. Secara khusus, riset yang dilakukan oleh Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffar, Eliza Nurisma, Cucu Kurniasih, dan Caraka Putra Bhakti (2018) akan disempurnakan dalam artikel ini. Menerapkan konsep cara belajar yang aktif, inovatif, dan nyaman harus dapat mewujudkan peserta didik sesuai kebutuhan zaman. Demi tercapainya tujuan pendidikan yaitu mewujudkan

233

<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index>
terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019) Vol. 6. No. 1. April 2020
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862 Jurnal Ilmiah Mandala Education
132-133

murid atau peserta didik yang berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan berinovasi, terampil berkomunikasi dan berkolaborasi, dan berkarakter. Oleh sebab itu, dalam rencana pelaksanaan kegiatan belajar harus mampu melewati tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era modern. Guru merupakan kunci keberhasilan sistem pendidikan, oleh sebab itu harus dapat beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru agar memiliki kompetensi dan keterampilan. Penguatan literasi baru pada guru sebagai kunci perubahan, termasuk revitalisasi kurikulum berbasis literasi dan penguatan peran guru yang memiliki kompetensi digital. Maka metode Blended Learning sangat ideal sebagai metode pembelajaran di sistem pendidikan merdeka belajar. Karena antara penguasaan kompetensi literasi baru, sistem pengajaran harus tetap membangun karakter dengan mengkombinasikan metode-metode pengajaran yang konvensional, seperti tatap muka atau yang ditawarkan oleh Ayik Wulandari, Putri Handayani, dan Dody Rahayu Prasetyo (2019) yaitu metode *Education Mini Club* (EMC) sebagai respon terhadap proses pembelajaran monoton.

Blended Learning pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual (Sevima.com: 2018). *Blended learning* adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara guru dengan peserta didik atau murid. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi

pengajaran langsung (*face-to-face*) dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. *Blended learning* merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar dan gaya pembelajaran yang berbeda serta ditemukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dalam pendidikan. Sedangkan untuk keuntungan dari penggunaan *blended learning* sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung (*face-to-face*) dan pengajaran online, dan sebagai elemen dari interaksi sosial yaitu:

1. Adanya interaksi antara pengajar dan murid/peserta didik;
2. Pengajaran pun bisa secara online maupun tatap muka langsung;
3. *Blended learning* = combining instructional modalities (or delivery media);
4. *Blended learning* = combining instructional methods (Sevima.com: 2018).

Manfaat dari penggunaan *e-learning* dan juga *blended learning* dalam dunia pendidikan saat ini adalah *e-learning* memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Guru-guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pengajaran nanti tidak perlu mengadakan perjalanan menuju sekolah, *e-learning* bisa dilakukan dari mana saja baik yang memiliki akses ke Internet ataupun tidak. *E-learning* memberikan kesempatan bagi guru-guru dan siswa/peserta didik secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan tujuan pendidikan. Siswa/peserta didik bebas menentukan kapan akan mulai, kapan akan

menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dulu. Seandainya, setelah diulang masih ada hal yang belum ia pahami, pembelajar bisa menghubungi guru melalui email, chat atau ikut dialog interaktif pada waktu-waktu tertentu. Bisa juga membaca hasil pelajaran di message board yang tersedia di LMS (*Learning Management System*) yang akan dibuat dalam sistem *e-learning*. Jadi metode *Blended Learning* Akan Mempercepat terjadinya perubahan sosial dan budaya dalam sistem pendidikan. Karena metode pembelajaran ini akan memenuhi kebutuhan pada pengajaran di era modern.

Dalam metode *Blended Learning* akan transformasi pendidikan, di mana ada penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan - kebutuhan di dunia pendidikan. Seperti guru dapat berperan membangun generasi berkompentensi, berkarakter, memiliki kemampuan literasi baru, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan cara bebas berinovasi dengan para siswa, dan dapat lebih nyaman dalam sikapi hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan terhadap segala jenis pengetahuan yang didasari dengan penuh kegembiraan. Termasuk bebas dan merdeka dalam menggunakan semua media pembelajaran. Baik media cetak yaitu; buku, modul, LKS. Maupun media elektronik yaitu; video, audio, presentasi multimedia dan juga bisa menggunakan konten daring atau online. Media pembelajaran tersebut memenuhi kecenderungan pendidikan di era modern yang disebut oleh Peter Fisk. Kemudian akselerasi terhadap penuntasan kompetensi utama

dalam pembelajaran yaitu literasi baru dapat dipenuhi segera. Dalam metode *Blended Learning* tetap dapat membangun pendidikan karakter. Artinya selain, mewujudkan siswa atau peserta didik yang mampu berpikir kritis atau memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, dapat berkomunikasi dan berkolaborasi, dan berkarakter. Namun juga dapat mewujudkan siswa dan peserta didik yang jujur, religius, kerja keras/tekun, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain-lain. Singkatnya dalam metode ini, dapat mewujudkan tujuan sistem pendidikan merdeka belajar yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.²³⁴

Teori perubahan sosial, didukung oleh tren kecenderungan pendidikan pada era modern Peter Fisk. Dalam teori perubahan sosial yang paling mendasar yaitu menjelaskan peran penting manusia terhadap terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan, karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya, ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya (Nur Djazifah ER, 2012 : 3). Dengan berbekal akal-budi tersebut manusia memiliki tujuh kemampuan yang berfungsi untuk: menciptakan, mengkreasi,

234

<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index>
terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019) Vol. 6. No. 1. April 2020
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862 Jurnal Ilmiah Mandala Education
134-135

memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan segala hal dalam interaksinya dengan alam maupun manusia lainnya Herimanto dan Winarno dalam Nu Nur Djazifah ER, 2012 : 3-4).

Ketujuh kemampuan tersebut merupakan potensi yang dimiliki manusia untuk kepentingannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mempertahankan dan meningkatkan derajat kehidupannya, mengembangkan sisi Kemanusiaannya, dengan cara menciptakan kebudayaan (selanjutnya manusia juga mengkreasi, memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan) (Nur Djazifah ER, 2012 : 4).

Kebudayaan yang dihasilkan melalui akal budi manusia sering menjadi pencetus terjadinya perubahan sosial. Artinya perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan kebudayaan. Bahkan Kingsley Davis (2000) berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Adapun menurut PB Horton dan CL Hunt (1992), hampir semua perubahan besar mencakup aspek sosial budaya. Oleh karena itu dalam menggunakan istilah perubahan sosial dan perubahan budaya, perbedaan di antara keduanya tidak terlalu diperhatikan. Di samping itu, kedua istilah tersebut seringkali ditukar pakaikan; kadangkala digunakan istilah perubahan sosial - budaya (*socio cultural change*) agar dapat mencakup kedua jenis perubahan tersebut. Yang jelas perubahan - perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama yaitu kedua - duanya bersangkutan dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau

suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan - kebutuhannya (Nur Djazifah ER, 2012 : 4).

Termasuk di dalam sistem pendidikan saat ini yaitu pada era modern. Pada saat ini, sistem pendidikan membutuhkan cara-cara baru atau membutuhkan ekosistem yang baru untuk mewujudkan perbaikan masyarakat atau menunjang kebutuhan-kebutuhan seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Peter Fisk (2019) mengatakan adasembilan tren atau kecenderungan terkait dengan pendidikan 4.0 (Peter Fisk dalam Delepiter Lase, 2019 : 29-30).

Pertama, belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Siswa akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. E-learning memfasilitasi kesempatan untuk pembelajaran jarak jauh dan mandiri.

Kedua, pembelajaran individual. Siswa akan belajar dengan peralatan belajar yang adaptif dengan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa siswa pada level yang lebih tinggi ditantang dengan tugas dan pertanyaan yang lebih sulit ketika setelah melewati derajat kompetensi tertentu. Siswa yang mengalami kesulitan dengan mata pelajaran akan mendapatkan kesempatan untuk berlatih lebih banyak sampai mereka mencapai tingkat yang diperlukan. Siswa akan diperkuat secara positif selama proses belajar individu mereka. Ini dapat menghasilkan pengalaman belajar yang positif dan akan mengurangi jumlah siswa yang kehilangan kepercayaan tentang kemampuan akademik mereka. Di sini, guru akan dapat melihat

dengan jelas siswa mana yang membutuhkan bantuan di bidang mana.

Ketiga, siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar. Meskipun setiap mata pelajaran yang diajarkan bertujuan untuk tujuan yang sama, cara menuju tujuan itu dapat bervariasi bagi setiap siswa. Demikian pula dengan pengalaman belajar yang berorientasi individual, siswa akan dapat memodifikasi proses belajar mereka dengan alat yang mereka rasa perlu bagi mereka. Siswa akan belajar dengan perangkat, program dan teknik yang berbeda berdasarkan preferensi mereka sendiri. Pada tataran ini, kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (blended learning), membalikkan ruang kelas dan membawa alat belajar sendiri (bring your own device) membentuk terminologi penting dalam perubahan ini.

Empat, pembelajaran berbasis proyek. Siswa saat ini harus sudah dapat beradaptasi dengan pembelajaran berbasis proyek, demikian juga dalam hal bekerja. Ini menunjukkan bahwa mereka harus belajar bagaimana menerapkan keterampilan mereka dalam jangka pendek ke berbagai situasi. Siswa sudah harus berkenalan dengan pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah. Inilah saatnya keterampilan mengorganisasi, kolaborasi, dan manajemen waktu diajarkan kepada peserta didik untuk kemudian dapat digunakan setiap siswa dalam karir akademik mereka selanjutnya.

Lima, pengalaman lapangan. Kemajuan teknologi memungkinkan pembelajaran domain tertentu secara efektif, sehingga memberi lebih banyak ruang untuk

memperoleh keterampilan yang melibatkan pengetahuan siswa dan interaksi tatap muka. Dengan demikian, pengalaman lapangan akan diperdalam melalui kursus atau latihan-latihan. Sekolah akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk memperoleh keterampilan dunia nyata yang mewakili pekerjaan mereka. Ini menunjukkan desain kurikulum perlu memberi lebih banyak ruang bagi siswa untuk lebih banyak belajar secara langsung melalui pengalaman lapangan seperti magang, proyek dengan bimbingan dan proyek kolaborasi.

Enam, interpretasi data. Perkembangan teknologi komputer pada akhirnya mengambil alih tugas-tugas analisis yang dilakukan secara manual (matematik), dan segera menangani setiap analisis statistik, mendeskripsikan dan menganalisis data serta memprediksi tren masa depan. Oleh karena itu, interpretasi siswa terhadap data ini akan menjadi bagian yang jauh lebih penting dari kurikulum masa depan. Siswa dituntut memiliki kecakapan untuk menerapkan pengetahuan teoritis ke angka-angka, dan menggunakan keterampilan mereka untuk membuat kesimpulan berdasarkan logika dan tren data.

Tujuh, penilaian beragam. Mengukur kemampuan siswa melalui teknik penilaian konvensional seperti tanya jawab akan menjadi tidak relevan lagi atau tidak cukup. Penilaian harus berubah, pengetahuan faktual siswa dapat dinilai selama proses pembelajaran, dan penerapan pengetahuan dapat diuji saat siswa mengerjakan proyek mereka di lapangan.

Delapan, keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa dalam menentukan materi pembelajaran atau

kurikulum menjadi sangat penting. Pendapat siswa dipertimbangkan dalam mendesain dan memperbarui kurikulum. Masukan mereka membantu perancang kurikulum menghasilkan kurikulum kontemporer, mutakhir dan bernilai guna tinggi.

Sembilan , mentoring. Pendampingan atau pemberian bimbingan kepada peserta didik menjadi sangat penting untuk membangun kemandirian belajar siswa. Pendampingan menjadi dasar bagi keberhasilan siswa, sehingga menuntut guru untuk menjadi fasilitator yang akan membimbing siswa menjalani proses belajar mereka.²³⁵

E. Model Pendidikan Madrasah Pada Masa Modern

Model madrasah dalam lembaga pendidikan Islam adalah bentuk lembaga pendidikan yang muncul sebagai kelanjutan dari pendidikan pesantren yang memadukan pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah umum, dengan itu diharapkan dapat membentuk siswa yang mempunyai kemampuan agama dan pengetahuan umum. Menurut M. Ridwan Nasir, berdasarkan kurikulumnya madrasah dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: madrasah Diniyah, Madrasah SKB 3 Menteri dan madrasah pesantren. Dari ketiga jenis madrasah tersebut diuraikan yaitu:

Pertama, madrasah diniyah. madrasah diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya

²³⁵

<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index>
terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019) Vol. 6. No. 1. April 2020
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862 Jurnal Ilmiah Mandala Education
129-130

mengajarkan ilmu-ilmu agama (Diniyah). Madrasah ini dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah umum. Madrasah ini siswa-siswi sekolah dasar (4 tahun). Madrasah Diniyah Wustho untuk siswa-siswi sekolah lanjutan pertama (3 tahun). Orang tua memasukkan putra-putrinya ke madrasah ini agar putranya mendapat tambahan pendidikan agama, karena di sekolah umum dirasakan masih sangat kurang. Ijazah madrasah ini tidak memiliki civil effect, dan proses pembelajaran dilaksanakan pada sore hari.

Kedua, madrasah SKB 3 Menteri. Madrasah ini tidak lepas dengan setelah keluarnya SKB 3 Menteri, beberapa madrasah Diniyah memasukkan pelajaran umum dan yang sekarang berkembang menjadi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Sebagai upaya peningkatan mutu pemerintah member berbagai bantuan seperti buku ajar, dana rehab bangunan, laboratorium dan sebagainya.

Ketiga, madrasah pesantren. Madrasah pesantren, madrasah ini adalah madrasah yang memakai sistem pondok pesantren, siswa tinggal di pondok selama 24 jam sehari semalam dengan suasana belajar.

Bila ditinjau dari segi kurikulumnya, madrasah pesantren ini dibagi menjadi dua macam yaitu; *Pertama*, seluruh kurikulumnya diprogramkan dan diatur oleh pondok pesantren sendiri. *Kedua*, mata pelajaran umum sesuai dengan kurikulum madrasah SKB 3 Menteri, sedangkan mata pelajaran agamanya diprogramkan dan diatur oleh pondok pesantren, dengan tetap memperhatikan kurikulum madrasah SKB 3 Menteri

maka siswa-siswi dilakukan Ujian Negara (M. Ridwan Nasir, 2006: 95-102).

Pada madrasah SKB 3 Menteri yang biasa disebut madrasah, maka madrasah-madrasah yang ada berbagai macam bentuknya, yang kadang disebut madrasah pinggiran dan madrasah model (madrasah unggulan). Madrasah pinggiran, madrasah yang ada di daerah pinggiran kota dengan gedung-gedung sekolah dan fasilitas yang segi kualitas dan mutu pendidikan madrasah pinggiran masih memperhatikan, kemerosotan kualitas pendidikan madrasah pinggiran lantaran input siswa bukan dari siswa yang terbaik, dan proses pembelajaran berjalan apa adanya karena mengalami berbagai keterbatasan. Sedangkan madrasah model (madrasah unggulan) adalah madrasah yang didesain sebagai pusat percontohan bagi madrasah yang ada di sekitarnya, baik dalam bidang kurikulum, mutu kelembagaan, maupun proses dan fasilitas serta sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai serta sumber daya guru atau mutu guru belajar yang ideal, kreatif dan inovatif. Madrasah model ini banyak ditemui di kota-kota besar atau di pusat kota. Madrasah-madrasah unggulan yang bermunculan memiliki berbagai konsep, dari konsep yang dikembangkan sehingga muncul beberapa model atau tipe.

Menurut Moedjiarto, sekolah-sekolah unggulan yang bermunculan saat ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe, yaitu:

Pertama, input siswa unggul, proses belajar mengajar tidak luar biasa maka dapat diduga lulusan dapat bermutu unggul. Keunggulan lulusan sekolah ini

memang merupakan bawaan sebelum siswa masuk sekolah tersebut.

Kedua, sekolah unggul dalam hal fasilitas, karena fasilitas lengkap maka biaya yang harus dikeluarkan juga mahal. Sekolah dengan fasilitas lengkap seperti ini diharapkan daya tahan siswa untuk belajar bisa lebih lama. Gurunya juga pilihan, dengan harapan proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar dan lulusannya juga bermutu tinggi. Pada sekolah unggul seperti prestasi akademik siswa, input yang unggul bukan persyaratan yang utama.

Ketiga, sekolah unggul jenis lain adalah yang penekanannya iklim belajar yang positif di lingkungan sekolah. Sekolah yang mampu memproses siswa bermutu rendah (input rendah), menjadi lulusan yang bermutu tinggi (output tinggi). Tipe madrasah yang ketiga yang biasa disebut dengan *effective school* (Moedjiarto, 2007: 3-6).

Tipe-tipe tersebut di atas tidak hanya untuk sekolah-sekolah umum yang unggulan, akan tetapi pada lembaga pendidikan Islam atau madrasah-madrasah di lingkungan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Karena pada sekarang sekolah yang notabeneanya unggul tidak hanya dimiliki oleh sekolah umum, namun di lembaga pendidikan Islam banyak lembaga pendidikan yang maju, yang dalam hal ini adalah madrasah baik madrasah yang statusnya negeri maupun swasta.²³⁶

²³⁶A.Zuhdi- Madrasah sebagai Tipologi Lembaga Pendidikan Islam (Kajian tentang Berbagai Model Madrasah Unggulan)Madrasah, Vol. 5 No. 1 Juli-Desember 2012 4-6

DAFTAR PUSTAKA

Nasir, Muhammad. "Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah" *jurnal Penelitian* Vol.10 No.2 Oktober 2009

<https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/12/23/oimm4614-janji-jokowi-soal-madrasah-dan-pesantren-ditagih>, diakses tgl 3 juni 2021, jam 11.10

<https://m.indonesia.com/humaniora/266451/enam-program-pendidikan-di-nawacita-jadi-prioritas>, diakses tanggal 5 Juni 2021, pukul 17.29.

<https://asumsi.co./post/kinerja-pemerintahan-jokowi-di-bidang-pendidikan-bagaimana-janji-dan-capaiannya>. Diakses tanggal 5 Juni 2021, pukul 15.29.

<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sategipendis>, diakses tanggal 5 Juni 2021, pukul 17.32

<http://www.rumah.com/panduan.properti/pendidikan-di-indonesia-33286>, diakses tanggal 7 Juni 2021, pukul 19.04

<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index> x terakreditasi Peringkat 4 (No. SK:36/E/KPT/2019) Vol. 6. No. 1. April 2020 p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862 *Jurnal Ilmiah Mandala Education*

A.Zuhdi- Madrasah sebagai Tipologi Lembaga Pendidikan Islam (Kajian tentang Berbagai Model Madrasah Unggulan)Madrasah, Vol. 5 No. 1 Juli-Desember 2012

BAB 11

SEJARAH PERTUMBUHAN MADRASAH MODEL DI INDONESIA

Nur Hakimah
NIM. 5320002

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. Sejarah Madrasah Model di Indonesia

1. Hakikat Madrasah Model

Madrasah model adalah madrasah unggulan program pemerintah (Kementerian Agama RI) yang didirikan sebagai percontohan untuk madrasah-madrasah unggulan lain maupun madrasah yang belum unggul.²³⁷

Secara terminologis sekolah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (output) pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut maka masukan (input), proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.²³⁸

²³⁷ Arin Tentrem Mawati dkk, *Inovasi Pendidikan: Konsep, Proses dan Strategi*, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm.79

²³⁸ Agustini Buchari *Merancang Pengembangan Madrasah Unggul*, hlm. 97

Di Indonesia, istilah sekolah unggul pertama kali digagas oleh Wardiman Djojonegoro (Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) pada tahun 1994. Gagasan tersebut lahir dari adanya suatu keinginan kuat untuk menghadirkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai visi yang jauh menjangkau ke depan dan berwawasan keunggulan. Bahkan Djojonegoro mengekspektasikan bahwa kehadiran sekolah unggul di setiap provinsi di Indonesia akan membuat terjadinya distribusi ilmu pengetahuan dan dengan demikian sasaran berikutnya ialah terjadinya akselerasi peningkatan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, kehadiran sekolah unggul bukan untuk diskriminasi, tetapi untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki wawasan keunggulan (Djojonegoro, 1998, p. 15)

Dalam praktik di lapangan terdapat tiga tipe madrasah atau sekolah Islam unggulan (Moedjiarto, 2002, p. 34). Ketiga madrasah atau sekolah Islam unggulan tersebut, yaitu *pertama*, tipe madrasah atau sekolah Islam berbasis pada anak cerdas. Jenis tipe ini yaitu sekolah atau madrasah hanya menerima dan menyeleksi secara ketat calon siswa yang masuk dengan kriteria memiliki prestasi akademik yang tinggi. Meskipun proses belajar-mengajar di lingkungan madrasah atau sekolah Islam tersebut tidak terlalu istimewa bahkan biasa-biasa saja, namun karena input siswa yang unggul, maka mempengaruhi outputnya tetap berkualitas.

Kedua, tipe madrasah atau sekolah Islam berbasis pada fasilitas. Sekolah Islam atau madrasah

semacam ini cenderung menawarkan fasilitas yang serba lengkap dan memadai untuk menunjang kegiatan pembelajarannya. Tipe ini cenderung memasang tarif lebih tinggi ketimbang rata-rata sekolah atau madrasah pada umumnya.

Ketiga, tipe madrasah atau sekolah Islam berbasis pada iklim belajar. Tipe ini cenderung menekankan pada iklim belajar yang positif di lingkungan madrasah. Lembaga pendidikan dapat menerima dan mampu memproses siswa yang masuk (input) dengan prestasi rendah menjadi lulusan (output) yang bermutu tinggi. Tipe ketiga ini termasuk agak langka, karena harus bekerja ekstra keras untuk menghasilkan kualitas yang bagus.

Dari uraian di atas dapat didefinisikan bahwa madrasah unggulan adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki komponen unggul, yang tercermin pada sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa) sarana prasarana, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara terampil, memiliki kekokohan spiritual (iman dan/atau Islam), dan memiliki kepribadian akhlak mulia.²³⁹

2. Karakteristik Madrasah Model

Karakteristik madrasah unggul dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria, antara

²³⁹ Agustini Buchari dkk, Merancang Pengembangan Madrasah Unggul, *Journal of Islamic Education Policy* 2016, Vol.1, No.2, 95 – 112 Diterbitkan Online Desember 2016 (<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jiep>), hlm. 97

lain: keunggulan proses pembelajaran, keunggulan sarana-prasarana atau fasilitas belajar, keunggulan lingkungan pendidikan, keunggulan kognitif, keunggulan ekstrakurikuler, keunggulan mulok keunggulan life skill, keunggulan administrasi dll. Tentunya yang dikehendaki adalah keunggulan multivariate.²⁴⁰ Kemendikbud umpunya, menetapkan kriteria sekolah unggul sebagai berikut: 1). Input siswa melalui seleksi yang ketat berdasarkan kriteria dan standar. 2). Sarana dan prasarana belajar yang memadai, baik intra maupun ekstra. 3). Lingkungan sekolah yang kondusif. 4). Guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Undang-undang Guru dan Dosen tahun 2005. 5). Kurikulum yang diperkaya, yang mampu mengembangkan dan memfasilitasi potensi, bakat, kreasi siswa. 6). Rentang waktu belajar di sekolah lebih Panjang. 7). Proses belajar mengajar yang berkualitas. 8). Perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional. 9). Menjadi pusat keunggulan bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.²⁴¹

Adapun madrasah model, secara umum persyaratan yang dikategorikan sebagai berikut: 1). Memiliki manajemen madrasah yang baik. 2). Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 3).

²⁴⁰ Ibid,...

²⁴¹ Agustini Buchari dkk, Merancang Pengembangan Madrasah Unggul, *Journal of Islamic Education Policy* 2016, Vol.1, No.2, 95 – 112 Diterbitkan Online Desember 2016 (<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jiep>), hlm. 101

Kelengkapan sarana dan prasarana Pendidikan. 4). Bantuan Pendidikan yang memadai. 5) Keunggulan kualitas lulusan.²⁴²

Harris and Bennett (dalam Jalal, 2012) mengemukakan bahwa karakteristik sekolah unggul, yaitu: (1) Kepemimpinan yang profesional (Professional Leadership); (2) Visi dan tujuan bersama (Shared Vision and Goals); (3) Lingkungan belajar (a Learning Environment); (4) Konsentrasi pada belajar-mengajar (Concentration on Learning and Teaching); (5) Harapan yang tinggi (High Expectation); (6) Penguatan/pengayaan/ pementapan yang positif (Positive Reinforcement); (7) Pemantauan kemajuan (Monitoring Progress); (8) Hak dan tanggung jawab peserta didik (Pupil Rights and Responsibility); (9) Pengajaran yang penuh makna (Purposeful Teaching); (10) Organisasi pembelajar (a Learning Organization); dan (11) Kemitraan keluarga-sekolah (Home-School Partnership).

Dari semua kriteria tentang madrasah atau sekolah unggul atau madrasah model pasti dirujuk pada Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Standarisasi pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Artinya, jika madrasah telah memenuhi semua atau sebagian

²⁴² Arin Tentrem Mawati dkk, *Inovasi Pendidikan: Konsep, Proses dan Strategi*,...

besar kriteria SNP, maka madrasah tersebut disebut sebagai Madrasah Standar Nasional (MSN) atau Madrasah Kategori Mandiri (MKM). Dalam posisi ini madrasah berada pada level Unggulan atau Model, selanjutnya meningkat statusnya menjadi Madrasah Standar Internasional (MSI), akan berada pada level Model yang menjadi idealisasi sebuah madrasah.²⁴³

Ada dua hal penting yang paling menonjol dalam kualifikasi madrasah unggulan ataupun madrasah model, yaitu: Institusional dan instruksional. Institusional adalah hal-hal yang menyangkut madrasah secara kelembagaan. Sedangkan instruksional adalah hal-hal yang menyangkut pembelajaran di madrasah. Aspek terpenting dalam kelembagaan adalah efisiensi dan efektivitas kerja, kata kuncinya pada manajemen atau sistem pengelolaan dan profesionalisme pengelola dan profesionalitas pengelolanya. Sedangkan aspek terpenting dalam pembelajaran adalah guru dan siswa, kata kuncinya pada belajar tuntas dan pembelajaran bermakna.²⁴⁴

3. Pengembangan Madrasah Model di Indonesia

a. Gagasan Pengembangan Madrasah Model

Gagasan pengembangan madrasah dapat dilihat dari dua dasar utama, yaitu dasar religius dan dasar yuridis.

1) Dasar Religius

²⁴³ Agustini Buchari dkk,...

²⁴⁴ Arin Tentrem Mawati dkk,

Islam memerintahkan belajar pada ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah Saw. Oleh karena itulah belajar merupakan kewajiban utama dan sarana terbaik mencerdaskan umat (Muhaimin, 2005, p. 186). Perintah belajar tersebut tidak terbatas pada urusan duniawi saja, tetapi juga dalam urusan ukhrawi. Firman Allah Swt., dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 122, yang terjemahannya:

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S At-Taubah: 122)

Lafadz “liyatafaqqahuu fidiin” dalam surat At-Taubah ayat 122 itu memberi isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama (Nata, 2002, p. 159). Artinya, seorang muslim perlu mendalami ilmu agama dan mengajarkan kepada orang lain berdasarkan kadar yang diperkirakan dapat memberikan kemaslahatan bagi mereka, sehingga memberikan pengetahuan hukum-hukum agama yang pada umumnya harus diketahui oleh orang-orang beriman. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang pintar dalam urusan duniawi namun mereka lalai dalam urusan akhirat. Firman Allah Swt., dalam Alquran surat Ar Rum ayat

7, yang terjemahannya: “Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.” (Q.S. Ar Rum: 7).

Jadi belajar agama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang muslim sebagai benteng yang dapat menjaga diri dan tetap dalam koridor yang disyariatkan. Begitu pentingnya belajar agama sehingga Allah Swt., memberikan kedudukan tinggi pada orang yang memusatkan perhatian mendalami ilmu agama sebagaimana derajatnya orang-orang berjihad dengan harta dan dirinya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Swt. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan belajar di sebuah lembaga yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama yaitu madrasah.

2) Dasar Yuridis

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri) pada tahun 1975 mengenai kedudukan madrasah dalam sistem Pendidikan nasional, status madrasah sedikit meningkat. Dalam SKB tersebut kurikulum madrasah diubah tidak lagi 100% agama, tetapi menjadi 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Dengan SKB ini secara yuridis madrasah disetarakan dengan sekolah umum.

Secara yuridis Lembaga Pendidikan Islam (keagamaan) menjadi semakin kokoh setelah terbit Undang-undang No. 2 tahun 1989 yang

secara eksplisit menyebutkan Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan termasuk sistem Pendidikan nasional (pasal 11 dan 39). Hal ini dikuatkan lagi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003, pasal 15, 17, 18, 30 dan 37. Dengan kekuatan hukum ini diharapkan kualitas Pendidikan keagamaan (madrasah) semakin meningkat (achmadi, 2008). Untuk mengejar ketertinggalan dari Pendidikan umum, peningkatan mutu madrasah harus terus diupayakan. Salah satu program Kementerian Agama untuk memajukan kualitas lulusan madrasah adalah dengan mencetuskan program Madrasah Model.

Diperlukan Langkah-langkah strategis untuk mengembangkan keunggulan madrasah unggulan. Keunggulan madrasah melalui cara membangun cita dan kultur akademik yang kokoh. Cita-cita didirikannya madrasah unggulan adalah melahirkan lulusan yang unggul di bidang akademik, spiritual dan moral. Selama ini hanya ada dua Lembaga Pendidikan yang melahirkan identitas ilmuwan yang berbeda, yaitu pondok pesantren yang ingin melahirkan ulama (ahli agama) dan sekolah umum yang ingin melahirkan kaum intelek (akademis). Madrasah unggulan selama ini sesungguhnya bercita-cita ingin meraih kedua tujuan tersebut, yakni mencetak calon ulama sekaligus intelek atau intelek yang sekaligus ulama.

Drs. Fatah Syukur, M.Ag menjelaskan dalam bukunya Manajemen Pendidikan Pada Madrasah, menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah madrasah.²⁴⁵

- a) Peningkatan pemahaman dan penerimaan filosofis, nilai-nilai dan misi madrasah
 - b) Perhatian para pencapaian sasaran dan tujuan
- 3) Kepemimpinan yang efektif.
- a) Kepemimpinan kepala sekolah yang lebih fleksibel
 - b) Nilai, visi dan misi madrasah harus dikomunikasikan
 - c) Perhatian pada kelembagaan, visi, misi dan nilai yang diusung
 - d) Kepala sekolah, staf dan orang tua siswa aktif membangun budaya sekolah yang diinginkan berdasarkan visi dan misi.²⁴⁶
- 4) Strategi rencana dan pelaksanaan pembangunan multi dimensi
- 5) Pengelolaan sekolah dan partisipasi masyarakat
- 6) Tanggung jawab dengan jelas dilimpahkan kepada orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh kegiatan madrasah.
- 7) Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- 8) Penetapan standar tinggi

²⁴⁵ Fatah Syukur, Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah, (Semarang: al-Qalam Press, 2006), 148-151

²⁴⁶ Gulan Farid Malik, Pedoman Manajemen Madrasah, (Yogyakarta: BEP, 2000), 13.

- 9) Siswa belajar aktif
 - 10) Lingkungan motivasi belajar mengajar
 - 11) Efektivitas tim guru dan kepala sekolah
 - 12) Sistem yang jujur dalam evaluasi dan pertanggungjawaban
 - 13) Optimalisasi sumber daya dan penggunaannya
 - 14) Organisasi fungsional
- b. Langkah Strategis Pengembangan Madrasah
- Langkah strategis untuk melakukan pengembangan madrasah unggulan tersebut memerlukan upaya sebagai berikut:
- 1) Membangun Mindset secara kolektif
Untuk mengembangkan mutu madrasah unggulan membutuhkan pandangan, cita-cita, imajinasi, nilai-nilai keyakinan yang kuat dan kolektif.
 - 2) Menciptakan inovasi terus menerus.
Keunggulan lembaga madrasah sesungguhnya terletak pada inovasinya. Inovasi merupakan usaha dan kerja nyata untuk mencari dan membuat hal baru demi meraih kemajuan dan keunggulan bagi lembaga pendidikan madrasah secara berkelanjutan
 - 3) Memanfaatkan Teknologi Informasi²⁴⁷
Untuk memajukan madrasah dan sekolah Islam yang merata dan berkualitas membutuhkan energi pikiran, tenaga dan usaha yang konsisten dan berkelanjutan. Sudah saatnya madrasah mengembangkan pembelajaran berbasis digital, selain yang sudah ada, guna

²⁴⁷ Arin Tentrem Mawati dkk, hlm. 81

mengefektifkan program dan kegiatan pendidikan yang lebih maksimal. Pendidikan madrasah tidak boleh tertinggal di bidang teknologi informasinya

- 4) Membangun Kepemimpinan yang Terbuka dan Berprinsip. Dalam rangka pengembangan madrasah unggul dibutuhkan sistem manajemen yang terbuka (open management) termasuk di antaranya adalah perilaku kepemimpinan. Diperlukan kepemimpinan yang efektif: kepemimpinan yang lebih interaktif dan visioner yang konsisten memobilisasi cita-cita, nilai-nilai, dan transformasi gagasan dan institusi.
- 5) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Madrasah. Madrasah yang unggul adalah madrasah yang secara terus-menerus memperbaiki sistem dan tata kelola organisasinya
- 6) Meningkatkan Kualitas Sistem Rekrutmen Siswa Baru. Siswa adalah komponen input madrasah. Untuk mendapatkan output yang baik, diperlukan sistem rekrutmen yang baik dan berkualitas.
- 7) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kegiatan Ekstrakurikuler. Pengembangan minat dan bakat siswa perlu mendapat perhatian. Proses pembelajaran di madrasah tidak hanya berpusat pada pemenuhan kompetensi kognitif melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga kegiatan di luar kelas yang bersifat ekstrakurikuler untuk pemenuhan kompetensi atau keterampilan hidup (life skills).

- 8) Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Keguruan. Orientasi pembinaan dan pengembangan profesi keguruan harus bertumpu pada tiga kegiatan utama yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.²⁴⁸

4. Implementasi Madrasah Model di Indonesia

a. MAN Model Bangkalan

MAN Bangkalan berdiri pada tahun 1978, hasil alih fungsi dari PGA 6 tahun. Sejak tahun 1998, MAN Bangkalan Bersama-sama dengan 35 MAN lainnya yang tersebar di 26 Provinsi ditunjuk sebagai madrasah percontohan (MAN MODEL) melalui program Development of Madrasah Aliyah Project DMAP Departemen Agama.

Visi MAN Bangkalan adalah menjadikan MAN Model Bangkalan sebagai Lembaga Pendidikan menengah terkemuka di Madura yang mengintegrasikan aspek keilmuan teknologi dan keislaman (IPTEK dan IMTAQ). Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran secara profesional dan bertanggung jawab dengan mengintegrasikan aspek keilmuan teknologi dan keislaman.

Man Model Bangkalan juga memiliki program pengajaran ,yaitu program IPS, IPA, Bahasa dan Agama, Dimana pada masing-masing program terdapat guru spesialis pada bidang masing-masing. Misalnya pada program Bahasa

²⁴⁸ Agustini Buchari dkk, hlm 111

terdapat guru bahasa Jerman, jurusan IPS terdapat guru yang benar-benar ahli dalam ilmu sosial, begitu pula dalam program IPA dan Agama, Memiliki 13 orang pendidik bergelar Magister-S2, 69 orang sarjana-S1 dan 5 orang sarjana -S1 Keterampilan. Man Model Bangkalan tentunya memiliki berbagai program pengembangan, misalnya Tata Busana (TB), Elektronika, Ekstrakurikuler, misalnya Paskibra, Pramuka, Drumband dan sebagainya dan yang tidak akan habis untuk dibicarakan karena terlalu banyak pengembangan dan ekstra yang ada di ManBa tercinta ini. Dan tak lupa pula fasilitas yang cukup sangatlah lengkap misalnya Lab Bahasa, Lab IPS dan Lab IPA.

b. MAN Model Yogyakarta (Mayoga)

Visi MAN Model Yogyakarta adalah membentuk siswa unggul, terampil, dan berkepribadian matang (ULTRA PRIMA), sedangkan misinya adalah 1) menyelenggarakan pendidikan yang berbudaya keunggulan, kreatif dan inovatif; 2) membekali siswa dengan life skill baik general life skill maupun specific life skill; 3) memadukan penyelenggaraan program pendidikan umum dan kejuruan; dan 4) menghidupkan pendidikan ber-ruh Islam, menggiatkan ibadah, memperteguh keimanan dan

akhlakul karimah sehingga memperoleh output yang ULTRA PRIMA.²⁴⁹

MAN Model Yogyakarta melakukan inovasi kurikulum dengan pengaturan ulang alokasi waktu antara kurikulum Depdiknas, Depag, dan Kurikulum Mayoga yang ditetapkan sebagai Kurikulum MAN Model untuk mencerminkan gagasan *comprehensive school* (program akademik dan vokasional). Sistem pengajaran bersifat fleksibel dan adaptif serta relevan dengan tuntutan masyarakat. Hanya membuka jurusan IPA dan IPS dan penjurusan dilakukan sejak kelas 2 (XI) sejak tahun 2000.

Penguasaan bahasa asing dilakukan dengan menambahkan mata pelajaran *conversation* dan *muhadatsah*. Muatan lokal berupa: *conversation*, pengembangan penalaran dan minat baca (PPMB) dan Bahasa Jawa. Dibentuk 5 rumpun mata pelajaran: agama, bahasa, IPA, IPS dan Korsen (keterampilan, olahraga dan seni). Selain itu dibuka 2 program: program pengembangan potensi akademik (P3A) bagi siswa yang berminat melanjutkan pendidikan ke PT dan program pengembangan hidup mandiri (PPHM) bagi siswa lainnya. Jurusan IPA PPHM disediakan keterampilan teknis komputer atau industri meubeler, sedangkan bagi jurusan IPS PPHM disediakan tata busana dan batik. Peserta PPHM

²⁴⁹ Ahmad Darmadji, *Evaluasi Program MAN Model Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah*, Millah Vol IX No 2 Februari 2010, hlm.274

berhak mendapat sertifikat keterampilan dari Disnakertrans Provinsi DIY bagi yang memenuhi standar.

Pelajaran olahraga dan seni hanya wajib memilih satu cabang sesuai dengan minat dan bakat siswa, dan diarahkan pada olahraga/seni prestasi yang dilaksanakan sore hari dan dibina oleh pelatih profesional

DAFTAR PUSTAKA

Agustini Buchari dkk, Merancang Pengembangan Madrasah Unggul, *Journal of Islamic Education Policy* 2016, Vol.1, No.2, 95–112 Diterbitkan Online Desember 2016 (<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jiep>)

Ahmad Darmadji, Evaluasi Program MAN Model Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah, *Millah* Vol IX No 2 Februari 2010, hlm.274

Arin Tentrem Mawati dkk, *Inovasi Pendidikan: Konsep, Proses dan Strategi*, Yayasan Kita Menulis, 2020

El Tarbawi (*Jurnal Pendidikan Islam*) No. 1. Vol. I. 2008, 6

Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, (Semarang: al-Qalam Press, 2006)

Gulan Farid Malik, *Pedoman Manajemen Madrasah*, (Yogyakarta: BEP, 2000), 13.

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 pasal 3 ayat 1
serta Kepmendikbud pasal 1 butir 6 No.
0489/U/1992

Surat Keputusan Mendikbud No. 0489/U/1992 dan
Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional

BAB 12
SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
MAN INSAN CENDEKIA DI INDONESIA

Diyah Nurul Fitriyati
NIM. 5320001

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Fakultas Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

A. Pengertian MAN Insan Cendekia

MAN Insan Cendekia Adalah model satuan pendidikan jenjang menengah yang memadukan Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan pengayaan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ciri khas utamanya. Institusi pendidikan ini dibangun dan dikembangkan bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter Islami, berwawasan keindonesiaan, kebangsaan, internasional dan kemanusiaan;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan keislaman, sains, teknologi, ilmu sosial dan seni budaya untuk meraih prestasi baik tingkat nasional maupun internasional; dan
3. Membentuk lulusan yang berkarakter dan mampu melakukan perubahan yang didasari oleh prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin.²⁵⁰

²⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2003), hlm. 12.

B. Sejarah MAN Insan Cendekia

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia atau populer dengan nama MAN IC, merupakan sebuah upaya mendudukkan sekolah agama berdiri sejajar dengan sekolah umum. Para cendekiawan muslim menyadari bahwa persekolahan yang hanya didominasi oleh ilmu-ilmu umum terasa timpang, karenanya mesti berjalan seiring dengan ilmu agama. Kehadiran MAN IC juga dapat dilihat sebagai proses mengembalikan tradisi keilmuan Islam di masa jayanya, seperti di Baghdad dan Spanyol, dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi didasari oleh semangat keagamaan.

Tantangan kekinian yang semakin kompleks, kebangsaanmaupun keumatan, pergaulan antar bangsa, menyebabkan MAN IC menyiapkan diri sebagai wahana penyiapan calon pemimpin yang memiliki kualitas paripurna. Hal ini tergambar secara jelas pada rumusan visi dan misi MAN IC, yang menunjukkan orientasi kuat pada penguatan sumber daya manusia. Dalam perspektif perencanaan strategis, hal ini menunjukkan konsistensi MAN IC dalam menjaga relevansi dengan kondisi lingkungan.²⁵¹ Di samping itu, menegaskan komitmen terhadap mutu.²⁵²

²⁵¹ Syahrul, S, "Perencanaan Strategis dan Praktiknya di Perguruan Tinggi", (Kendari: *Shautut Tarbiyah*, 23(1), 2017), hlm. 142-159.

²⁵² Syahrul, S, "Penelitian sebagai Instrumen Perbaikan Kualitas Kinerja Organisasi Pendidikan secara Berkelanjutan (Continuous Improvement)" (Kendari: *AlTa'dib*, 6(1), 2013), hlm. 150-163.

Sejauh ini, MAN Insan Cendekia (MAN IC) ada 23 di seluruh Indonesia. Secara berurut berdasarkan pendiriannya, MAN IC di Serpong, Gorontalo, Jambi, Aceh Timur, Ogan Komering Ilir, Siak, Paser, Pekalongan, Bangka Tengah, Padang Pariaman, Bengkulu Tengah, Batam, Tanah Laut, Sambas, Kota Kendari, Kota Palu, Sorong, Tapsel, Lombok Timur, Halmahera Barat, Gowa, Pasuruan, dan Lampung Timur.²⁵³ Adapun pembahasan sejarah pertumbuhan dan perkembangan beberapa MAN IC adalah sebagai berikut.

1. MAN IC Serpong dan Gorontalo

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam penguasaan IPTEK yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan, pada tahun 1996 atas ide dari Prof. Dr. - Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie, BPPT mendirikan Magnet School yang nantinya berubah namanya menjadi SMU Insan Cendekia di Serpong dan di Gorontalo melalui program penyetaraan IPTEK STEP (*Science and Technology Equity Program*) bagi sekolah-sekolah yang berada di lingkungan pondok pesantren.

Pada tahun pelajaran pertama (1996/1997), penerimaan siswa SMU Insan Cendekia diprioritaskan bagi siswa-siswi SMU/MA kelas satu dan siswa-siswi lulusan SMP/MTs berprestasi yang berasal dari pondok pesantren dan sekolah Islam

²⁵³ Sehat Sultoni Dalimunthe, *Sejarah Pendidikan Pesantren di Kabupaten Padang Lawas Utara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 135.

lainnya. Akan tetapi, mulai tahun pelajaran kedua (1997/1998) SMU Insan Cendekia memberi kesempatan pula kepada siswa-siswi SLTP umum dan MTs, baik negeri maupun swasta.

Sejak tahun pelajaran 2000/2001 SMU Insan Cendekia, baik yang berada di Gorontalo maupun di Serpong, dilimpahkan pengelolaannya oleh BPPT kepada Departemen Agama RI. Untuk tetap mempertahankan ciri khas penguasaan IPTEK dan IMTAQ, maka dalam pengelolaan dan pembinaannya, Departemen Agama dan BPPT terus melakukan kerja sama. Selanjutnya nama SMU Insan Cendekia ditransformasikan menjadi Madrasah Aliyah Insan Cendekia dengan tanpa mengurangi dan mengubah sistem pengajaran secara keseluruhan yang telah berjalan selama ini.

Pada tahun 2001, dengan SK Menteri Agama RI, Nomor 490 Tahun 2001 MA Insan Cendekia Serpong dan Gorontalo berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Serpong dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Gorontalo.²⁵⁴ Pada tahun 2007, MAN Insan Cendekia Gorontalo memperoleh predikat madrasah aliyah program khusus standar internasional. Konsekuensinya, Kementerian Agama memberikan pembinaan dan pendampingan langsung sebagai bentuk dukungan. Tata kelola pembinaan dan pendampingan dilaksanakan oleh

²⁵⁴ Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Serpong, <https://ic.sch.id/sejarah-madrasah/>, diakses pada 3 Juni 2021.

Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.²⁵⁵

2. MAN IC Jambi

Pada tahun 2004 dicanangkan pendirian Madrasah Aliyah Unggulan Swasta berdasarkan surat keputusan Kakanwil Depag. Prov. Jambi Nomor Kw.04.4/4/PP.02.3/618/2004 Tanggal 3 Desember 2004 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Unggulan Swasta di Kel. Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2006, Nama Madrasah Aliyah diubah dari nama semula Madrasah Aliyah Unggulan Swasta Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi menjadi Madrasah Aliyah Cendikia Jambi di Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Keputusan Kakanwil Departemen Agama Prov. Jambi Nomor Kw.04.4/4/PP.02.3/1091/2006 tanggal 20 September 2006.

Pada tanggal 27 September 2013, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 186 Tahun 2013 tanggal 27 September 2013, Nama Madrasah Aliyah Negeri Cendikia Jambi diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi.²⁵⁶

²⁵⁵ Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Gorontalo, <https://icg.sch.id/tentang-madrasah/>, diakses pada 3 Juni 2021.

²⁵⁶ Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Jambi, <https://icjambi.sch.id/index.php/sekapur-sirih/sejarah/>, diakses pada 4 Juni 2021.

3. MAN IC Aceh Timur

Untuk memperluas semangat Insan Cendekia, pemerintah melalui Kementerian Agama RI mendirikan enam MAN Insan Cendekia yang merupakan replikasi MAN Insan cendekia yang sudah ada yaitu Serpong, Gorontalo dan Jambi. Pada tahun 2013 Aceh Timur merupakan salah satu lokasi yang dibangun MAN Insan Cendekia dengan lahan seluas 10 Ha yang merupakan hibah dari Pemkab Aceh Timur, dan telah dioperasikan untuk tahun ajaran 2015/2016. Madrasah ini akan dapat mendongkrak peningkatkan mutu pendidikan di madrasah dan perluasan akses pendidikan dengan keunggulan-keunggulan sistem yang dilatar belakangi dengan sistem pendidikan Islami, di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Aceh. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Aceh, dalam proses belajar mengajar nantinya mengikuti model madrasah yang telah meluluskan alumni terbaik madrasah di Indonesia misal Madrasah Insan Cendekia yang ada di Serpong.²⁵⁷

4. MAN IC Siak

Pada tahun 2015, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia hadir di Riau, lebih tepatnya di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Terinspirasi oleh MAN Insan Cendekia yang sebelumnya telah beroperasi dan melahirkan prestasi-prestasi di kancah nasional dan internasional, pemerintah

²⁵⁷ Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Aceh Timur, <https://manicat.sch.id/home/informasi/Sejarah-Madrasah/4> , diakses pada 4 Juni 2021.

berupaya untuk mendiseminasikan program ini ke provinsi lain yang ada di Indonesia. MAN Insan Cendekia Siak hadir dalam format pendidikan Boarding School atau sekolah berasrama yang menekankan pentingnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang diselaraskan dengan pengembangan Iman dan Takwa (IMTAK). Lebih jauh lagi, MAN Insan Cendekia Siak ingin meneruskan tradisi mencetak kader-kader calon pemimpin bangsa berkualitas di masa mendatang seperti yang telah diamanatkan undang-undang.²⁵⁸

5. MAN IC Paser

Madrasah Aliyah Negeri Insan Paser diresmikan pada tanggal 03 Agustus 2015, bertepatan dengan 18 Syawal 1436 H. Dan Penetapan kenegrian ke-6 MAN Insan Cendekia, Yaitu MAN IC Paser, MAN IC Pekalongan, MAN IC Babel, MAN IC Siak, MAN IC Ogan Komering Ilir dan MAN IC Aceh Timur. MAN Insan Cendekia Paser dibangun atas kerjasama yang baik antara Pemkab Paser di bawah pemerintahan Bupati H.M.Ridwan Suwidi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama RI. Lokasi MAN Insan Cendekia Paser Terletak di desa Sempulang dengan luas tanah 14 Hektar yang merupakan tanah hibah dari pemerintah Kabupaten Paser dan Komitmen itu terus berlanjut hingga

²⁵⁸ Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Siak, <https://icsiak.sch.id/sejarah-madrasah/>, diakses pada 4 Juni 2021.

sekarang di bawah pemerintahan Bupati Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si.²⁵⁹

6. MAN IC Pekalongan

Pada tahun 2013, Kota Pekalongan merupakan salah satu lokasi yang dibangun MAN Insan Cendekia dengan lahan seluas +/- 10 Ha, pada tahun 2015/2016 telah dimulai kegiatan pembelajaran diiringi dengan proses penambahan pembangunan untuk melengkapi sarana pendukung pendidikan. MAN Insan Cendekia Pekalongan nantinya akan dapat mendongkrak peningkatan mutu pendidikan di madrasah dan perluasan akses pendidikan dengan keunggulan-keunggulan sistem yang dilatarbelakangi dengan sistem pendidikan islami. MAN Insan Cendekia Pekalongan, dalam proses belajar mengajar mengikuti model madrasah yang telah meluluskan alumni terbaik madrasah di Indonesia baik MAN Insan Cendekia Serpong, Gorontalo dan Jambi.

MAN Insan Cendekia Pekalongan menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional (SMA) dan kurikulum Kementerian Agama (MA) yang diperkaya dengan visi misi madrasah. Artinya, Struktur program kurikulum diperkaya dengan penguasaan basic Knowledge of science technology (Program Pemantapan IPTEK) dan peningkatan kualitas imtaq. Untuk itu, dilakukan penambahan jam tatap muka untuk bidang MAFIKIBI (Matematika, Fisika, Kimia Dan Biologi),

²⁵⁹ Madrasah Aliyah Negeri Islam CendekiaPaser, <https://icpsr.sch.id/identitas-madrasah/>, diakses pada 4 Juni 2021.

pendidikan Agama Islam, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Program penunjang kurikulum didesain sedemikian rupa untuk mempersiapkan siswa tuntas dalam belajar dan membantu siswa siap menghadapi Ujian Nasional, Ujian Masuk Perguruan Tinggi baik didalam maupun luar negeri. Program penunjang itu diantaranya : Program klinik mata pelajaran bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, program pengayaan berupa Club Study, Studi lapangan terpadu bagi seluruh siswa, bimbingan intensif UN dan SPMB. Selain itu, dikembangkan juga kurikulum tersembunyi (Hidden Curriculum) dalam program pembinaan dan pembiasaan hidup dengan nilai-nilai islami, pengembangan diri dan pendidikan kecakapan hidup (Leadership lifes skill).²⁶⁰

7. MAN IC Bangka Tengah

Pada tahun 2015, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia hadir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lebih tepatnya di Kabupaten Bangka Tengah. Terinspirasi oleh MAN Insan Cendekia yang sebelumnya telah beroperasi dan melahirkan prestasi-prestasi di kancah nasional dan internasional, pemerintah berupaya untuk mendiseminasikan program ini ke provinsi lain yang ada di Indonesia. MAN Insan Cendekia Bangka Tengah hadir dalam format pendidikan Boarding School atau sekolah berasrama yang menekankan pentingnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

²⁶⁰ Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Pekalongan, <https://icp.sch.id/sejarah/>, diakses pada 4 Juni 2021.

(IPTEK) yang diselaraskan dengan pengembangan Iman dan Takwa (IMTAK). Lebih jauh lagi, MAN Insan Cendekia Bangka Tengah ingin meneruskan tradisi mencetak kader-kader calon pemimpin bangsa berkualitas di masa mendatang seperti yang telah diamanatkan undang-undang.²⁶¹

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Padang Pariaman telah melewati proses melayani masyarakat sejak tahun 2016. Program layanan pendidikan dan upaya peningkatan sumber daya telah dilakukan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat terutama di sekitar Kabupaten Padang Pariaman. Sumber daya saat ini terus berkembang antara lain sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi, bahkan melampaui kualifikasi minimal. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Padang Pariaman telah menjadi salah satu pilihan utama bagi lulusan MTsN dan SMP di Provinsi Sumatera Barat untuk melanjutkan pendidikan, hal ini terbukti dengan tingginya antusias siswa untuk mendaftar sebagai peserta didik di MAN IC Padang Pariaman, pada tahun 2017 jumlah pendaftar sebanyak ± 1300 orang, tahun 2018 ± 1500 orang.²⁶²

²⁶¹ Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Bangka Tengah, <https://icbateng.sch.id/profil-man-insan-cendekia-bangka-tengah/>, diakses pada 4 Juni 2021.

²⁶² Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Padang Pariangan, <https://icpp.sch.id/sejarah-madrasah/>, diakses pada 4 Juni 2021.

C. Karakteristik MAN Insan Cendekia

Terdapat dua sistem pendidikan yang selama ini telah berjalan di lingkungan Kementerian Agama, yaitu sistem persekolahan (madrasah) dan sistem pendidikan berasrama (Pondok Pesantren). Dalam praktek sistem persekolahan (Madrasah) berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan umum, sehingga penguasaan ilmu keIslaman belum optimal, sementara sistem pondok pesantren lebih berorientasi pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman (Islamic Studies), sehingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kurang optimal. Walaupun sudah ada yang berhasil menyeimbangkannya. Hal tersebut mendorong pentingnya ketersediaan pendidikan yang mampu meminimalisasi kelemahan dari kedua model pendidikan tersebut.

Kehadiran MAN Insan Cendekia yang memiliki kekhasan dan keunggulan yang kuat diharapkan mampu memadukan kedua sistem pendidikan tersebut, yaitu berorientasi pada sains-teknologi dan ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) yang bertumpu pada tiga peradaban (hadlarah), yaitu Peradaban Teks, Kitab (hadlaratun-nash), Peradaban Ilmu (hadlaratul ilmi) dan Peradaban Filsafat (hadlaratul-falsafah) sangat tepat dilakukan.

Dengan keterpaduan tersebut, MAN Insan Cendekia diharapkan menjadi pelopor upaya menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama ini terjadi dalam pendidikan Islam di Indonesia. MAN Insan Cendekia menempatkan etika Islam yang bersumber pada nilai-nilai universal al-Qur'an dan al-Hadis untuk menjiwai

seluruh bidang keilmuan yang diajarkan. Islam mengembangkan ilmu yang bersifat universal dan tidak mengenal dikotomi, antara ilmu-ilmu qauliyyah (*hadlratun-nash*) yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan, seperti al-Qur'an al-Hadis, akidah akhlak, fikih) dengan ilmu-ilmu kauniyah-ijtima'iyah (*hadlratul-'ilm*), yaitu ilmu-ilmu empiris-kemasyarakatan, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi dan juga dengan ilmu-ilmu filsafat (*hadlratul-falsafah*).Tiga wilayah keilmuan tersebut dikaji secara mendalam dan terpadu.

Pengkajian dan pendalaman keilmuan berangkat dari paradigma humanistik-etis dengan dukungan strategi yang terpadu. Ilmu-ilmu yang akan diajarkan di MAN Insan Cendekia, jika didasarkan pada nomenklatur keilmuan yang telah ada pada Standar Isi, terdiri atas ilmu humaniora (bahasa, sejarah umum dan kebudayaan Islam, demografi), ilmu sosial (sosiologi, ekonomi, geografi sosial) dan ilmu alam (fisika, kimia, biologi, geografi fisik), yang kajian-kajiannya dipadukan dengan ilmu al-Qur'an dan al-Hadis.

Pengkajiannya dilakukan secara kreatif dan hermeneutik sehingga dapat diinterpretasi secara terus menerus seiring dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits menjadi pijakan dan pandangan hidup (*view of life*) yang menyatu dalam satu tarikan nafas keilmuan dan keagamaan yang diabdikan bagi kemaslahatan umat manusia. Keterpaduan keilmuan ini akan diwujudkan dan dikembangkan dalam pembelajaran di dalam kelas dan aktivitas di luar kelas.

Keterpaduan ketiga bidang peradaban (hadharah) ini diharapkan dapat melahirkan lulusan MAN Insan Cendekia yang kuat aqidah dan pengetahuan keagamaannya (*tafaqquh fiddin*), luas dan dalam pemikirannya, serta menguasai kompetensi yang ditetapkan. Pada gilirannya lulusan MAN Insan Cendekia dapat diterima di perguruan-perguruan tinggi terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri dan bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat.²⁶³

D. Strategi Pengembangan MAN Insan Cendekia

Setiap MAN IC memiliki kurikulum yang cenderung sama, yaitu kurikulum yang memadukan unsur akademik dan agama. Salah satu strategi pengembangan MAN IC yang akan penulis bahas adalah dari MAN IC Kendari. MAN IC mulai dipergunakan pada Juni di tahun 2016, dengan mengedepankan Sains tanpa mengabaikan nilai-nilai agama oleh itu muatan kurikulum di MAN IC 100% akademik dan 100% agama. Untuk melaksanakan/mewujudkan hal itu maka MAN IC membuat *boarding school* sebagai tempat tinggal siswa dan pembinaan keagamaan siswa di MAN IC Kendari. Adapun proses belajar mengajar MAN IC mempunyai waktu yang cukup padat dan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian:²⁶⁴

²⁶³ Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, <http://www.insancendekia-oki.sch.id/index.php/2012-12-13-08-52-53/tentang-madrasah>, diakses pada 4 Juni 2021.

²⁶⁴ Hartin, "Human Resources Oriented: Kerangka Strategis Pengembangan MAN Insan Cendekia Kendari", (Kendari: *Shautut Tarbiyah*, Volume 26 Nomor 1, 2020), hlm. 57.

1. Pembelajaran formal (kelas) mulai jam 7-3 sore. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran di kelas seperti secara umum lainnya atau *full day school* yang merupakan implementasi dari kurikulum 2013
2. Pembelajaran ekstrakurikuler/pendalaman materi terkait ekstrakurikuler yang diterapkan di MAN IC seperti bimbingan olimpiade sains, bimbingan KTI (karya tulis ilmiah) dan bimbingan kegiatan lainnya. Waktunya dari setelah Ashar sampai jam setengah 6. Waktu yang digunakan adalah ba'da ashar sampai setengah enam dan kontinu.
3. Pembelajaran boarding dari ba'da maghrib sampai Isya adapun kegiatannya adalah tahsin, tahfidz, bimbingan imam masjid, bimbingan khatib kemudian ada kajian tematik dan kitabklasik/kitab kuning. Pembelajaran ini dilakukan agar siswa berprestasi dalam bidang agama terlebih sebagai mubaligh.
4. Pembelajaran mandiri dari jam 9 sampai jam 10 maksimal, seperti mengerjakan tugas-tugas dan persiapan pada siswa yang akan mengikuti lomba, dan pembelajaran bahasa setelah subuh. Namun semua kegiatan ini tidak terlepas dari para pembimbing mereka yang mendampingi.

MAN IC Kendari mempunyai program untuk menulis mushaf setiap orang 30 juz dan ini adalah kegiatan wajib sehingga siswa MAN IC tidak bisa lulus jika tidak menulis mushaf dan kegiatan ini dilakukan di waktu-waktu luang mulai siswa masuk di MAN IC sampai tamat dan harus mempunyai mushaf yang ditulis oleh setiap siswa adapun pembimbingannya yaitu siswa langsung melihat al qur'an dan akan

dikoreksi oleh pembimbingnya, adapun penekanannya disini adalah literasi agar siswa terbiasa untuk menulis al-qur'an karena sekarang orang bisa menjadi hafidz tapi belum tentu bisa menulis mushaf dan siswa juga diwajibkan untuk menghafal hadits arbain sebagai standar asramah dan harus mempunyai hafalan al-qur'an 3 juz namun ada yang sampai 5,10 dan 20 juz dan untuk sementara baru sekitar 20 juz yang dihafal dan harus mempunyai 1 penelitian selama selama sekolah di MAN IC.

MAN IC melakukan sistem boarding dan menjunjung tinggi sains tanpa menafikkan nilai agama kemudian penambahan jam, strategi mengajar dan guru model mengajar sehingga prestasi siswa sudah sampai mengikuti nasional dan internasional. Adapun dalam aspek IT siswi hampir semua siswa telah mempunya laptop untuk mencari informasi dan anak-anak ditekankan untuk berkreatif, mandiri dan berinovasi. Karena zaman modern ini memacu siswa agar tidak gagap teknologi dan mereka untuk belajar mandiri.

Mulai januari sudah harus meneliti dan akhir tahun sudah harus selesai dan karena pada saat libur semester siswa disuruh untuk meneliti di kampung dan ketika mereka kembali sudah harus siap proposal dan di akhir tahun harus siap layaknya seperti mahasiswa yaitu skripsi. Untuk membimbing KTI Maka satu pembimbing pengajar 10-15 siswa dan juga punya dokter KIR.

Guru berjumlah 25 orang dan ada yang sudah tinggal didalam karena ada rumah dinas guru, dan setelah ada gedung dinas ini maka guru wajib tinggal di dalam. Siswa 137 orang, dan siswa yang masuk di

MAN IC dibatasi setiap angkatan menerima 96 siswa karena MAN IC Langsung dikelola oleh kementerian agama di bawah dirjen pendis jadi hanya dikasih kuota dengan formasi 3 kelas dan satu angkatan maksimal 24 orang nda bisa lebih, dan uniknya MAN IC tidak bisa menerima siswa pindahan selama proses sekolah berlangsung kecuali sesame MAN IC. Dan regular tidak bisa mutasi ke MAN IC.

Proses pendaftaran sama dengan model seleksi nasional masuk perguruan tinggi dengan pendaftaran online se-Indonesia sistemnya nasional, kemudian tesnya juga ada psikologi dan yang bisa mendaftar hanya prestasi 10 besar dan ada lagi seleksi akademik dan psikologi, dan dari sekolah terakreditasi, dan ini baru mendaftar belum seleksi. Dan untuk biaya pendaftaran tidak ada, spp juga tidak ada, uang asrama yang ada hanya hanya biaya makan perbulan 1 juta, untuk beasiswa ada juga bagi yang tidak mampu yang penting dia cerdas dan mampu maka dibebaskan biaya.²⁶⁵

Dari sumber lain, ada pula program pembinaan keagamaan yang dikembangkan di MAN Insan Cendekia adalah:

a. Tahfidzul Qur'an

Tahfidzul Qur'an atau hafalan Al Quran termasuk di antara program kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan yang pokok di MAN Insan Cendekia. Diharapkan agar siswa setelah keluar dari madrasah mempunyai bekal yang cukup dalam kajian agama

²⁶⁵ Hartin, "Human Resources Oriented: Kerangka Strategis Pengembangan MAN Insan Cendekia Kendari" ..., hlm. 59.

untuk masa depan mereka. Kegiatan ini dibimbing oleh guru agama yang ada di madrasah.

b. Tahfidzul Hadits

Tahfidzul hadits atau hafalan hadis adalah kegiatan untuk menghafalkan hadis-hadis yang termuat dalam kitab al-Arba'in an-Nawawiyah karya Imam Nawawi selama tiga tahun keberadaanya di MAN Insan Cendekia. Kegiatan ini rutin akan dilaksanakan satu kali dalam sepekan dengan bimbingan guru agama.

c. Kajian Kitab Kuning (Qira'atul Kutub)

Pembelajaran/ kajian kitab kuning dilaksanakan secara rutin di asrama dengan bimbingan pengasuh/ ustadz asrama dalam rangka membentuk siswa yang berakhlakul karimah dan berwawasan islam rahmatan lil'alamin.

d. Tadarus Al-Quran

Ditujukan untuk mendukung peserta didik agar mahir membaca dan menghafal Al Quran. Di samping itu, kegiatan ini juga untuk membimbing peserta didik yang belum lancar dalam membaca Al-Quran.

e. Pembinaan Imam Shalat

Ditujukan agar peserta didik mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi imam shalat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pembinaan imam shalat ini dilakukan oleh pengasuh/ ustadz asrama.

f. Pembinaan Khatib Jum'at

Untuk memberikan kesempatan tampil di masyarakat, peserta didik dilatih untuk menjadi khatib Jumat di masjid madrasah dan dibimbing terlebih dahulu oleh pengasuh/ ustadz asrama.

- g. Latihan Taushiah/ Khitobah
Untuk melatih keterampilan berpidato di muka umum (*public speaking*), peserta didik diberikan materi latihan taushiyah/ khitobah di masjid madrasah. Mereka dilatih dan dibimbing oleh pengasuh/ ustadz asrama sebelum tampil di mimbar.
- h. Pengamalan Keagamaan
Pengamalan keagamaan diberikan dalam bentuk melalui shalat jamaah lima waktu, puasa sunnah, tadarrus al-Quran, latihan khotib, latihan khitobah, peringatan hari besar Islam, dan amaliyah keagamaan lainnya.²⁶⁶

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, Sehat Sultoni. 2020. *Sejarah Pendidikan Pesantren di Kabupaten Padang Lawas Utara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hartin. 2020. "Human Resources Oriented: Kerangka Strategis Pengembangan MAN Insan Cendekia Kendari". Kendari: *Shautut Tarbiyah*. Volume 26 Nomor 1.

²⁶⁶ Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, <http://www.insancendekia-oki.sch.id/index.php/2012-12-13-08-52-53/kurikulum-keasramaan>, diakses pada 5 Juni 2021.

Kementerian Agama RI. 2003. *Pedoman Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Ogan Komering Ilir.<http://www.insancendekia-oki.sch.id/index.php/2012-12-13-08-52-53/tentang-madrasah>. Diakses pada 4 Juni 2021.

Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Aceh Timur.<https://manicat.sch.id/home/informasi/Sejarah-Madrasah/4> . Diakses pada 4 Juni 2021.

Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Bangka Tengah.<https://icbateng.sch.id/profil-man-insan-cendekia-bangka-tengah/>. Diakses pada 4 Juni 2021.

Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Gorontalo.<https://icg.sch.id/tentang-madrasah/> . Diakses pada 3 Juni 2021.

Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Jambi.<https://icjambi.sch.id/index.php/sekapursirih/sejarah/> . Diakses pada 4 Juni 2021.

Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Padang Pariangan.<https://icpp.sch.id/sejarah-madrasah/> . Diakses pada 4 Juni 2021.

Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Paser.<https://icpsr.sch.id/identitas-madrasah/>. Diakses pada 4 Juni 2021.

Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Pekalongan.
<https://icp.sch.id/sejarah/> . Diakses pada 4 Juni 2021.

Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Serpong.
<https://ic.sch.id/sejarah-madrasah/> . Diakses pada 3 Juni 2021

Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendekia Siak.
<https://icsiak.sch.id/sejarah-madrasah/> . Diakses pada 4 Juni 2021.

S, Syahrul. 2013. "Penelitian sebagai Instrumen Perbaikan Kualitas Kinerja Organisasi Pendidikan secara Berkelanjutan (Continuous Improvement)". Kendari: *Al-Ta'dib*. 6(1).

_____ 2017. "Perencanaan Strategis dan Praktiknya di Perguruan Tinggi". Kendari: *Shautut Tarbiyah*. 23(1).